



LAPORAN KINERJA

2017



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR

Jl. Cut Nya Dien No. 5 Denpasar - Bali.
Telp. (0361) 223763, 234597, 225395, 222159
Fax. 225395, 234597, 222159.

e-mail : bpom_denpasar@pom.go.id, pomdenpasar@yahoo.co.id



SAMBUTAN
PLT KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI DENPASAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Laporan Kinerja (LAPKIN) Balai Besar POM di Denpasar tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan LAPKIN tahun 2017 didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

SAKIP bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah agar tercipta pemerintah yang baik dan terpercaya, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

LAPKIN adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah. LAPKIN juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dan pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Penyampaian informasi kinerja melalui LAPKIN ini disamping merupakan sarana bagi Balai Besar POM di Denpasar untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pihak terkait (*stakeholders*), masyarakat dan Badan POM, juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar sebagai upaya meningkatkan kinerja di masa mendatang. Prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Balai Besar POM di Denpasar dituangkan dalam LAPKIN.

Secara garis besar LAPKIN 2017, memberikan informasi mengenai rencana kinerja, perjanjian kinerja dan capaian kinerja Balai Besar POM di Denpasar pada tahun 2017. Rencana Kinerja tahun 2017 ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, capaian kinerja yang

didapat dari Pengukuran Kinerja, realisasi indikator kinerja 2017 dibandingkan target pada Perjanjian Kinerja.

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar tahun 2015-2019, Laporan Kinerja pada periode kedua RPJMN 2015-2019 ini lebih menekankan pada evaluasi capaian, perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya dan akhir Renstra. Dalam tahun 2017 ini Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar telah menetapkan kegiatan-kegiatan strategis yang mengarah kepada pencapaian target sasaran tahunan, yang telah ditetapkan dalam rangka mengantisipasi permasalahan pengawasan obat dan makanan dengan mengacu kepada target lima tahun yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Denpasar tahun 2015 – 2019.

Hasil evaluasi kinerja dalam LAPKIN ini, baik capaian kinerja yang memenuhi maupun yang tidak memenuhi target sasaran akan dikaji lebih lanjut sebagai upaya mengidentifikasi upaya perbaikan kinerja yang dapat dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Informasi kinerja yang ada sepenuhnya akan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar dalam upaya pemenuhan sasaran-sasaran yang telah dicanangkan dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Denpasar.

Disadari bahwa tugas dan tanggung jawab pengawasan yang diemban oleh Balai Besar POM di Denpasar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM akan semakin luas dan kompleks. Untuk melakukan pengawasan obat dan makanan dengan ruang lingkup yang semakin luas tersebut, Balai Besar POM di Denpasar tidak mungkin melaksanakannya sendiri dan sangat membutuhkan kerjasama dengan instansi terkait baik dengan Instansi Vertikal maupun Instansi Pemerintah Daerah terutama untuk mensinergikan program/kegiatan masing-masing sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

Disamping itu, peranan masyarakat sebagai konsumen dalam pengawasan obat dan makanan sangatlah penting. Masyarakat adalah penentu akhir apakah suatu produk akan dikonsumsi atau tidak, oleh karena itu pemberdayaan masyarakat sangat menentukan keberhasilan pencapaian kinerja Balai Besar POM di Denpasar.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil dalam pencapaian kinerja Balai Besar POM di Denpasar. Terima kasih juga disampaikan kepada tim penyusun LAPKIN Balai Besar POM di Denpasar tahun 2017 yang telah merampungkan laporan ini tepat pada waktunya. Laporan Kinerja ini merupakan media pertanggungjawaban kinerja atas perjanjian kinerja tahun 2017 antara Plt Kepala Balai Besar POM di Denpasar dengan Kepala Badan POM serta digunakan dalam upaya peningkatan kinerja Balai Besar POM di Denpasar.

Akhirnya, kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Denpasar, 14 Februari 2018

Plt Kepala



Drs. I Wayan Eka Ratnata, Apt.

NIP. 19641124 199403 1 002



DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN KEPALA BALAI BESAR POM DI DENPASAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR DIAGRAM	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
HIGHLIGHT	9
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	11
1.2. STRUKTUR ORGANISASI	12
1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	14
1.4. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	16
1.4.1. INTERNAL	16
1.4.2. EKSTERNAL	19
1.5. ISU STRATEGIS	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
2.1. RENCANA STRATEGIS	23
2.2. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	30
2.3. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	36
A.1. Pencapaian Sasaran Strategis 1	39
A.1.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	41
A.1.2. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	44
A.1.3. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat	47
A.1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	50
A.1.5. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	52
A.1.6. Indikator Jumlah Sampel yang diuji Menggunakan Parameter Kritis	58
A.1.7. Pemenuhan Target Sampling Produk Obat di Sektor Publik	59



A.1.8.	Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan	61
A.1.9.	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	63
A.1.10.	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	65
A.2.	Pencapaian Sasaran Strategis 2	67
A.2.1.	Indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat	68
A.2.2.	Indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang Memberikan Komitmen untuk Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan dengan Memberikan Alokasi Anggaran Pelaksanaan Regulasi Obat dan Makanan	71
A.2.3.	Indikator Jumlah Layanan Publik BBPOM di Denpasar ...	75
A.2.4.	Indikator Jumlah Komunitas yang Diberdayakan	76
A.3.	Pencapaian Sasaran Strategis 3	77
A.3.1.	Indikator Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar oleh BADAN POM	79
A.3.2.	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Sesuai Standar	82
A.3.3.	Indikator Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu	83
B.	REALISASI ANGGARAN	84
C.	ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN	88
BAB IV	PENUTUP	91
4.1.	KESIMPULAN	91
4.2.	SARAN	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi.....	12
Gambar 1.2	Sebaran Pegawai Berdasarkan Umur.....	16
Gambar 1.3	Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	17
Gambar 1.4	Profil Pegawai menurut penempatannya.....	17
Gambar 1.5	Pulau Bali.....	19
Gambar 3.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Kegiatan.....	37
Gambar 3.2	Pengujian Obat dan Makanan	39
Gambar 3.3	Pengawasan Obat di Sektor Publik	59
Gambar 3.4	Pengawasan Sarana Produksi Pangan	61
Gambar 3.5	Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik	63
Gambar 3.6	Pemusnahan Produk TMS	66
Gambar 3.7	Penyuluhan dan Penyebaran Informasi	68
Gambar 3.8	Gerakan Keamanan Pangan Desa	71
Gambar 3.9	Penyebaran Informasi melalui Media Elektronik	75
Gambar 3.10	Realisasi Anggaran Sasaran Kegiatan pada Sasaran Strategis 1.....	85
Gambar 3.11	Realisasi Anggaran Sasaran Kegiatan pada Sasaran Strategis 2.....	86
Gambar 3.12	Realisasi Anggaran Sasaran Kegiatan pada Sasaran Strategis 3.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Kualifikasi dan Kompetensi Personel	18
Tabel 1.2	Data Alat Laboratorium yang dimiliki BBPOM di Denpasar	18
Tabel 2.1	Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Kegiatan, Target Indikator tahun 2017 dan 2019 (RPJM).....	25
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Tahun 2017.....	31
Tabel 2.3	Rencana Kegiatan/Program	32
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2017.....	33
Tabel 3.1	Pencapaian Sasaran Strategis.....	36
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama	38
Tabel 3.3	Capaian dan Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis	40
Tabel 3.4	Capaian dan Perbandingan Indikator Sasaran Kegiatan sasaran strategis 1.....	56
Tabel 3.5	Capaian dan Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2	67
Tabel 3.6	Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	69
Tabel 3.7	Indeks Kepuasan Masyarakat BBPOM di Denpasar Tahun 2017	69
Tabel 3.8	Capaian dan Perbandingan Indikator Sasaran Kegiatan sasaran strategis 2	74
Tabel 3.9	Capaian dan Perbandingan Indikator Sasaran Strategis 3	78
Tabel 3.10	Capaian dan Perbandingan Indikator Sasaran Kegiatan sasaran strategis 3	81
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Anggaran.....	88

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama	38
Diagram 3.2	Perbandingan Capaian IKU	39
Diagram 3.3	Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis 1.....	40
Diagram 3.4	Persentase Obat yang Tidak Memenuhi Syarat.....	41
Diagram 3.5	Persentase Obat Tradisional yang Tidak Memenuhi Syarat.....	44
Diagram 3.6	Persentase Kosmetik yang Tidak Memenuhi Syarat	47
Diagram 3.7	Persentase Suplemen Kesehatan yang Tidak Memenuhi Syarat	50
Diagram 3.8	Persentase Makanan yang Tidak Memenuhi Syarat	52
Diagram 3.9	Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Kegiatan	57
Diagram 3.10	Jumlah Kasus dan Tindak lanjutnya	65
Diagram 3.11	Capaian dan Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2	68
Diagram 3.12	Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Strategis 2	74
Diagram 3.13	Capaian dan Perbandingan Indikator Sasaran Strategis 3	79
Diagram 3.14	Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Strategis 3	82
Diagram 3.15	Realisasi Anggaran Tahun 2017	87

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1a	RENCANA STRATEGIS BBPOM DI DENPASAR TAHUN 2015-2019 MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR
LAMPIRAN 1a.1	INDIKATOR REVIEW RENSTRA BBPOM DI DENPASAR TAHUN 2015-2019
LAMPIRAN 1a.2	KAMUS INDIKATOR REVIEW RENSTRA
LAMPIRAN 1b	RENCANA KINERJA TAHUN 2017 BBPOM DI DENPASAR
LAMPIRAN 1c	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 BBPOM DI DENPASAR
LAMPIRAN 2	PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 BBPOM DI DENPASAR
LAMPIRAN 3	PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN/PROGRAM BBPOM DI DENPASAR TAHUN 2017
LAMPIRAN 4	PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN BBPOM DI DENPASAR TAHUN 2017
LAMPIRAN 5.1	PERSENTASE OBAT DAN MAKANAN MEMENUHI SYARAT BBPOM DI DENPASAR TAHUN 2017
LAMPIRAN 5.2	DATA AUDIT SERTIFIKASI TAHUN 2017
LAMPIRAN 5.3	JUMLAH SAMPEL YANG DIUJI DENGAN PARAMETER KRITIS BBPOM DI DENPASAR TAHUN 2017
LAMPIRAN 5.4 a	HASIL SAMPLING OBAT E-KATALOG (IFK) BERDASARKAN METODE ACAK/RANDOM BBPOM DI DENPASAR TAHUN 2017
LAMPIRAN 5.4 b	PEMENUHAN TARGET SAMPLING PRODUK OBAT DI SEKTOR PUBLIK (IFK) BBPOM DI DENPASAR TAHUN 2017
LAMPIRAN 5.5	PERSENTASE CAKUPAN PENGAWASAN BBPOM DI DENPASAR TAHUN 2017
LAMPIRAN 5.6	PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR BBPOM DI DENPASAR TAHUN 2017
LAMPIRAN 5.7	LAYANAN PUBLIK BBPOM DI DENPASAR TAHUN 2017
LAMPIRAN 5.8	KOMUNITAS YANG DIBERDAYAKAN BBPOM DI DENPASAR TAHUN 2017
LAMPIRAN 5.9	HASIL PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN BBPOM DI DENPASAR TAHUN 2017
LAMPIRAN 5.10a	EVALUASI KINERJA TRIWULAN BBPOM DI DENPASAR TAHUN 2017
LAMPIRAN 5.10b	TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN ANGGARAN TRIWULAN BBPOM DI DENPASAR TAHUN 2017

RINGKASAN EKSEKUTIF

Untuk mencapai Visi Misi Badan POM ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis sesuai Renstra BBPOM di Denpasar tahun 2015-2019 :

1. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
2. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat
3. Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM

Pencapaian ketiga sasaran strategis melalui sasaran kegiatan didukung dengan Program dan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Denpasar yang dilaksanakan tiap tahun. Tujuan utama Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Bali yang tertuang dalam Renstra tahun 2015 – 2019 adalah:

1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Balai Besar POM di Denpasar sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2015-2019. Perjanjian Kinerja merupakan komitmen Kepala Balai Besar POM di Denpasar sebagai Pelaksana Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Bali dengan Kepala Badan POM untuk mencapai Target Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja dengan Anggaran yang telah diberikan, dengan tetap meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Denpasar Tahun 2017 dituangkan dalam Pernyataan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja per triwulan dan Rencana Kegiatan Anggaran.

Evaluasi kinerja Internal yang telah dilakukan meliputi

1. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan Anggaran dimana Realisasinya dievaluasi tiap bulan berdasarkan rencana realisasi Anggaran, Output Realisasi fisik dan keuangan per jenis belanja, sumber dana dan Output Capaian Indikator Kegiatan yang dilaporkan tiap triwulan melalui e-monev Bappenas.
2. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas pelaksanaan RKAKL, data capaian masing – masing output dilaporkan tiap bulan melalui Monev DJA (Smart), sedangkan

Realisasi pengadaan barang dan jasa dievaluasi dan dilaporkan tiap bulan melalui SISMON TEPRA

3. Capaian Target Kinerja dievaluasi tiap triwulan sesuai dengan Rencana Aksi Kinerja dan dilaporkan ke Badan POM melalui *e-performance*. pelaksanaan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja dan akuntabilitas kinerja termasuk pengukuran kinerja dan pengukuran efisiensi kegiatan atas aspek keuangan yang digunakan.
4. Evaluasi pelaksanaan program kegiatan dilakukan tiap bulan terkait konsistensi realisasi anggaran dibandingkan rencana dan Output yang dihasilkan, efisiensi anggaran dan ketaatan terhadap peraturan-peraturan keuangan.

Hasil evaluasi Pencapaian Kinerja tahun 2017 tiap sasaran strategis sbb:

- Sasaran Strategis 1: Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.00	98.14	105.53%	Memuaskan
2.	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	82.00	74.19	90.48%	Cukup
3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91.00	95.45	104.89%	Memuaskan
4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81.00	93.18	115.04%	Memuaskan
5.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89.10	94.36	105.90%	Memuaskan

Berdasarkan hasil perhitungan capaian masing-masing indikator dapat disimpulkan Nilai **Pencapaian Sasaran Strategis 1 adalah 104,37 % dengan kriteria memuaskan.**

Capaian indikator Sasaran Kegiatan Untuk mendukung Sasaran Strategis 1

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3.490	3.500	100.29%	Memuaskan
		Pemenuhan target sampling produk obat disektor publik (IFK)	100%	100%	100.00%	Baik
2.	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	25.00%	24.86%	99.44%	Cukup
3.	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	25.00%	25.74%	102.97%	Memuaskan
4.	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	11	9	81.82%	Cukup

Program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk pencapaian Sasaran Strategis 1 adalah 100 sub kegiatan dengan anggaran Rp 7.682.299.000,-

- Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat

No.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1.	Tingkat Kepuasan Masyarakat	81.00%	84.34%	104.12%	Memuaskan
2.	Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	5	6	120.00%	Memuaskan

Berdasarkan perhitungan capaian masing-masing indikator dapat disimpulkan **Nilai Pencapaian Sasaran Strategis 2 adalah 109,41% dengan kriteria memuaskan.**

Capaian indikator Sasaran Kegiatan Untuk mendukung Sasaran Strategis 2

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1.	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BBPOM di Denpasar	1200	1406	117.17%	Memuaskan
		Jumlah Komunitas yang diberdayakan	23	25	108.70%	Memuaskan

Program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk pencapaian Sasaran Strategis 2 (dua) adalah 34 sub kegiatan dengan anggaran Rp 3.367.593.000,-

- Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Denpasar

No.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1.	Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar oleh BPOM	A (80%-90%)	B (73.14%)	91.43%	Cukup

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis 3 adalah 91,43% dengan kriteria cukup.

Capaian indikator Sasaran Kegiatan Untuk mendukung Sasaran Strategis 3

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	78.00%	81.41%	104.37%	Memuaskan
2.	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	10	100.00%	Baik

Program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk pencapaian Sasaran Strategis 3 adalah 76 sub kegiatan dengan anggaran Rp 21.371.379.000,-

Kelima indikator kinerja pada sasaran strategis 1 dan indikator kinerja tingkat kepuasan masyarakat merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.00	98.14	105.53%	Memuaskan
2.	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	82.00	74.19	90.48%	Cukup
3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91.00	95.45	104.89%	Memuaskan
4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81.00	93.18	115.04%	Memuaskan
5.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89.10	94.36	105.90%	Memuaskan
6.	Tingkat kepuasan masyarakat	81.00	84.34	104.12%	Memuaskan

Kendala - kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan terkait capaian 4 (empat) indikator dengan kriteria cukup, dimana salah satu indikator tsb merupakan IKU :

1. Persentase Obat Tradisional memenuhi syarat,
Tidak tercapainya target Persentase Obat Tradisional memenuhi syarat antara lain disebabkan Obat Tradisional yang beredar di Provinsi Bali merupakan produksi luar Bali, sehingga sulit melakukan intervensi terhadap produsen Obat Tradisional tersebut.

Upaya yang dilakukan adalah :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan Balai POM Provinsi terkait, dalam rangka tindak lanjut Obat Tradisional yang merupakan produk luar Provinsi Bali.
- b. Lebih meningkatkan kemandirian pelaku usaha Obat Tradisional untuk menjamin mutu dan keamanan produk Obat Tradisional sehingga mampu bersaing di pasar lokal maupun global dengan pembinaan CPOTB dan penyebaran informasi terkait Obat Tradisional.
- c. Meningkatkan KIE kepada masyarakat untuk tidak mengonsumsi Obat Tradisional yang tidak memenuhi syarat, mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan tidak memiliki ijin edar.

2. Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar oleh Badan POM, Capaian 91,43%

Salah satu penyebab capaian indikator kinerja Nilai SAKIP oleh Badan POM dengan kriteria cukup karena Penerapan SAKIP dan pelaporan kinerja yang dibuat belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria yang tertuang dalam Permenpan RB No.53 Tahun 2014 dan Juknis Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Lapkin tahun 2015, tetapi sudah ada peningkatan nilai dibandingkan tahun 2016. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya konsistensi dari penerapan SAKIP. Untuk selanjutnya penerapan SAKIP dan pelaporan kinerja akan lebih disesuaikan dengan peraturan tersebut. Upaya yang telah dilakukan adalah meningkatkan kualitas kinerja dan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001 tahun 2015 serta ISO/IEC 17025 tahun 2017 untuk penyelenggaraan sistem mutu laboratorium pengujian dan Integrasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dengan Sistem Manajemen Mutu (QMS) tetapi konsistensi dan pelaksanaannya masih belum intensif.

Upaya yang akan dilakukan untuk memperoleh hasil sesuai target di antaranya :

- Menyusun SKP secara cascading mulai dari eselon 2, 3 dan 4 hingga ke masing-masing personel dan meng-input SKP ke dalam aplikasi e-SKP yang dievaluasi kinerjanya setiap triwulan.
- Memanfaatkan sistem pengukuran kinerja berbasis IT yang dapat mengolah data hasil input dari masing-masing personel untuk menampilkan capaian kinerja sasaran strategis BBPOM di Denpasar
- Memaparkan efisiensi dan efektifitas anggaran di semua sasaran strategis pada saat evaluasi pelaksanaan anggaran setiap bulan

- Mempersiapkan dokumen untuk pengajuan audit WBK/WBBM sehingga bisa mendapatkan sertifikat WBK/WBBM
- Sosialisasi dan internalisasi SPIP kepada seluruh ASN BBPOM di Denpasar dan mempersiapkan dokumen untuk penilaian maturitas SPIP sehingga mendapatkan nilai maturitas SPIP level 3.
- Meningkatkan kualitas kinerja dan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001 tahun 2015 serta ISO/IEC 17025 tahun 2017 untuk penyelenggaraan sistem mutu laboratorium pengujian.
- Meningkatkan konsistensi pelaksanaan Integrasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dengan Sistem Manajemen Mutu (QMS) yang sudah dimulai pada tahun 2017.
- Meningkatkan implementasi dan Internalisasi budaya organisasi melalui sosialisasi, outbond dan pemilihan pegawai teladan serta pemilihan *employee of the month* sehingga kualitas dan kapasitas kelembagaan BBPOM di Denpasar meningkat.

3. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan

Penyebab dari capaian cakupan pengawasan sarana distribusi dengan kriteria cukup salah satunya adalah database sarana tahun 2016 berbeda dengan tahun 2017 karena ada beberapa sarana baru, terutama sarana PIRT sedangkan jumlah sarana yang diawasi meningkat dibandingkan tahun 2016. Tingginya Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) sarana yang diperiksa disebabkan karena form pemeriksaannya tidak mengelompokkan kekurangan Minor sehingga kekurangan minor tetap disimpulkan TMK, Form Pemeriksaan sedang dalam proses perbaikan di Badan POM.

Surat Rekomendasi Tindak Lanjut sarana TMK yang telah dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota hanya 10,78% yang ditindaklanjuti. Dilihat dari jumlah angka ini relatif kecil sehingga perlu ditingkatkan koordinasi dan advokasi kepada *stakeholder* sehingga misi melindungi kesehatan masyarakat dari peredaran produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan dapat terus ditingkatkan, sesuai dengan Inpres No.3 tahun 2017. Untuk mengantisipasi kendala – kendala yang dihadapi dilakukan upaya untuk mencapai target cakupan pengawasan dan kualitas sarana produksi pada tahun berikutnya antara lain :

- Melakukan pemeriksaan yang komprehensif dan memonitor CAPA sarana-sarana TMK tahun sebelumnya.
 - Pemutakhiran data sarana produksi tahun 2018.
 - Koordinasi antara Bidang Pendidik dan Bidang Serlik untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pada sarana yang TMK.
 - Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dengan menyampaikan hasil TMK pengawasan, memonitor Tindak Lanjut dan memberikan *feedback* hasil monitoring.
 - Untuk produsen yang hasil pengujian sampelnya tidak memenuhi syarat akan dilakukan pengawasan dan pembinaan yang lebih intensif.
 - Penyebaran Informasi dan Pembinaan terkait Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB), Cara Produksi Kosmetika yang Baik (CPKB) dan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).
 - Penindakan tegas dilakukan kepada sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan.
4. Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan
- Target perkara tahun 2017 sebanyak 11 perkara dengan realisasi 9 perkara (81,82%) Capaian Jumlah Perkara Obat dan Makanan dengan kriteria cukup disebabkan oleh
- Semakin sadarnya para pelaku usaha untuk menjual produk yang memenuhi syarat dan ketentuan.
 - Perubahan modus operandi pelanggaran di bidang Obat dan Makanan semakin bervariasi termasuk penjualan *online* sehingga sulit mendapatkan bukti untuk proses pro-justitia.
 - Sulit menemukan tersangka pelaku pelanggaran penjualan *online*.

Upaya yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang optimal :

1. Meningkatkan kompetensi petugas terkait penyidikan obat dan makanan melalui pelatihan teknis salah satunya adalah Pelatihan *Cyber Crime*.
2. Meningkatkan Koordinasi dengan *Criminal Justice System* di daerah antara lain dengan Kepolisian, Kejaksaan, Kominfo dan Lintas sektor terkait lainnya.

3. Mengubah pola operasi misalnya dengan melakukan operasi pada malam hari.

Anggaran BBPOM di Denpasar pada tahun 2017 adalah Rp 32.421.201.000,- dan realisasi Rp 31.150.012.568,- (96,08%). Pada tahun 2017 untuk sasaran strategis 1 terdapat 100 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 6.923.799.513,- ; 34 sub kegiatan pada sasaran strategis 2 dengan anggaran sebesar Rp 3.191.548.534,- dan 76 sub kegiatan pada sasaran strategis 3 dengan anggaran sebesar Rp 21.034.664.521,-. Seluruh kegiatan terlaksana secara efisien dan efektif.

Hasil capaian kinerja dan efisiensi kegiatan tidak terlepas dari komitmen dan dukungan seluruh pegawai di Lingkungan Balai Besar POM di Denpasar yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SPIP dan Reformasi Birokrasi serta budaya kerja organisasi.

Untuk meningkatkan kinerja dan mengantisipasi kendala – kendala BBPOM di Denpasar berupaya meningkatkan *Review Kegiatan/POK*, evaluasi terhadap target kinerja, pengukuran kinerja kegiatan, pengukuran efisiensi kegiatan, meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan serta pengelolaan anggaran secara rutin. Membentuk Tim untuk memonitoring laporan Kinerja, Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM BBPOM di Denpasar untuk mengantisipasi kemajuan ilmu dan teknologi yang begitu pesat, melalui pelatihan, serta memperkuat jejaring kerja dengan lintas sektor terkait. Meningkatkan peran serta *stake holder* sesuai tugas dan tanggung jawab masing – masing yang tercantum dalam Inpres No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan sosialisasi Inpres tersebut.

HIGHLIGHT**Penghargaan yang diterima BBPOM di Denpasar Tahun 2017 :**

- ❖ Setelah dilakukan Audit Oleh Kemenpan RB pada tahun 2017, BBPOM di Denpasar mendapat penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Baik”.
- ❖ Salah satu dari pasar binaan BBPOM di Denpasar dari tahun 2014 mendapatkan piagam penghargaan dari Badan POM sebagai percontohan pasar aman dari bahan berbahaya pada tahun 2017.
- ❖ Juara III (tiga) Media sosial Balai POM terbaik dan teraktif.
- ❖ Hasil Uji Profisiensi FAPAS Internasional (Provider UK) inlier.
- ❖ Juara III (tiga) lomba Poster ilmiah pada kegiatan Seminar dan Presentasi hasil Riset yang diselenggarakan oleh Pusat Riset Internasional.
- ❖ Laboratorium Terapetik BBPOM di Denpasar sedang menjalani proses pre kualifikasi sebagai laboratorium Balai POM yang pertama diakui secara internasional oleh WHO di Indonesia dengan didampingi oleh USP (PQM).

Inovasi dalam Manajemen Kinerja :

- ❖ Manajemen Kolom HPLC untuk mendukung Kinerja Laboratorium
- ❖ Manajemen Penataan Baku Pembanding Terpadu
- ❖ Manajemen Pengelolaan Limbah Laboratorium (IPAL)
- ❖ Membuat pelayanan terpadu satu pintu dalam mendukung pelayanan publik
- ❖ Membentuk tim MEDSOS dengan perwakilan dari masing-masing bidang

Inisiatif dalam Pemberantasan Korupsi :

- ❖ Disediakan ruang penerimaan tamu pegawai yang dilengkapi dengan CCTV
- ❖ Sosialisasi berkala terkait Etika, Disiplin Pegawai, SPIP dan Budaya kerja serta Integritas
- ❖ Membuat laporan Gratifikasi secara rutin setiap triwulan
- ❖ Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai BBPOM di Denpasar
- ❖ Menandatangani Pakta Integritas dengan GP-Farmasi dan PERKOSMI
- ❖ Pemeriksaan Kas Intern setiap bulan
- ❖ Melakukan Mitigasi Risiko
- ❖ Menandatangani Pakta Integritas pada saat melakukan pengadaan melalui e-procurement.

BAB I PENDAHULUAN

BBPOM di Denpasar adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM RI yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertugas melakukan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk melaksanakan Tupoksi, BBPOM di Denpasar menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 yang dituangkan dalam bentuk Perencanaan Kinerja selanjutnya dibuat Rencana Kerja Tahunan yang digunakan untuk mengajukan Anggaran. Perjanjian Kinerja dibuat sesuai dengan Anggaran yang tersedia pada DIPA. Selanjutnya dibuat Rencana Aksi Perjanjian Kinerja per triwulan. Dalam mewujudkan target kinerja tahunan maka dibuat Perjanjian Kinerja antara Kepala BBPOM di Denpasar dengan Kepala Badan POM. Pelaksanaan kinerja dievaluasi setiap triwulan sesuai dengan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Denpasar. Selanjutnya Perjanjian Kinerja tersebut diukur dalam bentuk laporan kinerja yang akuntabilitasnya diukur atas dasar kesesuaian antara perjanjian kinerja dengan hasil kinerja yang dinyatakan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau Laporan Kinerja (LAPKIN).

Cascading peran dan tanggung jawab dilakukan oleh Kepala BBPOM di Denpasar dengan eselon 3 (tiga) sesuai tupoksi masing-masing bidang, kemudian dilanjutkan dengan eselon 4 (empat), sampai kepada pejabat fungsional tertentu dan pejabat fungsional umum, dengan pembuatan SKP di awal tahun. Masing – masing bertanggung jawab terhadap capaian dari SKP nya untuk memastikan tercapainya target kinerja sesuai perjanjian kinerja. Capaian SKP dan perilaku pegawai diukur dalam prestasi kerja setiap tahun, disamping itu juga dibuat perjanjian kinerja dengan Kepala Bidang, mengacu perjanjian kinerja dengan Kepala Badan.

Output Pelaksanaan program/kegiatan, realisasi anggaran dan capaian kinerja sasaran strategis dan sasaran kegiatan dievaluasi setiap bulan dan triwulan sesuai dengan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Denpasar. Sasaran kerja pegawai (SKP) dan evaluasi SKP dilakukan melalui e-SKP.

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.21.4232 tahun 2004, BBPOM di Denpasar merupakan salah satu UPT di lingkungan Badan POM di bidang pengawasan Obat dan Makanan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM. Dalam pelaksanaan tugas secara teknis dibina oleh para Deputi dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Utama.

TUGAS POKOK

- Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutic, narkotika, psicotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplimen, keamanan pangan dan bahan berbahaya.

FUNGSI

Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan

Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutic, narkotika, psicotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya

Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi

Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum

Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan

Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen

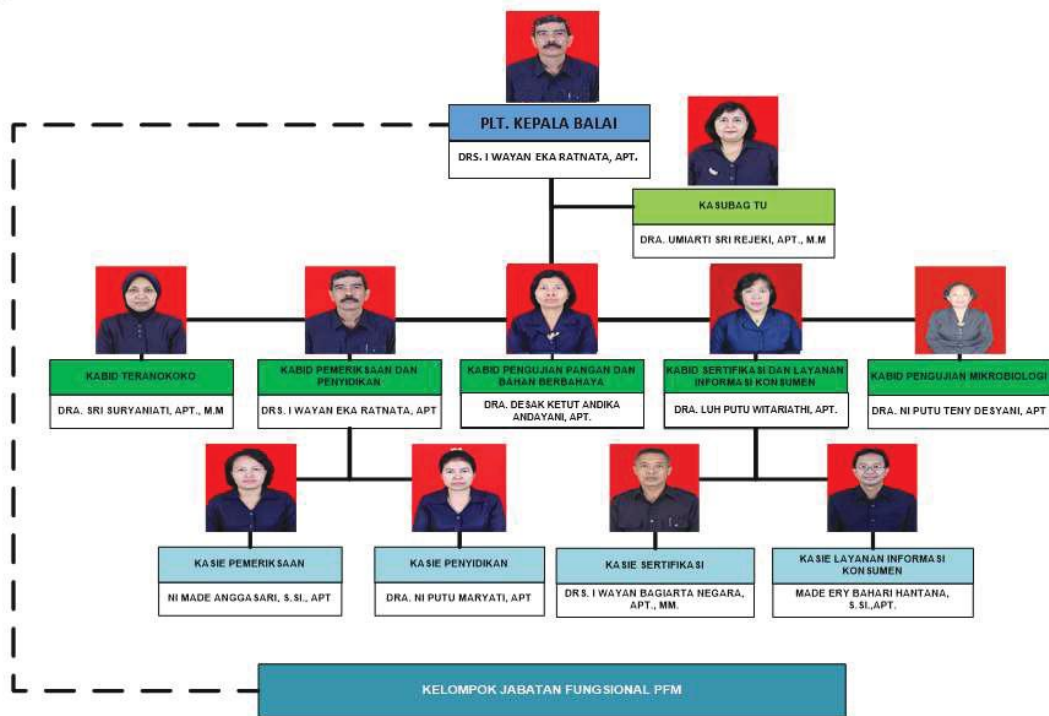
Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan

Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtangaan

Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan, sesuai dengan bidang tugasnya

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI No. 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Badan POM, maka untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar POM di Denpasar dibentuk dengan struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Balai Besar POM di Denpasar terdiri dari 5 Bidang, 4 Seksi, 1 Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional, sebagai berikut :

- ❖ Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen.
- ❖ Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya.
- ❖ Bidang Pengujian Mikrobiologi.
- ❖ Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan, dengan 2 seksi yaitu Seksi Pemeriksaan dan Seksi Penyidikan.
- ❖ Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen, dengan 2 seksi yaitu Seksi Sertifikasi dan Seksi Layanan Informasi Konsumen.

- ❖ Sub Bagian Tata Usaha.
- ❖ Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.

Masing-masing bidang, seksi, sub bagian dan kelompok jabatan fungsional tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen

Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapeutik, narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen.

2. Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya

Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya.

3. Bidang Pengujian Mikrobiologi

Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi.

4. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri dari :

a. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

b. Seksi Penyidikan

Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapan, narkotika, psicotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

5. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen

Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan informasi konsumen.

Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen terdiri dari:

a. Seksi Sertifikasi

Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu.

b. Seksi Layanan Informasi Konsumen

Seksi Layanan Informasi Konsumen mempunyai tugas melakukan layanan informasi konsumen.

6. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Balai Besar POM di Denpasar.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan jabatan Fungsional Umum.

1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

BBPOM di Denpasar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan POM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan Badan POM. BBPOM di Denpasar sebagai UPT di Lingkungan Badan POM ini mempunyai peranan

penting sebagai perpanjangan tangan dari Badan POM yaitu melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya di wilayah Provinsi Bali.

Kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini membawa perubahan yang besar pada industri farmasi dan makanan dengan adanya penemuan baru maka skala produksi berkembang cepat baik dari segi jumlah, dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh Balai Besar POM di Denpasar, setelah pengawasan oleh produsen sendiri, pengawasan konsumen sebagai penentu keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk juga sangat penting. Oleh karena itu perlu dilakukan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang obat dan makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat pada obat tradisional dan penggunaan bahan berbahaya pada produksi makanan dan kosmetika.

Era globalisasi/ perdagangan bebas yang semakin maju dan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menuntut kesiapan industri dalam negeri untuk dapat bersaing dengan produk dari luar negeri. Untuk itu Balai Besar POM di Denpasar perlu melakukan pemberdayaan terhadap industri secara intensif melalui pembinaan dalam penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) sehingga daya saing produk Indonesia di dalam dan luar negeri meningkat terutama produk UMKM Kosmetik yang merupakan produk unggulan di wilayah provinsi Bali.

Tren pengobatan sendiri di masyarakat baik menggunakan obat kimia ataupun obat tradisional/herbal yang diikuti dengan adanya promosi dan iklan yang gencar dengan informasi yang cenderung berlebihan/menyesatkan dapat menyebabkan penggunaan obat/obat tradisional/Herbal yang berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya. Adanya peredaran produk tidak terdaftar dan atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika pada jalur yang tidak resmi membutuhkan perhatian khusus untuk dapat ditanggulangi. Untuk itu, distribusi dan penggunaan sediaan farmasi/Obat Tradisional/Herbal tersebut sangat perlu diawasi oleh Balai Besar POM di Denpasar.

Peran Balai Besar POM di Denpasar sebagai bagian integral dari Badan POM dalam melaksanakan pengawasan, sangat berkaitan erat dengan sistem ketahanan nasional karena pada realitanya mempunyai posisi yang strategis yaitu tugas dan fungsinya memberikan

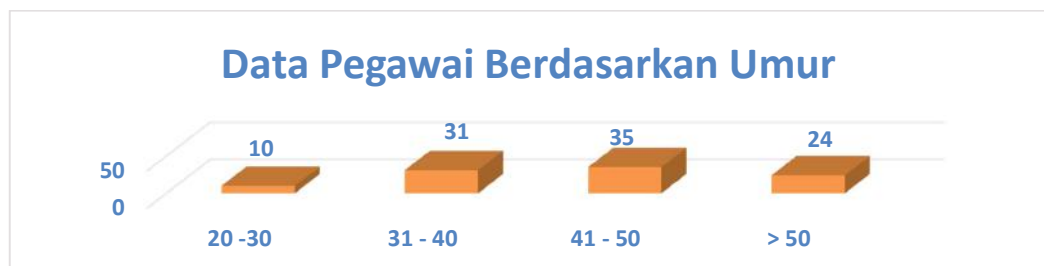
perlindungan kepada masyarakat/ konsumen dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

1.4. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1.4.1. INTERNAL

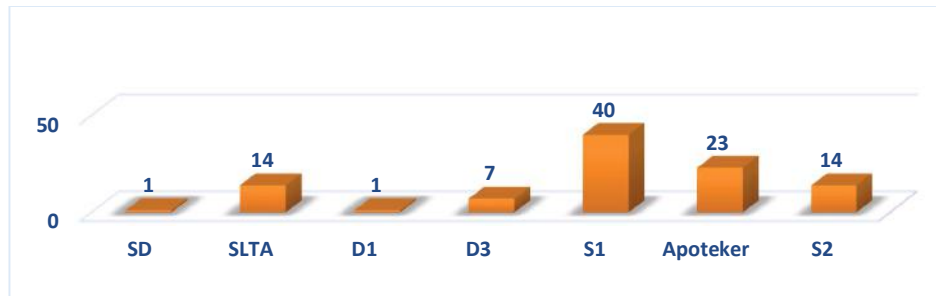
BBPOM di Denpasar memiliki Laboratorium yang sudah terakreditasi SNI 17025-2008, disamping itu BBPOM di Denpasar juga telah tersertifikasi ISO 9001-2015. Laboratorium BBPOM di Denpasar merupakan Laboratorium Unggulan untuk pengujian Narkotika dan Psikotropika (NAPZA). Laboratorium pangan dan bahan berbahaya telah mengikuti uji profisiensi yang diselenggarakan oleh provider International (FAPAS, APLAC) sejak tahun 2012 sampai saat ini tetap mengikuti uji profisiensi setiap tahun. Laboratorium kosmetik juga mengikuti Uji Profisiensi International (NOMCoL Asia Pacific Proficiency Test). Dalam sistem INSW (*Indonesian National Single Window*) telah terhubung dengan Bea Cukai sejak tahun 2015. BBPOM di Denpasar telah memiliki Media Sosial yang selalu *update* setiap hari untuk memberikan Informasi mengenai Obat dan Makanan dimana sampai saat ini telah memiliki *follower twitter* sebanyak 1110, *friend di facebook* sebanyak 1.767 dan *follower instagram* sebanyak 164.

Tahun 2017 BBPOM di Denpasar memiliki 100 orang pegawai, ditinjau dari segi umur dapat dikelompokkan sebagai berikut :



Gambar 1.2 Sebaran Pegawai Berdasarkan Umur

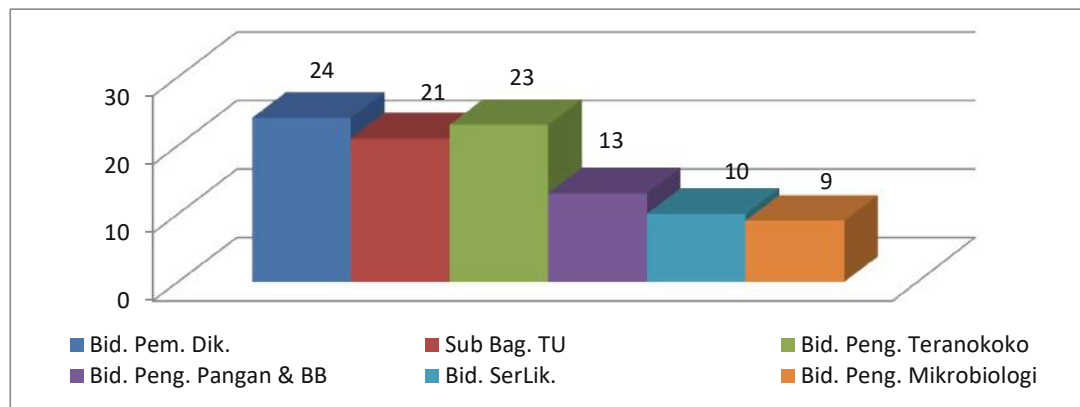
Ditinjau dari tingkat pendidikan, pegawai BBPOM di Denpasar dapat dikelompokkan sebagai berikut :



Gambar 1.3 Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dengan gambaran rincian 4 orang (4%) golongan II, 81 orang (81%) golongan III, dan 15 orang (15%) golongan IV.

Penempatan Pegawai dapat dilihat pada diagram berikut :



Gambar 1.4 Profil Pegawai Menurut Penempatannya

Jabatan Fungsional Tertentu yang ada di BBPOM di Denpasar antara lain : jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebanyak 62 orang, Analisis Kepegawaian sebanyak 2 orang, Perencana sebanyak 1 orang dan Pranata Komputer sebanyak 2 orang.

Dalam rangka pengembangan SDM, tahun 2017 sebanyak 8 orang pegawai sedang mengikuti pendidikan S1, 6 orang pegawai mengikuti Pendidikan S2, dan 3 orang pegawai telah berhasil menyelesaikan pendidikan S2. Selain itu pengembangan SDM juga dilakukan melalui pelatihan baik pelatihan teknis maupun manajerial

Tabel 1.1. Data Kualifikasi dan Kompetensi Personel

NO	Kualifikasi dan Kompetensi Pegawai	Jumlah
1	PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)	15
2	PFM (Pengawas Farmasi dan Makanan)	64
3	CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik)	8
4	Inspektur Obat Tradisional	3
5	Inspektur NAPZA	1
6	Inspektur Kosmetika	5
7	Food Inspektur	17
8	Safety Asesor Kosmetik	1
9	Auditor Pangan, Obat Tradisional dan Kosmetik	6
10	Bendahara	6
11	Perencana	1
12	Analisis Kepegawaian	2
13	Pranata Komputer	2
13	PBBJ	19
15	Administrasi Perkantoran	3
16	Keuangan	2
17	Kearsipan	3
18	Kehumasan dan Protokoler	7

Alat Laboratorium yang dimiliki pada tahun 2017 untuk mendukung kegiatan Pengujian di Laboratorium antara lain :

Tabel 1.2. Data Alat Laboratorium yang dimiliki BBPOM di Denpasar

No	Nama	Jumlah
1	LC MS/MS	1
2	GC-MS	1
3.	HPLC	12
4.	UPLC	2
5.	Spektrofotometer UV – VIS	3
6.	Dissolution Tester	3
7.	GC detektor FID	1
8.	AAS dengan flame, GFA, HVG	2
9.	TLC System	1
10.	FT-IR	1
11.	ELISA Reader + Washer	1

Anggaran Balai Besar POM di Denpasar pada tahun 2017 Rp. 32.421.201.000,- dibandingkan dengan tahun 2016 meningkat Rp. 2.526.529.000,- (7,79%)

1.4.2. EKSTERNAL

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.21.3592 yang ditetapkan tanggal 9 Mei 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan POM Nomor 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan Badan POM, cakupan wilayah kerja BBPOMdi Denpasar meliputi seluruh wilayah administratif Provinsi Bali yang terdiri dari 9 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Buleleng, Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, Klungkung, Karangasem dan Kota Denpasar.



Gambar 1.5. Pulau Bali

Luas wilayah Provinsi Bali adalah 5.780 km² atau 0,29% dari luas kepulauan Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, jumlah penduduk Provinsi Bali hasil registrasi penduduk tahun 2017 sebanyak 4.246.000 jiwa, yang tersebar di 8 kabupaten dan 1 kota dengan jumlah penduduk terbanyak di kota Denpasar.

Jumlah sarana produksi dan distribusi yang harus diawasi oleh BBPOM di Denpasar adalah 4280 sarana dengan rincian 877 sarana produksi dan 3403 sarana distribusi obat dan makanan. Sarana produksi yang terbanyak adalah sarana produksi pangan yaitu sebanyak 831 yang terdiri dari 68 Sarana MD dan 763 sarana PIRT. Sarana produksi Obat Tradisional terdiri dari 11 sarana Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), 5 sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan 1 sarana Industri Obat Tradisional (IOT), total sarana produksi Obat Tradisional di Provinsi Bali sebanyak 17 sarana. Sedangkan sarana produksi kosmetika sebanyak 29, sarana produksi Obat tidak ada di wilayah provinsi Bali.

Sarana distribusi terbanyak adalah sarana distribusi pangan dengan jumlah 1307, berikutnya adalah sarana distribusi Terapeutik dan Napza sebanyak 1045, sarana distribusi Kosmetik sebanyak 780, sarana distribusi Obat Tradisional sebanyak 139, sarana distribusi Bahan Berbahaya sebanyak 73 dan sarana distribusi Produk komplemen sebanyak 59 sarana.

1.5. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang merupakan isu Nasional maupun isu spesifik Provinsi Bali memiliki pengaruh besar terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Denpasar untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Belum sepenuhnya tercapai penapisan produk dalam rangka Pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*Pre Market*).
 - a. Sebagai daerah tujuan wisata maka intensitas lalu lintas orang dan barang – barang khususnya produk kebutuhan wisatawan sangat tinggi, hal ini rentan terhadap peredaran produk ilegal dan disinyalir menjadi tempat untuk lalu lintas peredaran gelap Narkotika. Oleh karena itu Pengawasan Obat dan Makanan di daerah perbatasan/pelabuhan perlu ditingkatkan dengan melakukan kerjasama yang lebih intensif dengan instansi terkait (Bea Cukai, Dinas Perdagangan, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan instansi terkait lainnya), dalam melakukan pencegahan terhadap peningkatan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum. Untuk meningkatkan pelayanan publik menjadi perlu menempatkan petugas BBPOM di Denpasar di daerah perbatasan (Bandara dan Pelabuhan) seperti yang pernah dilakukan pada tahun sebelumnya.
 - b. Wilayah BBPOM di Denpasar merupakan daerah potensial untuk pengembangan Obat Asli Indonesia, terutama dengan tersedianya ribuan "lontar usadha" yang merupakan warisan leluhur yang telah dimanfaatkan secara turun temurun. Produksi Obat Tradisional baik yang dilakukan oleh UMOT atau UKOT memerlukan bimbingan dan pembinaan untuk pengembangannya baik dari segi proses produksi (CPOTB) maupun pengembangan SDM nya.
 - c. UMKM kosmetik juga mengalami perkembangan yang sangat pesat di Bali khususnya produksi Kosmetika Tradisional dan terbuat dari bahan-bahan Herbal. Terhadap UMKM yang memproduksi kosmetika dari bahan herbal memerlukan pembinaan yang lebih intensif dalam pengembangannya karena membutuhkan informasi yang lebih detail menyangkut aspek keamanan bahan baku yang digunakan dan legalitas produk.
 - d. Importasi OMKABA baik untuk kepentingan komersial (secara *online*) maupun untuk penggunaan sendiri tanpa melalui proses SKI (Surat Keterangan Impor)

dengan intensitas sangat tinggi. Hal ini membutuhkan kerjasama lintas sektor khususnya dengan Direktorat Bea dan Cukai yang lebih intensif lagi agar produk produk tersebut dapat diawasi secara ketat importasinya sehingga produk yang tidak memenuhi standar dan membahayakan kesehatan masyarakat dapat dicegah.

2. Belum optimalnya pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*Post Market*)
 - a. UMKM di daerah Bali perkembangannya sangat pesat, didorong oleh kebijakan pemerintah mempermudah ijin UMKM yang dapat diterbitkan oleh pihak Kelurahan dan Kecamatan sehingga pertumbuhannya sangat pesat. Pertumbuhan tersebut tidak diiringi oleh pengetahuan dan wawasan para produsen khususnya IRTP tentang keamanan pangan. Hal ini tergambar dari hasil pengawasan BBPOM di Denpasar yaitu masih banyak hasil uji sampling produk IRTP mengandung bahan berbahaya diantaranya pengawet, pemanis dan pewarna. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan cara pembuatan makanan, kosmetik, dan obat tradisional yang baik kepada produsen UMKM serta meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait.
 - b. Dari hasil pengawasan dan uji laboratorium BBPOM di Denpasar ditemukan Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia Obat, OT yang TMS Mikrobiologi demikian juga dengan produk Kosmetik yang mengandung Bahan Berbahaya yang dilarang dan tanpa ijin edar.
3. Belum Efektifnya Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam rangka peningkatan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan.

Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap obat dan makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu, sehingga untuk dapat melindungi dirinya dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat maka perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat konsumen melalui penyebaran informasi dan memberikan edukasi melalui penyuluhan kepada kelompok – kelompok masyarakat disetiap lini. Kepada produsen juga perlu diberikan informasi dan edukasi agar mengedepankan tanggung jawab moral yaitu melakukan kegiatan produksi dengan mengikuti cara-cara berproduksi yang baik dan tanggung jawab hukum yaitu dengan melengkapi perijinan yang diperlukan dalam berproduksi. Pada saat ini pemberdayaan masyarakat sudah dilakukan tetapi masih perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas dan kuantitasnya.

4. Pengawasan terhadap Obat Tradisional perlu lebih ditingkatkan terutama pada Obat Tradisional asing melalui penertiban produk obat tradisional asing atau import ilegal. Disamping itu mengingat masih diketemukannya obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang telah dilarang maka perlu tetap dilanjutkan upaya pembinaan terhadap produsen setempat melalui kerjasama dengan lintas sektor. Rendahnya kepatuhan terhadap standar Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik, merupakan dasar untuk meningkatkan mutu produk Obat Tradisional.
5. Di bidang pengawasan produk terapeutik/obat, hasil pengujian terhadap sampel obat yang beredar pada dasarnya telah baik. Namun demikian mengingat tingginya resiko bagi kesehatan maka pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan produk obat yang beredar terhadap standar yang berlaku tetap merupakan prioritas. Upaya ini diikuti pula dengan peningkatan kemampuan inspektur di lingkungan BBPOM di Denpasar berkaitan dengan pemberantasan Obat palsu selain kegiatan yang bersifat operasional dan peningkatan kerja sama lintas sektor.
6. Dalam menghadapi permasalahan pengawasan Obat dan Makanan yang semakin luas dan kompleks ke depan meskipun secara *de facto* tugas pokok dan fungsi telah dapat dilaksanakan, namun Badan POM belum didukung oleh perangkat hukum yang kuat berupa Undang-Undang tentang pengawasan Obat dan Makanan yang akan mendasari tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Badan POM. Adanya undang – undang ini selain diperlukan oleh konsumen juga diperlukan oleh kalangan pelaku usaha untuk mendapatkan kepastian hukum dan dalam mengembangkan bisnis dan industri di Indonesia.
7. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
Implementasi JKN mengakibatkan, jenis obat yang beredar di pasaran akan sangat bervariasi baik jumlah maupun jenisnya, sehingga BBPOM di Denpasar harus meningkatkan pengawasan terutama pada sarana distribusi. Untuk menunjang pengawasan, Kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian, kompetensi SDM BBPOM di Denpasar juga harus terus ditingkatkan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Denpasar sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan BBPOM di Denpasar untuk periode 2015-2019. Renstra BBPOM di Denpasar disusun dengan berpedoman pada Renstra BPOM dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 serta amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun 2010-2014..

Penetapan sasaran strategis pada Renstra ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Visi, Misi dan tujuan Organisasi dijabarkan ke dalam sasaran strategis Balai Besar POM di Denpasar, yang menggambarkan rencana target yang akan dihasilkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana target indikator tahunan yang harus dicapai, alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan setiap tahun selama periode Renstra. Rencana dan target indikator kegiatan untuk mendukung sasaran strategis dituangkan dalam Rencana Kinerja (*performance plan*) tahunan.

Sasaran - sasaran kegiatan yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis terkait dan apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis dicapai.

Renstra BBPOM di Denpasar periode 2015-2019 digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan dan meningkatkan kinerja BBPOM di Denpasar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada pertengahan tahun 2017 dibuat Review Renstra ada beberapa target dari indikator disesuaikan dengan kondisi strategis Provinsi Bali, ada satu penambahan indikator yaitu Prosentase sarana yang diaudit mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan pada Sasaran Kegiatan di Sasaran Strategis 2. Karena sebelumnya tidak ada indikator yang menunjukkan kemandirian pelaku usaha. Indikator yang targetnya ditingkatkan adalah :

1. Prosentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat targetnya ditingkatkan karena tahun 2016 capaiannya sudah sangat tinggi (124,29%).
2. Jumlah Layanan Publik
3. Jumlah Komunitas yang diberdayakan

Ada satu indikator yang targetnya diturunkan yaitu Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi syarat, target tahun sebelumnya terlalu tinggi untuk di provinsi Bali sedangkan produk yang tidak memenuhi syarat semuanya berasal dari produsen di luar Provinsi Bali sehingga sulit dilakukan intervensi.

Berdasarkan Renstra dibuat Rencana Kinerja Tahunan kemudian Perjanjian kinerja dibuat berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan dan Anggaran yang diperoleh (DIPA).

Renstra BBPOM di Denpasar tahun 2015-2019 telah disusun dengan mengacu kepada Renstra Badan POM tahun 2015-2019. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan/Sasaran yang dijabarkan dalam bentuk Kebijakan dan Program.

Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Kegiatan, Rencana Kinerja Tahun 2017 dan Target Lima Tahun (RPJM) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Kegiatan, Target Indikator tahun 2017 dan 2019 (RPJM)

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	
			2017	Akhir RPJM
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat *	93.00	94.00
		2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat *	82.00	84.00
		3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat *	91.00	93.00
		4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat *	81.00	83.00
		5. Persentase makanan yang memenuhi syarat *	89.10	90.10
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat*	81.00	82.00
		2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	5	7.00
3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP dari BPOM	A	A
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan				
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3,500	17,500
		2. Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	100.00%	100.00%
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	25.00%	25.00%
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	25.00%	25.00%
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	10	49
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat				
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1. Jumlah layanan Publik BBPOM di Denpasar	1,200	5,945
		2. Jumlah Komunitas yang diberdayakan	23	29
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM				
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana sesuai standar	78.00%	88.00%
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	48

Seluruh Sasaran Strategis, Sasaran Kegiatan dan Indikator pada Renstra dapat dilihat pada Lampiran 1b.

Indikator Kinerja utama (tanda*) periode Renstra 2015-2019 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Denpasar No. HK.07.107.06.15.1.1657 tanggal 3 Juni 2015.

SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR DAN DIFINISI OPERASIONAL
SASARAN STRATEGIS 1 Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
1	Persentase obat yang memenuhi syarat	Persentase obat yang memenuhi syarat dibandingkan jumlah seluruh Obat yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan
2.	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	Persentase Obat tradisional memenuhi syarat dibandingkan jumlah seluruh Obat tradisional yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan.
3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat dibandingkan jumlah seluruh kosmetik yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan
4.	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat dibandingkan jumlah seluruh Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan
5.	Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Pangan Olahan yang mendapatkan NIE dari Badan POM yang memenuhi syarat dibandingkan jumlah seluruh Pangan Olahan yang mendapatkan NIE dari Badan POM yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan
6.	Jumlah Sampel yang diuji dengan parameter kritis	Jumlah Sampel yang diuji dengan parameter kritis
7.	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor public (IFK)	Jumlah sampel yang diambil pada IFK (termasuk gudang Obat KB) dibandingkan dengan target sampel yang harus disampling di IFK (termasuk Gudang Obat KB) yang ditetapkan dalam Pedoman Sampling
8.	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	Perbandingan jumlah sarana produksi yang diperiksa terhadap jumlah sarana produksi yang ada di wilayah Provinsi Bali pada tahun berjalan.
9.	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	Perbandingan jumlah sarana distribusi yang diperiksa terhadap jumlah sarana distribusi yang ada di wilayah Provinsi Bali pada tahun berjalan.
10	Jumlah Perkara di bidang Obat dan Makanan	Jumlah Perkara yang ditangani dan telah diterbitkan SPDP

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat.

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
1	Tingkat kepuasan masyarakat	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dengan pengisian Kuisioner Kepuasan Masyarakat sesuai Permenpan
2.	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Jumlah Kabupaten/Kota yang berkomitmen untuk melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan baik yang dilakukan secara mandiri atau terpadu melalui pengawasan/pemeriksaan, advokasi/penyuluhan, pembentukan tim terpadu, pertemuan dan kegiatan lainnya yang dapat memperkuat pengawasan
3.	Jumlah Layanan Publik BB/BPOM	Jumlah layanan publik terdiri dari Layanan Informasi, Layanan Sertifikasi dan Layanan Pengujian pihak ke 3 (tiga)
4.	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	Jumlah kumulatif Komunitas Desa dan Pasar yang diberdayakan

SASARAN STRATEGIS 3 Meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan BPOM

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar Oleh Badan POM RI.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Balai yang dilakukan oleh APIP Badan POM
2.	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	Persentase sarana dan prasarana yang dimiliki pada tahun berjalan terhadap standar yang ditetapkan.
3.	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah Dokumen yang dihasilkan dan dilaporkan tepat waktu

VISI DAN MISI

Dalam melaksanakan kegiatan BBPOM di Denpasar berpedoman pada Visi dan Misi Badan POM sebagai lembaga induk. Visi dan Misi Badan POM ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan POM, yaitu sebagai berikut:

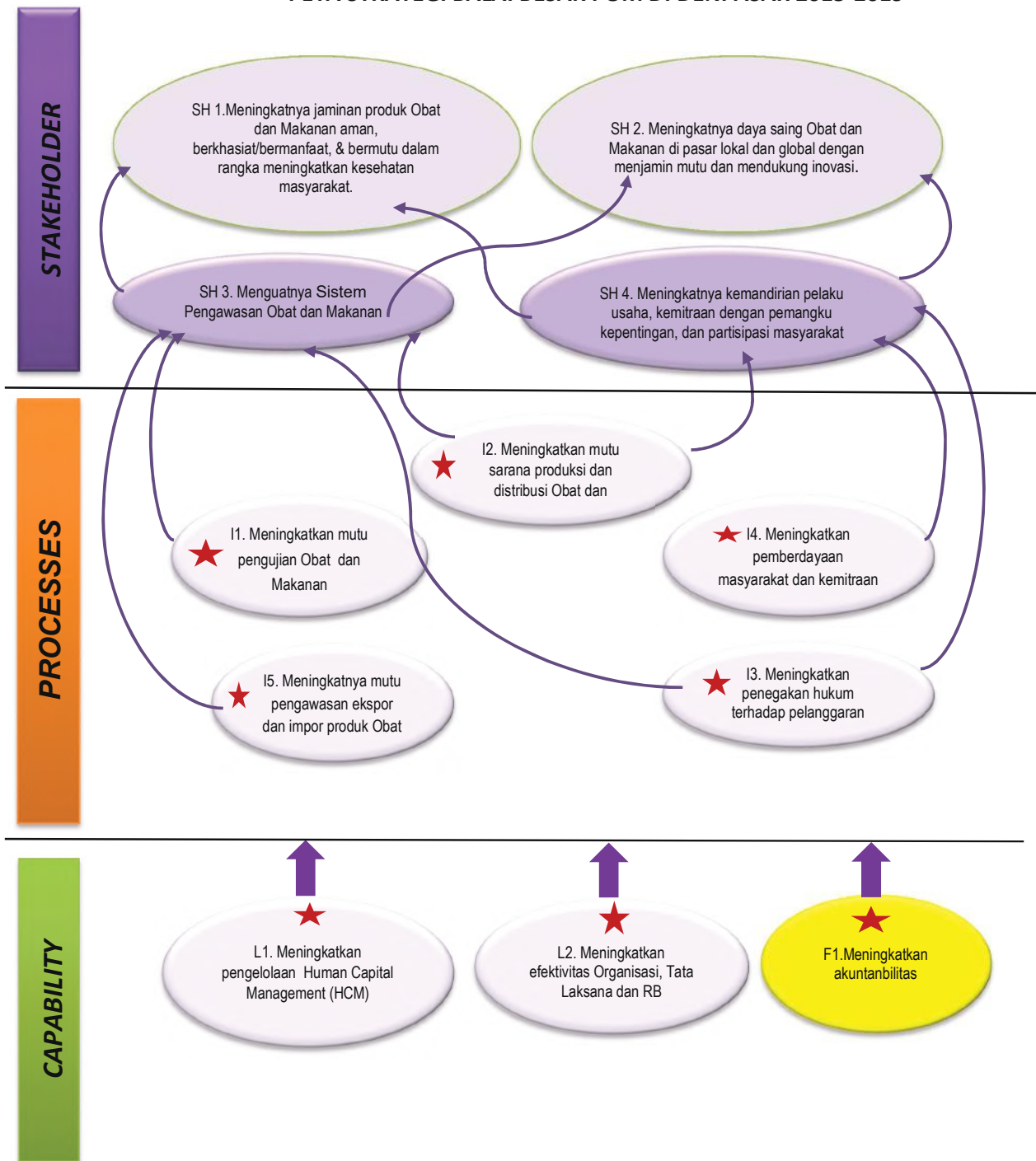
**TUJUAN**

Sesuai dengan Visi dan Misi Badan POM serta mengacu kepada tujuan utama pembangunan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2015-2019 yang dicanangkan oleh Badan POM, maka tujuan utama pembangunan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Bali tahun 2015 – 2019 adalah :

1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

3. BALANCE SCORE CARD

BALANCE SCORE CARD (BSC)
PETA STRATEGI BALAI BESAR POM DI DENPASAR 2015-2019



2.2. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN

Perencanaan Kinerja Tahunan terdiri dari dua dokumen yaitu Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, dimana Perencanaan Kinerja dibuat mengacu pada Renstra yang telah ditetapkan.

2.2.1. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan tahun 2017 dibuat awal tahun 2016, Dokumen rencana kinerja tahunan yang memuat sasaran kinerja Kegiatan, indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran pada rencana kinerja, Dokumen Rencana Kinerja ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan dan anggaran BBPOM di Denpasar. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Renstra BBPOM di Denpasar.

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2017

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.00%
		2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	82.00%
		3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91.00%
		4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81.00%
		5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89.10%
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat.	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	81.00%
		2. Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	5
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar Oleh Badan POM RI.	A
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3500
		2. Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	100%
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	25%
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standard	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	25%
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	11
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1. Jumlah layanan publik BB/BPOM	1200
		2. Jumlah komunitas yang diberdayakan	23
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai BPOM			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	78%
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10

Rencana Kegiatan/program pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2017 yang dilakukan untuk mencapai sasaran kegiatan dan sasaran strategis :

Tabel 2.3. Rencana Kegiatan/program

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan (SS1)	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Pengadaan dan Pengujian Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan dan Makanan
	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Pengawasan sarana produksi Obat Tradisional, Kosmetika, dan Makanan
	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Pengawasan sarana distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya
	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Investigasi Awal dan Penyidikan Obat dan Makanan
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat (SS2)	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Penyebaran Informasi Produk Obat dan Makanan, Laboratorium Keliling, Audit sarana, Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media elektronik dan Iklan Layanan Masyarakat
	Jumlah komunitas yang diberdayakan	Pemberdayaan komunitas Desa, Pasar, Sekolah dan masyarakat untuk menerapkan Keamanan Pangan
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai BPOM (SS3)	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Pemenuhan sarana prasarana sesuai standar, Pengadaan Alat Laboratorium, Pengadaan Layanan Internal
	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu dan Layanan Perkantoran

2.2.2. Perjanjian Kinerja tahun 2017

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Denpasar sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan Anggaran pada DIPA, Perjanjian Kinerja merupakan komitmen Kepala Balai Besar POM di Denpasar sebagai Pelaksana Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Bali dengan Kepala Badan POM dengan tetap meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Di Denpasar Tahun 2017 dituangkan dalam Pernyataan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja per triwulan dan Rencana Kinerja.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.00%
		2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	82.00%
		3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91.00%
		4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81.00%
		5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89.10%
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat.	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	81.00%
		2. Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	5
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar Oleh Badan POM RI.	A
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3490
		2. Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	100%
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	25%
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	25%
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	11
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1. Jumlah layanan publik BB/BPOM	1200
		2. Jumlah komunitas yang diberdayakan	23
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai BPOM			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	78%
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10

Kegiatan

Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Denpasar

Anggaran

Rp 33.040.159.000

2.3. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran Nilai Pencapaian Sasaran Strategis dihitung berdasarkan capaian indikatornya, untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing - masing indikator. Untuk masing - masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKU, memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian sasaran (NPS) :
Sasaran Strategi 1 "Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan"

$$NPS1 = \frac{2NPI1 + 2NPI2 + 2NPI3 + 2NPI4 + 2NPI5}{10}$$

Sasaran Strategi 2 "Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat"

$$NPS2 = \frac{2NPI1 + NPI2}{3}$$

Sasaran Strategi 3 "Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BBPOM di Denpasar"

$$NPS3 = NPI1$$



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis BBPOM di Denpasar yang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan strategis yang telah ditetapkan menggambarkan sesuatu yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan menjadi target sasaran tahunan melalui program dan kegiatan yang dilakukan. Pengukuran kinerja tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja dan realisasi kinerja setiap indikator dari sasaran strategis dan sasaran kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2017. Realisasi kinerja dihitung berdasarkan definisi operasional setiap indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja pada Renstra 2015-2019, kemudian dihitung persentase capaian kinerja untuk masing – masing indikator, selanjutnya capaian masing – masing sasaran strategis dihitung sesuai rumus pada Bab II, seluruh pengukuran indikator kinerja dapat dilihat pada lampiran 2.

Evaluasi kinerja Internal meliputi :

1. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan Anggaran yang Realisasinya dievaluasi tiap bulan berdasarkan rancangan realisasi Anggaran, Output Realisasi fisik dan keuangan per jenis belanja dan sumber dana dan Output Capaian Indikator Kegiatan, dilaporkan tiap triwulan melalui e-monev.bappenas.
2. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas pelaksanaan RKAKL, data capaian masing – masing output dilaporkan tiap bulan melalui Monev DJA (Smart), sedangkan Realisasi pengadaan barang dan jasa dievaluasi dan dilaporkan tiap bulan melalui SISMON TEPPRA.
3. Capaian Target Kinerja dievaluasi tiap triwulan sesuai dengan Rencana Aksi Kinerja dan dilaporkan ke Badan POM melalui *e-performance*. Pelaksanaan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja dan akuntabilitas kinerja termasuk pengukuran kinerja dan pengukuran efisiensi kegiatan atas aspek keuangan yang digunakan.

Evaluasi pelaksanaan program kegiatan dilakukan tiap bulan terkait konsistensi realisasi anggaran dibandingkan rencana dan output yang dihasilkan, efisiensi anggaran dan ketaatan terhadap peraturan-peraturan keuangan.

Pada Renstra Balai Besar POM di Denpasar tahun 2015-2019 ditetapkan 3 sasaran strategis dan 7 sasaran kegiatan untuk mencapai tujuan strategis sesuai dengan visi BPOM 2015-2019 “Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”. Untuk mengukur capaian ke 3 sasaran tersebut, ditetapkan 8 indikator sasaran strategis dan 9 indikator sasaran kegiatan.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

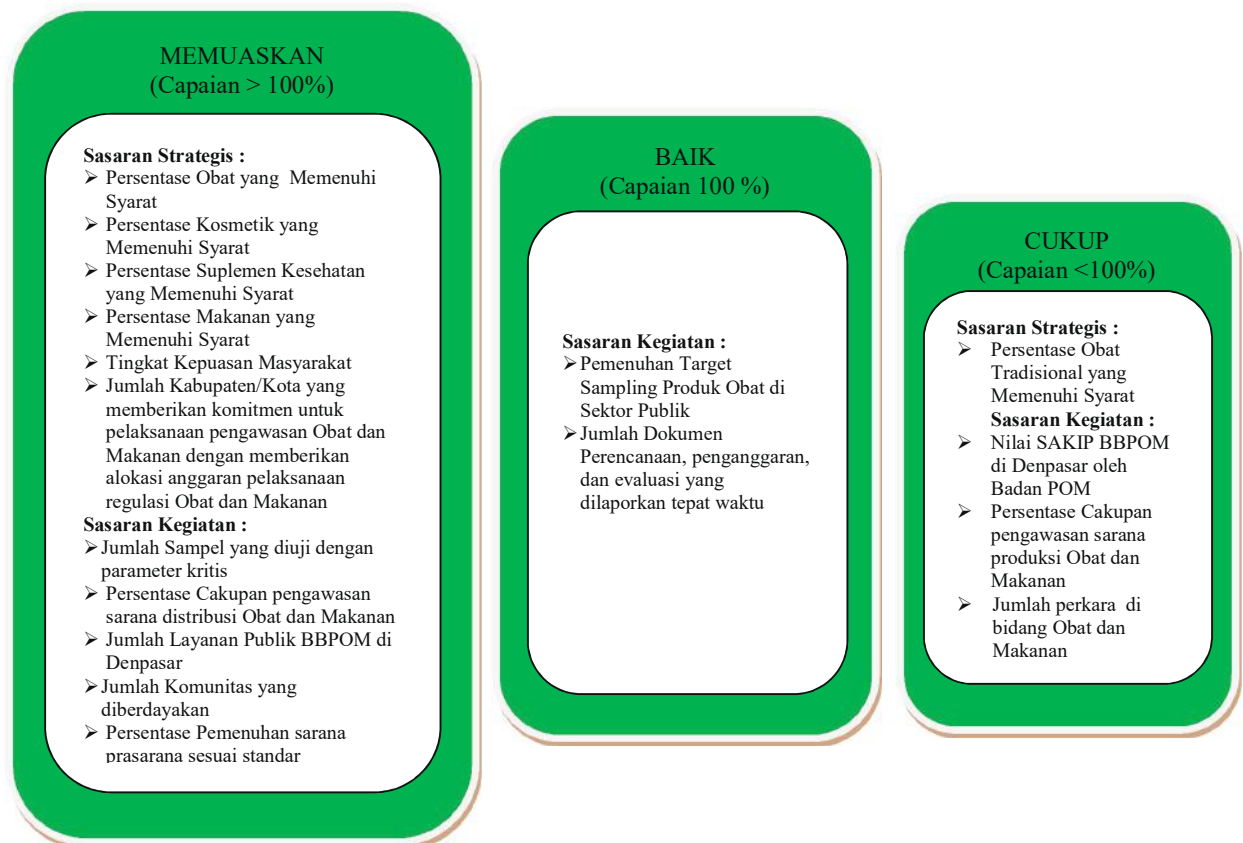
Hasil pengukuran 8 indikator sasaran strategis (SS) dan 9 indikator sasaran kegiatan (SK) dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Gambar 3.1.

Analisis Nilai Pencapaian Sasaran Strategis pada tahun 2017 dihitung berdasarkan capaian masing – masing indikator, Hasil Nilai Pencapaian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1. Pencapaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Nilai Capaian Sasaran (%)	Kriteria
1.	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	104.37	Memuaskan
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	109.41	Memuaskan
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Denpasar	91.43	Cukup

Capaian indikator sasaran strategis dan sasaran kegiatan sesuai kriteria, dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Gambar 3.1. Capaian indikator kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Kegiatan

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kelima indikator di Sasaran Strategis 1 dan satu indikator Sasaran Strategi 2 yaitu Tingkat Kepuasan Masyarakat merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPOM di Denpasar. Capaian IKU Balai Besar POM di Denpasar dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.00	98.14	105.53%	Memuaskan
2.	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	82.00	74.19	90.48%	Cukup
3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91.00	95.45	104.89%	Memuaskan
4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81.00	93.18	115.04%	Memuaskan
5.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89.10	94.36	105.90%	Memuaskan
6.	Tingkat kepuasan masyarakat	81.00	84.34	104.12%	Memuaskan

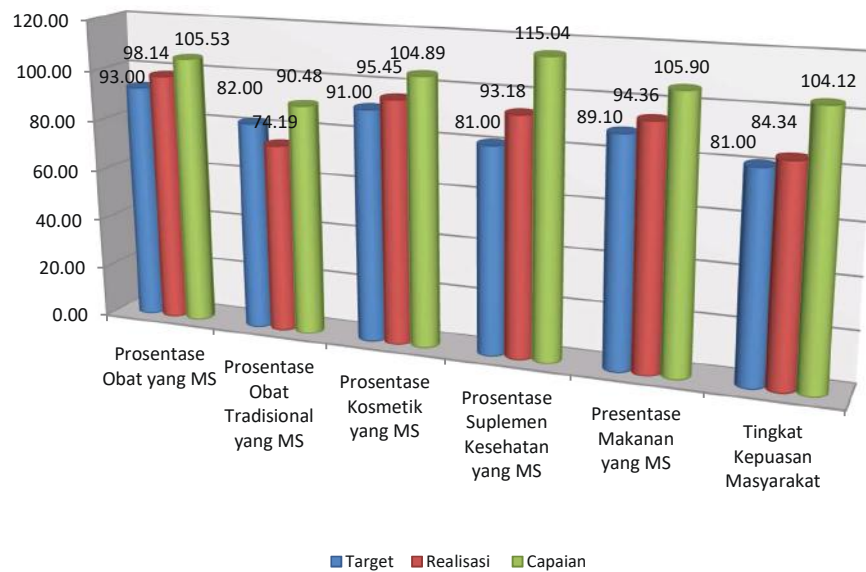


Diagram 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Perbandingan Capaian IKU tahun 2017 dengan tahun 2016 dan target jangka menengah (RPJM) dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

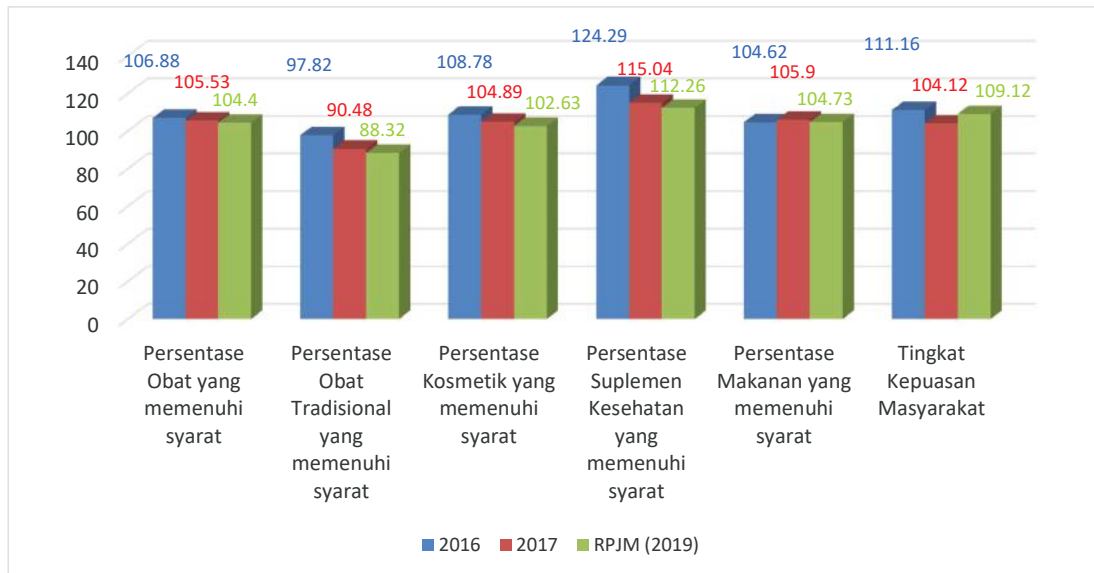
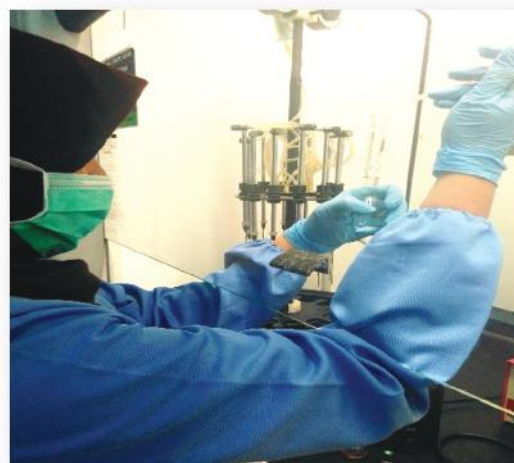


Diagram 3.2 Perbandingan Capaian IKU

Di bawah ini diuraikan capaian indikator masing-masing sasaran strategis sebagai berikut:

A.1. Pencapaian Sasaran Strategis 1 Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Hasil pengukuran capaian dan perbandingan indikator kinerja pada Sasaran Strategis 1 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Gambar 3.2. Pengujian Obat dan Makanan

Tabel 3.3 Capaian dan Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis

No.	Indikator Sasaran Strategis 1	Target 2017	Target Akhir RPJM	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2017 terhadap RPJM	Kriteria 2017
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.00	94.00	98.86	98.14	106.88	105.53	104.40	Memuaskan
2.	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	82.00	84.00	79.24	74.19	97.82	90.48	88.32	Cukup
3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91.00	93.00	97.90	95.45	108.78	104.89	102.63	Memuaskan
4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81.00	83.00	99.43	93.18	124.29	115.04	112.26	Memuaskan
5.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89.10	90.10	92.69	94.36	104.62	105.90	104.73	Memuaskan

Perbandingan capaian indikator Sasaran Strategis 1 tahun 2017 terhadap tahun 2016 dan target akhir RPJM, dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

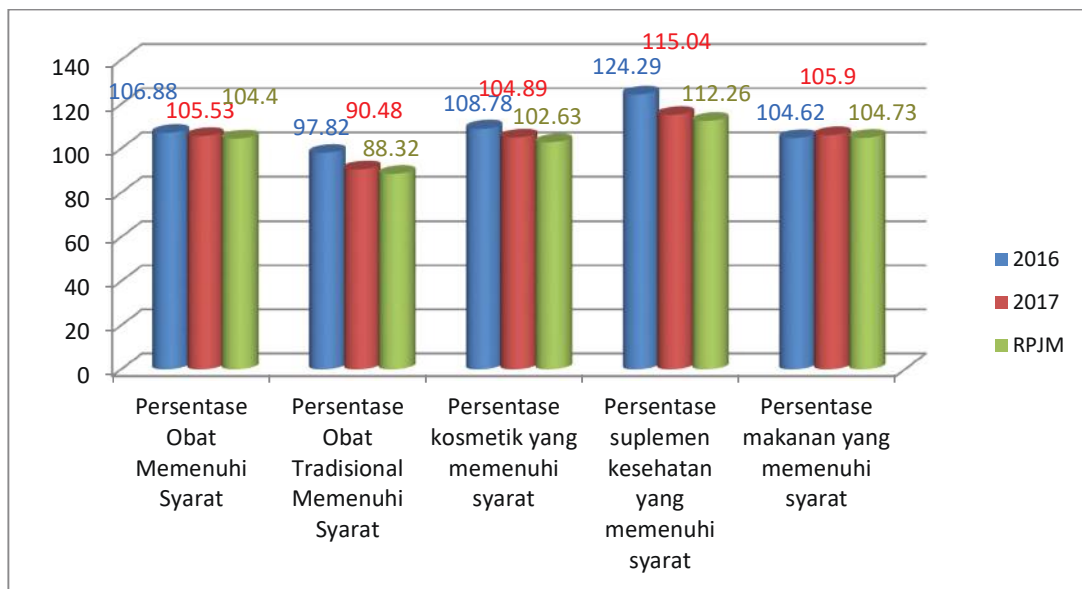


Diagram 3.3 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis 1

Dari perbandingan tabel dan diagram di atas terlihat bahwa 4 dari 5 indikator capaian Sasaran Strategis 1 sudah melebihi target RPJM. Selanjutnya akan dilakukan *review* target dan perubahan metoda sampling terhadap keempat indikator tersebut di atas.

Masing-masing indikator dan analisa capaian akuntabilitas dijelaskan sebagai berikut:

A.1.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat



Diagram 3.4 Persentase Obat yang Tidak Memenuhi Syarat

Hasil Pengukuran terhadap indikator kinerja persentase Obat yang memenuhi syarat terlihat bahwa capaian indikator kinerja yaitu sebesar 105,53% dengan kriteria **memuaskan**. Realisasi kinerja indikator tersebut berdasarkan hasil pengujian sampel obat yang memiliki ijin edar Badan POM, yang dilakukan diseluruh Provinsi Bali dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 689 sampel (98,14%) dari 700 sampel dan 11 sampel tidak memenuhi syarat kimia yaitu penetapan waktu hancur, kadar ambroksol, kloramfenikol, nikotin, tar, Uji disolusi dan Identifikasi DNA, 2 sampel tidak memenuhi syarat mikrobiologi yaitu Angka Lempeng Total. Terhadap produk obat TMS tersebut telah dilaporkan ke PPOMN dengan tembusan kepada Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Napza cq Direktorat Pengawasan Produksi Produk Terapeutik dan PKRT dan telah dilakukan tindak lanjut berupa **recall** (SE *Recall* terlampir).

Dengan realisasi kinerja persentase obat yang memenuhi syarat sebanyak 98,14% menunjukkan bahwa obat yang beredar di Provinsi Bali cukup aman, berkhasiat dan bermutu

sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Pengawasan hanya dilakukan di sarana distribusi dan sarana pelayanan karena di Provinsi Bali tidak ada sarana produksi Obat. Dari 1045 sarana distribusi dan pelayanan yang ada, 334 sarana telah diawasi pada tahun 2017. Sarana yang diawasi berdasarkan kajian risiko antara lain mempunyai indikasi TMK, riwayat hasil pemeriksaan sebelumnya dan sarana baru. Pada saat melakukan pengawasan senantiasa disampaikan cara pengelolaan produk obat yang didistribusikan sehingga mutu bisa dijaga. Terhadap hasil pengawasan yang tidak memenuhi ketentuan selalu ditindaklanjuti dengan memberikan pembinaan tertulis baik langsung ke sarana yang bersangkutan maupun berupa rekomendasi ke instansi terkait (Dinas Kesehatan) untuk memberikan tindakan. Untuk mencapai dan mempertahankan capaian saat ini tetap harus didukung dengan melakukan pengawasan dan pembinaan ke sarana.

Pengawasan iklan terhadap produk Obat selama tahun 2017 sebanyak 48 iklan dengan hasil 35 iklan Tidak Memenuhi Ketentuan. Hasil pengawasan iklan Obat dilaporkan ke Badan POM melalui SIPT.

Dalam rangka peningkatan kepatuhan sarana terhadap peraturan yang ada juga dilakukan sosialisasi peraturan dan pedoman tentang Cara Distribusi Obat yang Baik. Semua ini adalah bertujuan untuk menertibkan jalur distribusi sehingga mutu, keamanan dan manfaat produk bisa dipertahankan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pelaksanaan sampling dan pengujian yang dilakukan berpedoman pada Pedoman Sampling tahun 2017 dan kemampuan uji Balai Besar POM di Denpasar yang terus ditingkatkan sesuai dengan persyaratan parameter kritis.

Perbandingan capaian dengan target RPJM tahun 2019 menunjukkan bahwa realisasi tahun 2017 sudah melampaui target tahun 2019. Adanya perbedaan prioritas sampling setiap tahun dan perbedaan tren penyakit pada masyarakat ataupun wabah penyakit setiap tahun maka kemungkinan akan ada fluktuasi capaian di setiap tahun hingga tahun 2019. Untuk selanjutnya akan dilakukan review target ataupun perubahan metoda sampling.

Persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2017 adalah 98,14% jika dibandingkan dengan tahun 2016 (98,86%), ada penurunan persentase tetapi tidak terlalu besar. Hal ini kemungkinan karena perbedaan jenis sampel dan parameter uji serta tempat sampling.

Capaian indikator kinerja kegiatan dievaluasi setiap tiga bulan untuk memonitor capaian dari target pada perjanjian kinerja.

Penindakan secara pro justitia terhadap pelaku usaha yang melanggar di bidang Obat tahun 2017 sebanyak 1 (satu) kasus (11,11%) dari 9 perkara yang ditangani. Dibandingkan

dengan BBPOM di Yogyakarta, dimana kondisi dan wilayahnya hampir sama dengan BBPOM di Denpasar dapat dilihat persentase Obat memenuhi syarat yang beredar di Provinsi Bali dan di Daerah Istimewa Yogyakarta juga hampir sama, Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat dari BBPOM di Yogyakarta 95,13%.

Untuk selanjutnya, BBPOM di Denpasar harus lebih ketat dan inovatif dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi Obat serta meningkatkan kemampuan SDM laboratorium untuk melakukan pengujian mengikuti perkembangan obat yang semakin pesat. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan perlu ditingkatkan mengikuti kecenderungan pelanggaran yang terjadi atau bahkan lebih proaktif melakukan antisipasi untuk menjamin Obat yang beredar di Provinsi Bali aman dan bermutu sehingga meningkatkan kesehatan masyarakat. Beberapa hal yang akan dilakukan untuk meningkatkan persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi Bali a.l. :

- Sosialisasi kepada masyarakat agar membeli obat di tempat yang resmi dan memakai resep dokter melalui media sosial dan iklan layanan masyarakat, meningkatkan kegiatan advokasi dan koordinasi dengan *stake holder* terkait pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Inpres No. 3 tahun 2017,
- Akan membuat MOU dengan Kwarda Provinsi Bali dan Poltekkes Negeri Bali untuk memanfaatkan remaja/mahasiswa Bali sebagai kepanjangan tangan BPOM sebagai media sosialisasi Obat dan Makanan, Meningkatkan peran serta masyarakat sebagai konsumen cerdas.
- Penyebaran Informasi kepada Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian terkait peraturan dan CDOB.

A.1.2. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat

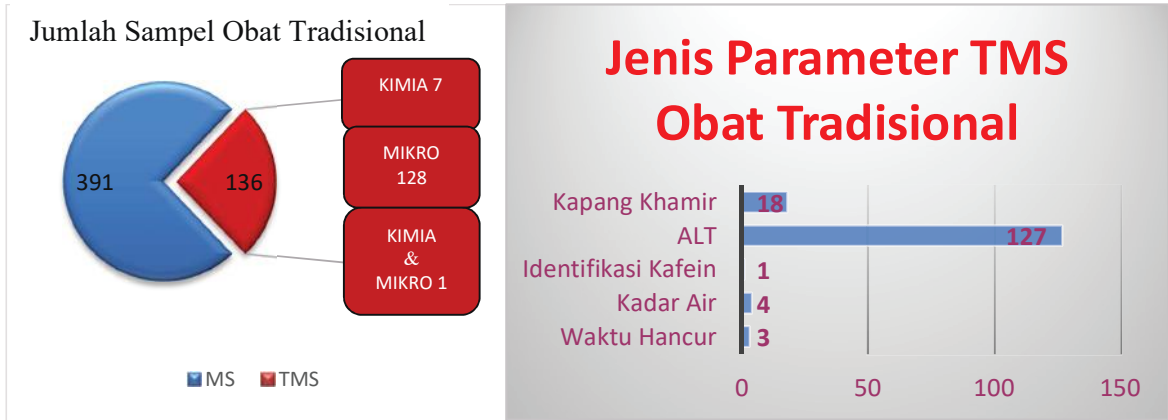


Diagram 3.5 Persentase Obat Tradisional yang Tidak Memenuhi Syarat

Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat terlihat bahwa capaian indikator kinerja yaitu sebesar 90,48% dengan kriteria **cukup**. Realisasi kinerja indikator tersebut berdasarkan dengan hasil pengujian sampling Obat Tradisional dengan ijin edar dari Badan POM yang dilakukan diseluruh Provinsi Bali dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 391 sampel (74,19%) dari 527 sampel. Hasil pengujian Obat Tradisional yang tidak memenuhi syarat sebanyak 136 sampel (25,81 %) dengan rincian tidak memenuhi syarat kimia 7 sampel, antara lain kadar air dan waktu hancur, tidak memenuhi syarat mikrobiologi 128 sampel dimana parameter uji yang tidak memenuhi syarat antara lain ALT dan kapang khamir, tidak memenuhi syarat kimia dan mikrobiologi sebanyak 1 sampel.

Pengawasan iklan yang dilakukan terhadap produk Obat Tradisional pada tahun 2017 sebanyak 270 dengan hasil TMS sebanyak 232 (85,93%). Untuk meningkatkan iklan yang memenuhi ketentuan akan dilakukan sosialisasi peraturan terkait iklan kepada sarana produksi Obat Tradisional dan *stake holder* terkait.

Capaian indikator Obat Tradisional yang memenuhi syarat pada akhir RPJM masih dibawah target tahun 2019 dengan capaian 90,48%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016 (realisasi 79,24%), persentase Obat tradisional yang memenuhi syarat menurun. Penurunan ini kemungkinan disebabkan karena adanya perbedaan jenis sampel yang disampling dengan tahun sebelumnya. Persentase sampel yang tidak memenuhi syarat mikrobiologi sebanyak 24,48% menunjukkan bahwa Obat

Tradisional yang beredar di Provinsi Bali masih banyak yang tidak memenuhi syarat mikrobiologi. Hal ini disebabkan karena proses produksi (CPOTB) yang tidak memenuhi ketentuan terutama dalam hal higiene dan sanitasi.

Dibandingkan dengan BBPOM di Yogyakarta, dimana kondisi dan wilayahnya hampir sama dengan BBPOM di Denpasar dapat dilihat persentase Obat Tradisional memenuhi syarat yang beredar di Provinsi Bali lebih kecil dibandingkan dengan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Realisasi persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat dari BBPOM di Yogyakarta 79,25%.

Obat Tradisional yang beredar di Bali sebagian besar diproduksi di luar Bali. Sarana produksi Obat Tradisional yang ada di Bali kebanyakan kategori UKOT dan U MOT yang sangat memerlukan pembinaan terutama masalah Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik. Tidak kalah pentingnya juga adalah bagaimana mendistribusikan produk Obat Tradisional agar sampai ke tangan konsumen dalam kondisi memenuhi syarat, sehingga perlu terus dilakukan pengawasan ke sarana distribusi. Dari 17 sarana produksi dan 139 sarana distribusi yang ada, tahun 2017 diawasi sebanyak 16 (94,12%) sarana produksi dan 51 (30,91%) sarana distribusi.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan 75,00 % sarana produksi dan 40,02 % sarana distribusi tidak memenuhi ketentuan. Temuan yang terbanyak disarana produksi adalah belum menerapkan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik sedangkan temuan terbanyak disarana distribusi adalah mendistribusikan produk tanpa izin edar dan produk yang mengandung BKO. Kasus pelanggaran di bidang Obat Tradisional sebanyak 4 (26,66%) kasus dan semua diproses *pro Justitia*, untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran di bidang Obat Tradisional sesuai pedoman pola tindak lanjut.

Dengan belum tercapainya target persentase Obat Tradisional ini berarti sasaran strategi Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Bali belum optimal mencakup Obat Tradisional. Hal ini disebabkan karena Obat Tradisional yang beredar di Provinsi Bali sebagian besar merupakan produksi dari luar wilayah Provinsi Bali sehingga sulit melakukan intervensi terhadap produsen Obat Tradisional tersebut. BBPOM di Denpasar telah melakukan pembinaan kepada sarana distribusi untuk tidak menjual produk Obat Tradisional yang tidak memenuhi syarat, tidak memiliki izin edar, yang merupakan publik warning dan melakukan KIE kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih cerdas untuk tidak mengkonsumsi Obat Tradisional yang tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki izin edar sehingga diharapkan selanjutnya capaian indikator Obat Tradisional yang memenuhi syarat bisa tercapai sesuai dengan target. KIE juga dilakukan kepada pelaku usaha agar mampu

mandiri dalam hal memberikan jaminan keamanan dan mutu produknya serta meningkatkan daya saing dipasar lokal maupun pasar global.

Capaian indikator kinerja kegiatan dievaluasi setiap tiga bulan untuk memonitor capaian dari target pada perjanjian kinerja.

Terkait capaian persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat sebesar 90,48%, selanjutnya BBPOM di Denpasar meningkatkan sistem pengawasan terhadap Obat Tradisional melalui beberapa hal antara lain:

- Dilakukan strategi yang lebih fokus untuk menangani masalah Obat Tradisional melalui penyuluhan dan sosialisasi kepada pelaku usaha Obat Tradisional.
- Dilakukan koordinasi dengan BPOM / BBPOM provinsi terkait, untuk tindak lanjut Obat Tradisional yang merupakan produk luar Provinsi Bali.
- Pengawasan terhadap Obat Tradisional lebih ditingkatkan di daerah pelabuhan/ bandara yang merupakan pintu masuk produk-produk dari luar.
- Memantau dan mengawal tindak lanjut produk yang tidak memenuhi syarat.
- Meningkatkan penyebaran *public warning* terkait Obat Tradisional kepada pelaku usaha dan masyarakat melalui media sosial.
- Lebih meningkatkan kemandirian pelaku usaha Obat Tradisional untuk menjamin mutu dan keamanan produk Obat Tradisional sehingga mampu bersaing di pasar lokal maupun global dengan pembinaan CPOTB dan penyebaran informasi terkait Obat Tradisional.
- Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha untuk tidak menjual produk Obat Tradisional yang tidak memenuhi syarat, tidak memiliki ijin edar, mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan merupakan *public warning*.
- Meningkatkan KIE untuk tidak mengkonsumsi Obat Tradisional yang tidak memenuhi syarat, mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan tidak memiliki ijin edar sehingga diharapkan capaian indikator Obat Tradisional yang memenuhi syarat bisa tercapai sesuai dengan target.
- Provinsi Bali merupakan daerah potensial untuk pengembangan Obat Asli Indonesia, terutama dengan tersedianya ribuan "lontar usadha" yang merupakan warisan leluhur yang telah dimanfaatkan secara turun temurun, untuk itu kepada produsen Obat Tradisional pemberian informasi dan edukasi perlu terus ditingkatkan agar mengedepankan tanggung jawab moral yaitu melakukan kegiatan produksi dengan mengikuti Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan tanggung jawab hukum yaitu dengan melengkapi perijinan yang diperlukan dalam berproduksi

sehingga mempunyai daya saing dalam menyambut MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN).

A.1.3. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat

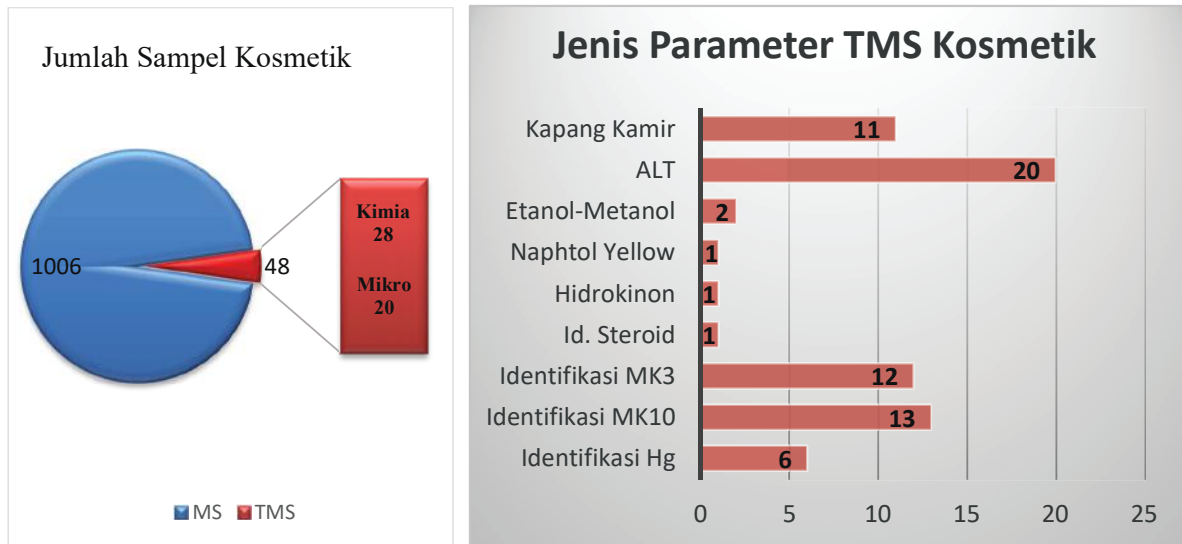


Diagram 3.6 Persentase Kosmetik yang Tidak Memenuhi Syarat

Keterangan : terdapat sampel dengan lebih dari 1 parameter TMS.

Hasil Pengukuran terhadap indikator Kinerja persentase kosmetik yang memenuhi syarat terlihat bahwa capaian indikator kinerja yaitu sebesar 104,89% dengan kriteria **memuaskan**. Realisasi kinerja Indikator tersebut berdasarkan dengan hasil pengujian sampling kosmetik dengan ijin Edar Badan POM yang dilakukan diseluruh Provinsi Bali dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 1006 sampel (95,45%) dari 1054 sampel. Jumlah sampel kosmetik yang tidak memenuhi syarat kimia sebanyak 28 sampel dengan parameter uji identifikasi Hg, MK3, MK10, Steroid, Hidrokinon, Naphtol Yellow dan Penetapan kadar Etanol-Metanol. Sedangkan tidak memenuhi syarat mikrobiologi sebanyak 20 sampel dengan parameter uji ALT dan Kapang - Khamir. Pengawasan ke sarana produksi dan distribusi Kosmetik yang telah dilakukan, dari 29 sarana produksi dan 780 sarana distribusi yang ada, tahun 2017 diawasi sebanyak 28 (96,55%) sarana produksi dan 119 (15,26%) sarana distribusi.

Persentase hasil pengujian kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2017 sebesar 94,45% sedangkan pada tahun 2016 sebesar 97,90% terlihat penurunan persentase

kosmetik yang memenuhi syarat. Hal ini disebabkan karena variasi sampel yang diuji berbeda dari tahun sebelumnya dan ada perubahan parameter kritis pada pedoman sampling. Sampling tahun 2017 dilakukan mengikuti isu strategis yang ada di masyarakat dimana *trend* pemakaian pemutih di wilayah provinsi Bali meningkat, sehingga untuk pengambilan sampel difokuskan sampel yang dicurigai mengandung bahan pemutih yang dilarang dengan tetap berpedoman pada prioritas sampling. Untuk meningkatkan persentase kosmetik yang memenuhi syarat dapat dilakukan dengan cara meningkatkan sosialisasi ke masyarakat tentang kosmetik-kosmetik yang tercantum dalam *list public warning* dan bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan kosmetik dengan kandungan bahan berbahaya dan dilarang. Selain itu, bidang penyidikan juga telah melakukan penindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar di bidang kosmetik dimana tahun 2017 sebanyak 4 (empat) pelaku usaha dilanjutkan kasusnya hingga ke pro justitia.

Pengawasan iklan terhadap produk kosmetik yang telah dilakukan pada tahun 2017 sebanyak 900 iklan dengan hasil 257 iklan TMS, ditindaklanjuti Peringatan oleh Badan POM sebanyak 95 produk, penelusuran sebanyak 9 produk dan Audit DIP sebanyak 3 produk.

Perbandingan capaian dengan target akhir RPJM tahun 2019 menunjukkan bahwa realisasi tahun 2017 sudah melampaui target tahun 2019. Namun, dengan adanya perbedaan prioritas sampling setiap tahun, dan perbedaan tren konsumsi masyarakat setiap tahun maka kemungkinan akan ada fluktuasi capaian di setiap tahun hingga tahun 2019.

Dibandingkan dengan BBPOM di Yogyakarta, dimana kondisi dan wilayahnya hampir sama dengan BBPOM di Denpasar dapat dilihat persentase Kosmetik memenuhi syarat yang beredar di Provinsi Bali lebih kecil daripada di Daerah Istimewa Yogyakarta, Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat dari BBPOM di Yogyakarta 98,95%.

Capaian indikator kinerja kegiatan dievaluasi setiap tiga bulan untuk memonitor capaian dari target pada perjanjian kinerja.

Dengan realisasi kinerja persentase kosmetik yang memenuhi syarat sebanyak 95,45% menunjukkan bahwa kosmetik yang beredar di Provinsi Bali cukup aman dan pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Provinsi Bali terhadap peredaran kosmetik efektif sehingga dapat melindungi masyarakat dari peredaran kosmetik yang membahayakan kesehatan. Hal ini berarti bahwa sasaran strategi Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan di bidang kosmetika telah dapat tercapai sehingga bisa meningkatkan kesehatan masyarakat. Kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja tersebut adalah pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi kosmetika, KIE terhadap masyarakat berupa penyebaran informasi tentang kosmetik yang tidak memenuhi syarat dan

mengandung bahan berbahaya serta sosialisasi produk kosmetik yang merupakan *public warning*.

Dengan masih ditemukannya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tidak mempunyai ijin edar maka fokus kegiatan yang dilakukan oleh BBPOM di Denpasar pada tahun 2017 adalah :

- Meningkatkan bimbingan/penyuluhan CPKB kepada produsen kosmetik terutama UMKM Kosmetik, untuk bisa mandiri dalam menjamin mutu dan keamanan produknya sehingga mampu bersaing di pasar lokal maupun global dan meningkatkan pembinaan kepada sarana distribusi kosmetik untuk tidak menjual produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat ataupun tidak memiliki ijin edar,
- Melakukan KIE kepada masyarakat untuk tidak menggunakan kosmetik seperti tersebut diatas. KIE dilakukan melalui penyebaran informasi kepada masyarakat serta meningkatkan koordinasi dengan *stake holder* sehingga sistem pengawasan obat dan makanan di bidang kosmetik berbasis risiko lebih ditingkatkan.
- Penyebaran Informasi kepada sarana distribusi kosmetik dan Pengusaha Kosmetik untuk tidak mengedarkan produk kosmetik Tanpa Ijin Edar dan mengetahui *public warning*.
- Advokasi dan koordinasi kepada *stake holder* terkait peningkatan pengawasan Kosmetik sesuai dengan Inpres No. 3 tahun 2017 dengan MOU dan membentuk tim terpadu.
- Melakukan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi yang diberikan BBPOM di Denpasar kepada *stake holder*.

A.1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat

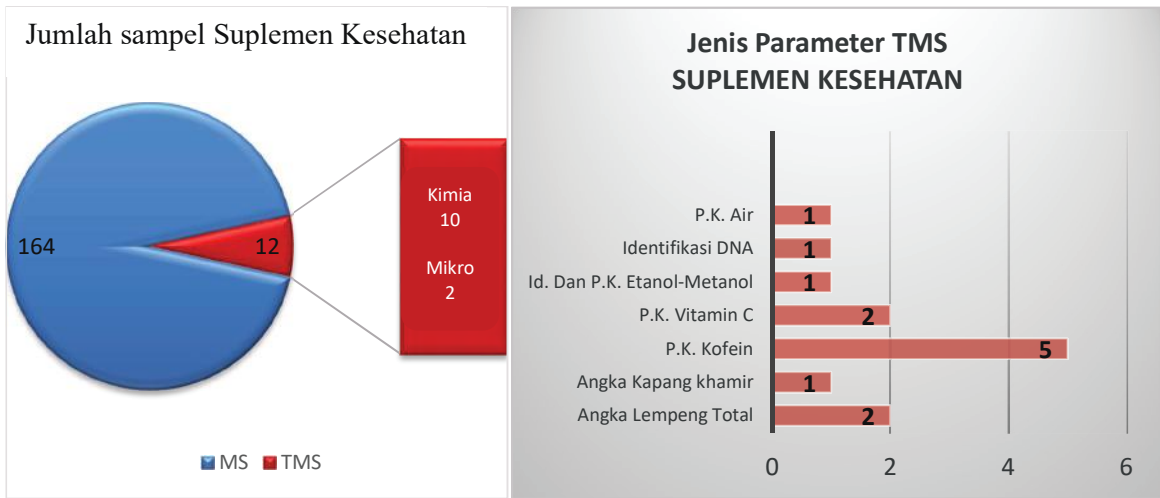


Diagram 3.7 Persentase Suplemen Kesehatan yang Tidak Memenuhi Syarat

Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat terlihat bahwa capaian indikator kinerja yaitu sebesar 115,04% dengan kriteria **memuaskan**. Realisasi kinerja indikator tersebut berdasarkan dengan hasil pengujian sampel yang disampling diseluruh Provinsi Bali dari 176 sampel, sebanyak 164 sampel memenuhi syarat (93,18%) dan 10 sampel tidak memenuhi syarat kimia pada parameter uji penetapan kadar kofein, vitamin C, kadar air, identifikasi dan penetapan kadar etanol dan identifikasi DNA Babi, 2 sampel tidak memenuhi syarat mikrobiologi yaitu Angka Lempeng Total dan Angka Kapang khamir.

Persentase hasil pengujian suplemen kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2016 (99,43%). Jika dibandingkan dengan tahun 2017 terlihat suplemen kesehatan yang memenuhi syarat mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan variasi jenis sampel yang disampling. Perbandingan capaian dengan target RPJM tahun 2019 menunjukkan bahwa realisasi tahun 2017 sudah melampaui target tahun 2019. Namun dengan adanya perbedaan prioritas sampling dan peningkatan kemampuan uji setiap tahun, dan perbedaan *trend* konsumsi masyarakat setiap tahun maka kemungkinan akan ada fluktuasi capaian di setiap tahun hingga tahun 2019.

Pengawasan iklan terhadap produk suplemen kesehatan sebanyak 90 iklan dengan hasil TMS sebanyak 55 (61,11%). Hasil pengawasan yang telah diberi peringatan yaitu 2 produk.

Capaian indikator kinerja kegiatan dievaluasi setiap tiga bulan untuk memonitor capaian dari target pada perjanjian kinerja.

Dibandingkan dengan BBPOM di Yogyakarta, dimana kondisi dan wilayahnya hampir sama dengan BBPOM di Denpasar dapat dilihat persentase Suplemen Kesehatan memenuhi syarat yang beredar di Provinsi Bali Lebih kecil dibandingkan dengan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Realisasi persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat dari BBPOM di Yogyakarta 98,42%.

Dengan realisasi persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat sebanyak 93,18% menunjukkan bahwa suplemen kesehatan yang beredar di Provinsi Bali aman, sistem pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Provinsi Bali terhadap peredaran suplemen kesehatan efektif melindungi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan capaian kinerja tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategi Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan telah tercapai. Kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja tersebut adalah pengawasan terhadap sarana distribusi suplemen kesehatan, KIE terhadap masyarakat berupa penyebaran informasi tentang suplemen kesehatan yang tidak memenuhi syarat dan mengandung bahan berbahaya serta sosialisasi produk suplemen kesehatan yang merupakan *public warning* dan tidak memiliki ijin edar untuk membuat masyarakat cerdas memilih dan mengkonsumsi suplemen kesehatan. Hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan KIE kepada masyarakat, meningkatkan kompetensi petugas dalam hal pengawasan/pengujian.

A.1.5. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

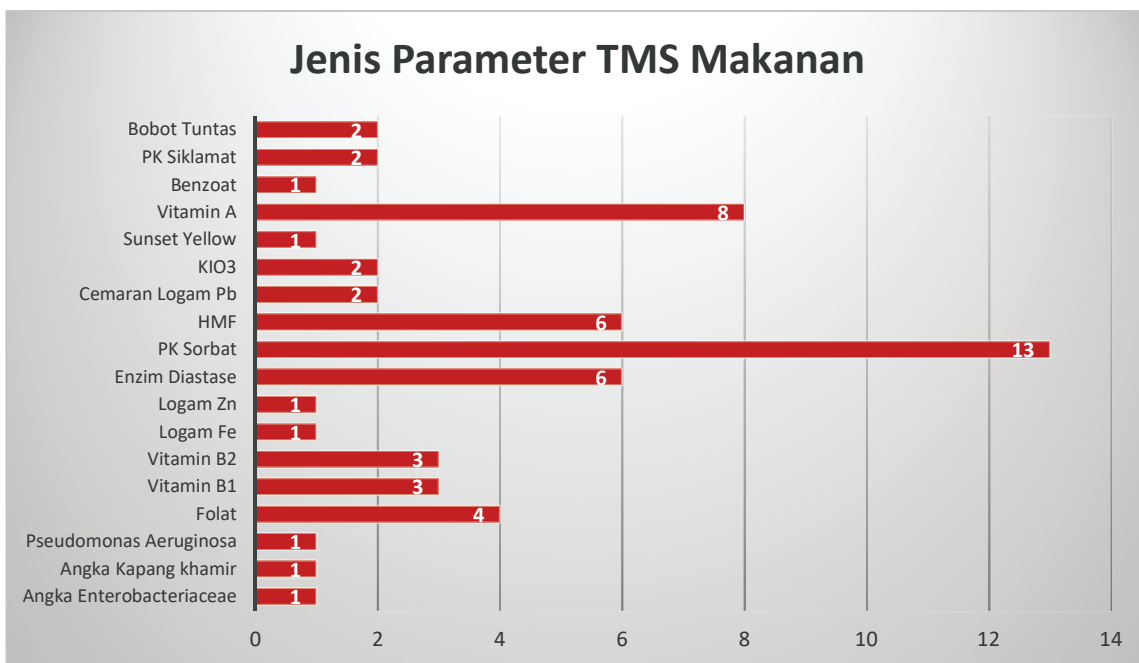
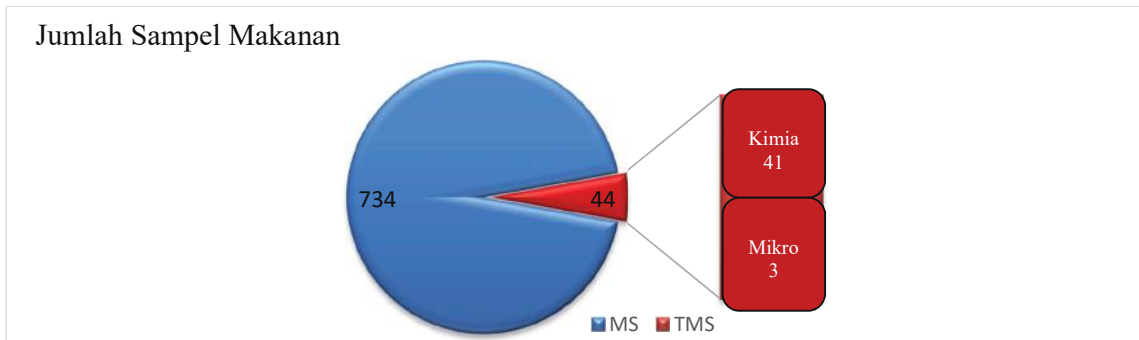


Diagram 3.8 Persentase Makanan yang Tidak Memenuhi Syarat

Keterangan : terdapat 1 Sampel Kimia dengan 2 Parameter TMS.

BBPOM di Denpasar telah melakukan pengujian sampel pangan secara keseluruhan 2766 sampel dengan jumlah sampel DIPA sebanyak 1043 sampel (termasuk kemasan pangan), 1450 sampel laboratorium Keliling dan sebanyak 273 sampel merupakan sampel Non DIPA termasuk didalamnya sampel uji profisiensi, ULPK-Kasus, pihak ketiga (PNBP) maupun uji Kolaborasi. Dari 1.043 sampel DIPA, 780 sampel dengan ijin edar Badan POM

dan 263 sampel dengan ijin edar PIRT maupun pangan dengan masa daluwarsa kurang dari 7 hari.

Perhitungan realisasi indikator presentase makanan yang memenuhi syarat berdasarkan produk pangan dengan ijin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM (MD/ML). Pengukuran realisasi terhadap target yang telah ditetapkan terhadap indikator persentase Makanan yang memenuhi syarat terlihat bahwa realisasi telah mencapai target yang ditetapkan, dan capaian indikator kinerjanya yaitu sebesar 105,90% dengan kriteria **memuaskan**. Realisasi kinerja indikator tersebut berdasarkan dengan hasil pengujian sampling Makanan (pangan) yang dilakukan diseluruh Provinsi Bali dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 736 sampel (94,36%) dari 780 sampel (sampel dengan nomor ijin edar MD maupun ML).

Persentase hasil pengujian Makanan yang memenuhi syarat tahun 2017 sebesar 94,36%, meningkat dari hasil pengujian makanan memenuhi syarat tahun 2016 (92,69%). Perbandingan capaian dengan target akhir RPJM tahun 2019 menunjukkan bahwa realisasi tahun 2017 sudah melampaui target tahun 2019. Namun dengan adanya perbedaan produk yang disampling setiap tahun, serta perbedaan tren konsumsi masyarakat setiap tahun maka kemungkinan akan ada fluktuasi capaian di setiap tahun hingga tahun 2019. Untuk selanjutnya akan dilakukan review target atau perubahan metoda sampling.

Capaian indikator kinerja kegiatan dievaluasi setiap tiga bulan untuk memonitor capaian dari target pada perjanjian kinerja.

Dibandingkan dengan BBPOM di Yogyakarta, dimana kondisi dan wilayahnya hampir sama dengan BBPOM di Denpasar dapat dilihat persentase Makanan memenuhi syarat yang beredar di Provinsi Bali lebih besar dibandingkan dengan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat dari BBPOM di Yogyakarta 91,96%.

Jenis sampel yang disampling selain produk dengan nomor ijin edar MD/ML yang dikeluarkan BPOM ada juga sampel dengan nomor ijin edar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan sampel siap saji serta sampel yang kadaluwarsa dibawah 1 (satu) minggu sehingga tidak perlu ijin edar dengan hasil uji memenuhi syarat sebanyak 180 sampel (86,54%) dari 208 sampel. Total sampel pangan yang disampling dan diuji sebanyak 1043 sampel dengan jumlah yang memenuhi syarat sebanyak 955 sampel (91,56%). Dari data tersebut terlihat bahwa persentase makanan yang memenuhi syarat produk dengan ijin edar PIRT lebih rendah dibandingkan pada produk dengan ijin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM (MD/ML).

Selain di laboratorium pengujian sampel dilakukan juga melalui mobil laboratorium keliling, terutama untuk produk jajanan anak sekolah dan jajanan pasar yang ada dipasar

tradisional, di tempat keramaian seperti pantai, lapangan olah raga, ataupun penjual pangan pada saat bulan puasa, dengan hasil uji sampel yang memenuhi syarat sebanyak 1263 sampel (87,10%) dari 1450 sampel. Dari data tersebut terlihat bahwa sampel dengan nomor ijin edar yang dikeluarkan BPOM persentase memenuhi syaratnya lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan pangan yang dilakukan Badan POM sudah baik. Produk PIRT dan tidak terdaftar sesuai dengan PP No. 28 Tahun 2004 merupakan kewenangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dimana BBPOM di Denpasar hanya memiliki kewenangan dalam hal pengawasan dan menyampaikan hasil pengawasan pangan khususnya yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk ditindaklanjuti.

Dengan realisasi kinerja persentase Makanan yang memenuhi syarat sebanyak 94,36% menunjukkan bahwa pangan yang beredar di Provinsi Bali cukup aman dan sistem pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Denpasar terhadap peredaran pangan efektif sehingga dapat melindungi masyarakat dari peredaran pangan yang membahayakan kesehatan serta dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Hal ini berarti bahwa sasaran strategi Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan telah dapat tercapai. Kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja tersebut adalah pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi pangan, KIE terhadap masyarakat berupa penyebaran informasi tentang pangan yang tidak memenuhi syarat dan mengandung bahan berbahaya serta sosialisasi produk pangan yang merupakan *public warning* dan tidak memiliki ijin edar, termasuk melalui program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) dengan membentuk kader dan fasilitator keamanan pangan serta gerakan masyarakat hidup sehat sadar pangan aman (GERMAS SAPA) untuk membuat masyarakat cerdas memilih dan mengonsumsi pangan yang sehat sehingga kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan. KIE juga dilakukan kepada pelaku usaha agar mampu mandiri dalam hal memberikan jaminan keamanan dan mutu produknya serta meningkat daya saing. Dengan capaian kinerja tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran peningkatan sistem pengawasan obat dan makanan dinilai sudah efektif melindungi masyarakat di Provinsi Bali sehingga kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan.

Pada tahun 2017 terdapat 5 pelanggaran di bidang pangan dengan tindak lanjut non justitia. Pengawasan iklan terhadap produk pangan juga dilakukan sebanyak 96 iklan dan 41 hasil pengawsan TMS yang ditindaklanjuti dengan koordinasi ke Dinkes setempat untuk pembinaan terhadap produk PIRT.

Fokus kegiatan yang akan dilakukan oleh BBPOM di Denpasar pada tahun 2018 adalah :

1. Meningkatkan pengawasan, bimbingan/penyuluhan kepada pelaku usaha Pangan, penanggung jawab kantin sekolah, penanggung jawab pasar agar mampu mandiri dalam hal memberikan jaminan keamanan dan mutu produknya serta meningkatkan daya saing.
2. KIE kepada masyarakat agar cerdas dalam memilih makanan (pangan). Kegiatan KIE dilakukan dengan penyebaran informasi melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, talkshow, media cetak dan elektronik.
3. Lebih memasyarakatkan cek KLIK dengan program Germas SAPA
4. Meningkatkan koordinasi dengan *stake holder* terkait penyampaian hasil uji sampel dan hasil pengawasan sarana yang memerlukan tindak lanjut.
5. Mendistribusikan *Public Warning* ke *stake holder* terkait, pasar-pasar dan kader-kader yang ada di desa dan fasilitator sekolah yang telah dibentuk untuk disebarakan ke masyarakat.
6. Untuk mengefektifkan koordinasi dan tukar informasi terkait pengawasan sarana PIRT akan dibuatkan WA group petugas terkait pertemuan berkala untuk evaluasi permasalahan terkait produk PIRT.
7. Memadukan kegiatan yang ada di Instansi terkait dengan kegiatan BBPOM di Denpasar.
8. Membuat kader-kader keamanan pangan dari kalangan Mahasiswa dan Pramuka
9. Membuat *MOU* dengan Poltekes, Kwarda dan KPID

Dari pencapaian 5 Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1, kemudian dihitung nilai pencapaian sasaran (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator-indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$\begin{aligned}
 \text{NPS1} &= \frac{(2 \times 105,53\%) + (2 \times 90,48\%) + (2 \times 104,89\%) + (2 \times 115,04\%) + (2 \times 105,61\%)}{10} \\
 &= 104,37\%
 \end{aligned}$$

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis 1 yaitu Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan adalah (104,37 %) dengan kriteria memuaskan, dapat disimpulkan bahwa tahun 2017 Balai Besar POM di Denpasar telah berhasil memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan, sehingga Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi Bali aman, bermutu

dan bermanfaat dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya saing produk lokal Provinsi Bali

Namun demikian, Balai Besar POM di Denpasar harus terus melakukan langkah terobosan dalam rangka pengawasan obat dan makanan sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan terutama terkait Obat Tradisional yang masih belum mencapai target.

Untuk mendukung Sasaran Strategis 1, dilakukan Program/Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dengan Sasaran Kegiatan, Capaian Indikator dan Kinerja Sasaran Kegiatan tahun 2017 terhadap perbandingan capaian tahun 2016 dan akhir RPJM seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4 Capaian dan Perbandingan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Strategis 1

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2017	Target akhir RPJM	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian tahun 2017 terhadap RPJM	Kriteria 2017
1.	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3.490	17500	3.500	3500	100.00	100.29	60.00	Memuaskan
		Pemenuhan target sampling produk obat disektor publik (IFK)	100	100	82.86	100	82.86	100.00	100.00	Baik
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	25	25	25	24.41	100.00	99.44	99.44	Cukup
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	25	25	24.48	25.74	102.00	102.96	102.96	Memuaskan
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	11	49	10	9	100.00	81.82	57.14	Cukup

Perbandingan **capaian** indikator Sasaran Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 1 tahun 2017 dengan tahun 2016 dan target jangka menengah (RPJM) dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

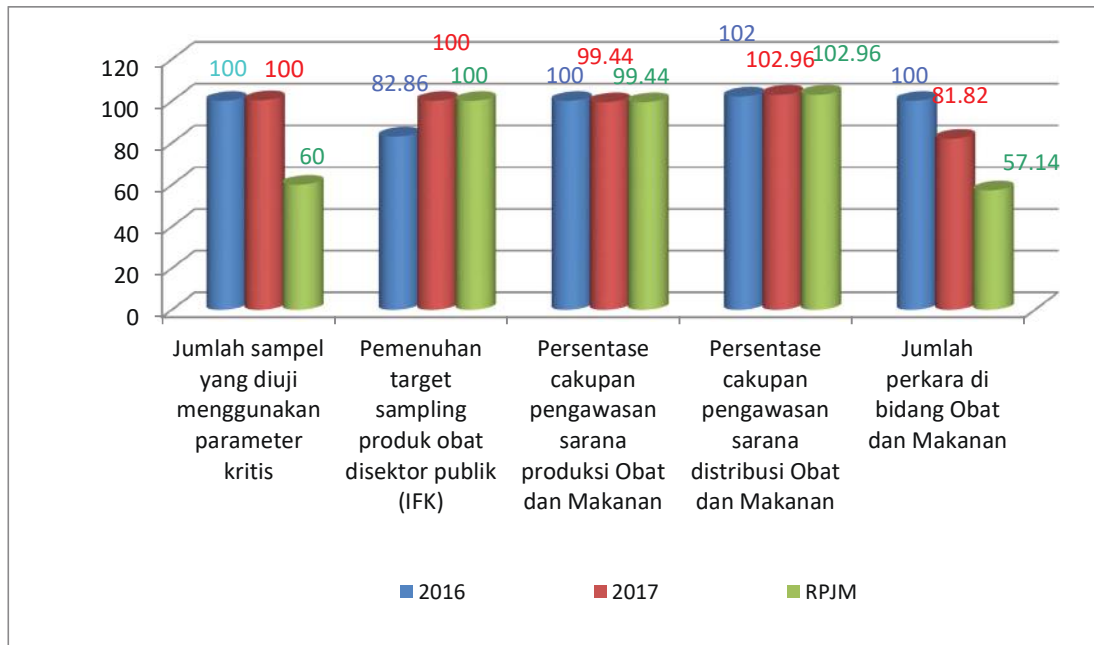


Diagram 3.9 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Kegiatan

Masing-masing Indikator Sasaran Kegiatan dan Analisa Capaian Akuntabilitas dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar

Untuk sasaran pertama ini, terdapat 2 indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat capaiannya yaitu:

- Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis dengan target 3.490 sampel.
- Pemenuhan target sampling produk obat disektor publik (IFK) dengan target 100,00%.

Hasil pencapaian realisasi indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

A.1.6. Indikator jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis

Sampel yang disampling di sarana, dilakukan pemeriksaan secara laboratorium menggunakan metoda yang termutahir sesuai dengan parameter kritis pada pedoman prioritas sampling. Pedoman prioritas sampling merupakan pedoman bagi Balai untuk melakukan sampling termasuk jenis sampel yang disampling dan parameter kritis yang harus diuji. Parameter kritis adalah parameter uji yang bersifat sebagai penentu terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji. Target jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis pada Perjanjian Kinerja tahun 2017 adalah 3.490.

Realisasi terhadap indikator jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis adalah 3500 sampel dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,29% dengan kriteria **memuaskan**. Jumlah sampel yang disampling dan diuji pada tahun 2017 sama dengan tahun 2016, perbedaannya pada cara pengambilan sampel obat menggunakan sistem random/acak dan penambahan parameter uji kritis pada sampel obat dan kemasan pangan. Sampai dengan akhir RPJM jumlah sampel yang disampling tiap tahun sama sebanyak 3.500 dengan parameter uji kritis sesuai prioritas sampling yang ditetapkan tiap tahun. Target jumlah sampel sampai akhir RPJM adalah 17.500, capaian tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJM adalah 60.0%. Kemampuan uji parameter kritis didukung oleh verifikasi metode, kompetensi SDM dan peralatan yang dimiliki. Tercapainya indikator tersebut berarti bahwa sasaran meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar tercapai sehingga jaminan keamanan produk Obat dan Makanan meningkat dan masyarakat di wilayah Provinsi Bali terlindungi dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Untuk lebih mewakili produk yang beredar, variasi sampel yang disampling lebih diperluas dengan mempertimbangkan Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat dan untuk meningkatkan kemampuan terhadap uji parameter kritis dilakukan pelatihan dan magang serta menambah jumlah alat laboratorium dan mengalokasikan anggaran untuk pembelian baku pembanding sehingga jaminan produk Obat dan Makanan aman dapat ditingkatkan.

Dibandingkan dengan BBPOM Yogyakarta yang melakukan pengujian sampel dengan parameter kritis sebesar 3.807 sampel dengan capaian 100,18%, BBPOM Denpasar memiliki capaian yang hampir sama yaitu 100,29%.

A.1.7. Pemenuhan target sampling produk obat disektor publik

Sampling produk obat di sektor publik dilakukan di IFK dan sarana pelayanan kefarmasian. Sesuai dengan metode acak random diperoleh 3 IFK Kabupaten/kota dan 1 IFK Provinsi yang merupakan sarana wajib untuk disampling dan sarana pelayanan kefarmasian (Rumah Sakit, Apotek, Puskesmas, Toko Obat).

Realisasi terhadap indikator pemenuhan target sampling produk obat disektor publik adalah 364 sampel dengan capaian sebesar 100,00% dan kriteria **baik**.



Gambar 3.3. Pengawasan Obat di Sektor Publik

Jumlah sampel yang disampling pada tahun 2017 berbeda dari tahun sebelumnya, hal ini mengacu kepada pedoman prioritas sampling yang menyebutkan bahwa sampling produk terapeutic berdasarkan metode acak/random.

Dari 364 sampel yang diuji terdapat 6 (1,65%) sampel tidak memenuhi syarat. Hasil pengujian sampel yang Tidak Memenuhi Syarat disampaikan ke Badan POM dan selanjutnya Badan POM akan menyampaikan ke IFK/sarana publik tempat dilakukan pengambilan sampel tersebut.

Realisasi capaian target sampling produk obat disektor publik tahun 2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2016 dengan capaian 100%.

Sampling obat publik dilakukan terhadap semua kategori sesuai dengan pedoman sampling. Waktu sampling juga menyebar sepanjang tahun dan sebelum dilakukan sampling telah disusun perencanaan internal balai.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian adalah lebih memperbanyak variasi jenis sampel yang disampling di sarana IFK dan sarana pelayanan kefarmasian lainnya.

Untuk meningkatkan kualitas hasil uji juga dilakukan:

1. Peningkatan kompetensi personel penguji melalui pelatihan internal (PPOMN dan Balai lain) dan eksternal (USP, BNN, AN Training, RC Chem, LIPI).
2. Peningkatan kompetensi manajerial melalui pelatihan Sistem Mutu ISO 17025 : 2017, pelatihan Auditor, pelatihan *Leadership* dan studi tiru ke Balai POM lainnya.
3. Penambahan jumlah dan jenis alat yang lebih mutakhir untuk digunakan di laboratorium.
4. Mendatangkan tenaga ahli di bidang pengujian dan manajemen dari USP, Universitas Udayana dan PPOMN.

Dari 364 sampel yang diuji terdapat 6 (1,65%) sampel tidak memenuhi syarat. Hasil pengujian sampel yang Tidak Memenuhi Syarat disampaikan ke Badan POM dan selanjutnya Badan POM akan menyampaikan ke IFK/sarana publik tempat dilakukan pengambilan sampel tersebut.

Dibandingkan dengan BBPOM di Yogyakarta, dimana kondisi dan wilayahnya hampir sama dengan BBPOM di Denpasar dapat dilihat Pemenuhan target sampling Produk Obat di sektor publik (Instalasi Farmasi Kabupaten) BBPOM di Denpasar lebih kecil dari di BBPOM Yogyakarta, Pemenuhan target sampling Produk Obat di sektor publik di BBPOM Yogyakarta 111,43%.

2. Meningkatnya Kualitas Sarana Produksi yang Memenuhi Standar

Untuk sasaran kegiatan kedua ini, terdapat 1 indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat capaiannya yaitu :

A.1.8. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan

Pengukuran realisasi dan capaian indikator persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan yaitu jumlah sarana yang diperiksa dibandingkan dengan jumlah sarana yang ada di provinsi Bali, realisasi Indikator Kinerja 24,86% dengan capaian sebesar 99,44% kriteria **Cukup**.



Gambar 3.4. Pengawasan Sarana Produksi Pangan

Pemeriksaan sarana produksi meliputi pemeriksaan sarana produksi Kosmetik, Obat Tradisional, dan Pangan. Pada tahun 2017 telah diperiksa sebanyak 218 sarana dari 877 jumlah sarana yang ada di Provinsi Bali, hasil pemeriksaan menunjukkan 43 sarana Memenuhi Ketentuan dan 175 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Jika dibandingkan terhadap target RPJM tahun 2019 persentase capaian 99,44%. Jika dibandingkan tahun 2016, realisasi cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan terlihat menurun, realisasi tahun 2016 adalah 25,00%. Hal ini disebabkan database sarana tahun 2016 berbeda karena ada beberapa sarana baru, terutama sarana PIRT sedangkan jumlah sarana yang diawasi meningkat dibandingkan tahun 2016. Tingginya TMK sarana yang diperiksa disebabkan karena form pemeriksaannya tidak mengelompokkan kekurangan Minor sehingga kekurangan minor tetap disimpulkan TMK, Form Pemeriksaan sedang dalam proses perbaikan di Badan POM

Surat Rekomendasi Tindak lanjut yang telah dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota hanya 10,78% yang ditindaklanjuti. Dilihat dari jumlah angka ini relatif kecil sehingga perlu ditingkatkan koordinasi dan advokasi kepada *stake holder* sehingga misi melindungi kesehatan masyarakat dari peredaran produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan dapat terus ditingkatkan, sesuai dengan Inpres No.3 tahun 2017. Strategi meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan secara internal adalah pembinaan terkait Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB), Cara Produksi

Kosmetika yang Baik (CPKB) dan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), maupun pengawasan ataupun penindakan sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan.

Dalam menyusun perencanaan pengawasan dilakukan penetapan prioritas terhadap sarana-sarana yang harus diperiksa berdasarkan kajian resiko dan jumlah sarana di masing-masing kabupaten. Sarana produksi Obat dan Makanan tersebar di kabupaten/kota, jumlah terbesar ada di Kota Denpasar.

Pemeriksaan diarahkan kepada sarana yang terdapat temuan pada pemeriksaan tahun sebelumnya dan sarana yang belum pernah dilakukan pemeriksaan serta sarana baru. Dengan cara ini diharapkan pengawasan dapat merata dan misi mendorong kemandirian pelaku usaha dalam menjamin keamanan produk yang dihasilkan dapat tercapai, sehingga Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi Bali dapat meningkatkan kesehatan masyarakat.

Kualitas SDM terkait pengawasan sarana produksi obat dan makanan didukung dengan kompetensi personil yang telah mengikuti pelatihan berjenjang diantaranya pelatihan Food Inspektur, Pelatihan Inspektur Kosmetika dan Obat Tradisional.

Untuk mengantisipasi kendala – kendala dilakukan upaya untuk mencapai target cakupan pengawasan dan kualitas sarana produksi pada tahun berikutnya antara lain :

- Pemutakhiran data sarana produksi tahun 2018
- Koordinasi antara Bidang Pemdik dan Bidang Serlik untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pada sarana yang TMK.
- Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dengan menyampaikan hasil TMK pengawasan, memonitor Tindak Lanjut dan memberikan *feedback* hasil monitoring.
- Untuk produsen yang hasil pengujian sampelnya tidak memenuhi syarat akan dilakukan pengawasan dan pembinaan yang lebih intensif.
- Penyebaran Informasi dan Pembinaan terkait cara produksi pangan yang baik (CPPB), cara produksi kosmetika yang baik (CPKB) dan cara produksi Obat Tradisional yang baik (CPOTB).

Dibandingkan dengan BBPOM di Yogyakarta, dimana kondisi dan wilayahnya hampir sama dengan BBPOM di Denpasar dapat dilihat Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan BBPOM di Denpasar lebih kecil dari di BBPOM Yogyakarta pemenuhan persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan Yogyakarta adalah sebesar 101,77%.

3. Meningkatnya Kualitas Sarana Distribusi yang Memenuhi Standar

Untuk sasaran Kegiatan/program ketiga ini, terdapat 1 indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat capaiannya yaitu :

A.1.9. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan

Sarana distribusi Obat dan Makanan tersebar di kabupaten/kota, jumlah terbesar ada di Kota Denpasar. Perencanaan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan berdasarkan kajian resiko dan jumlah sarana di masing-masing kabupaten.



Gambar 3.5 Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik

Kualitas SDM terkait pengawasan sarana distribusi obat dan makanan didukung dengan kompetensi staf yang telah mengikuti pelatihan berjenjang diantaranya pelatihan Inspektur Cara Distribusi Obat yang Baik, pelatihan inspektur kosmetika, pelatihan inspektur obat tradisional dan pelatihan inspektur pangan.

Pengukuran realisasi target dan indikator yang telah ditetapkan terhadap persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan yaitu terlihat bahwa capaian indikator kinerja sebesar 102,96% dengan kriteria **memuaskan**. Pemeriksaan sarana distribusi meliputi pemeriksaan sarana distribusi produk terapeutik, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan dan sarana distribusi/pelayanan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan berbahaya serta sarana distribusi pangan. Tahun 2017 telah diperiksa sebanyak 876 (25,74%) sarana dari 3403 jumlah sarana yang ada di Provinsi Bali. Hasil Pemeriksaan menunjukkan 298 sarana Memenuhi Ketentuan (34,02%) dan 578 (65,98%) sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Jika dibandingkan tahun 2016 cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan meningkat, realisasi tahun 2016 adalah 24,48%, terlihat adanya peningkatan cakupan pengawasan. Persentase capaian cakupan pengawasan terhadap target 2019 adalah 102,96%.

Dari 199 Surat Rekomendasi yang telah dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota hanya 66 (33,17%) yang ditindaklanjuti. Realisasi indikator tersebut dibandingkan dengan RPJM tahun 2019 sudah melebihi 100%. Dilihat dari jumlah angka ini relatif kecil namun misi melindungi kesehatan masyarakat dari peredaran produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan harus terus ditingkatkan dengan strategi meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan baik melalui pembinaan, pengawasan ataupun penindakan sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan. Untuk itu telah dilakukan penetapan prioritas terhadap sarana-sarana yang harus diperiksa. Pemeriksaan diarahkan kepada sarana yang terdapat temuan pada pemeriksaan tahun sebelumnya dan sarana yang belum pernah dilakukan pemeriksaan serta sarana baru. Dengan cara ini diharapkan pengawasan dapat merata dan target pengawasan jangka panjang serta misi pembinaan dan pengawasan dapat tercapai sehingga Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi Bali dapat terjaga keamanannya dan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Hal ini berarti bahwa sasaran kegiatan meningkatkan kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar telah dapat tercapai. Dengan tercapainya persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan sebanyak 102,96 % menunjukkan bahwa sasaran program menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Bali sudah efektif melindungi masyarakat.

Upaya yang akan dilakukan adalah meningkatkan pembinaan terhadap sarana distribusi melalui sosialisasi Cara distribusi Obat dan Makanan yang baik dan sosialisasi peraturan terbaru tentang Obat dan makanan. Sosialisasi ataupun penyebaran *public warning* sehingga tidak mendistribusikan produk yang termasuk *public warning*.

Dibandingkan dengan BBPOM di Yogyakarta, dimana kondisi dan wilayahnya hampir sama dengan BBPOM di Denpasar, capaian indikator persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan di BBPOM di Denpasar lebih besar dari BBPOM di Yogyakarta, capaian indikator persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan BBPOM di Yogyakarta sebesar 102,08 %.

4. Meningkatnya Hasil Tindak Lanjut Penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan

Untuk sasaran kegiatan keempat ini, terdapat 1 indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat capaiannya yaitu :

A.1.10 Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan adalah melakukan investigasi awal/penyelidikan terhadap sarana yang dicurigai, melakukan pelanggaran berdasarkan laporan masyarakat/pengaduan, hasil pengawasan seksi pemeriksaan dan informasi dari sumber lain. Pelaksanaan investigasi awal ke 8 (delapan) kabupaten dan wilayah kota Denpasar. Kuantitas dari pelaksanaan investigasi awal tergantung pada informasi dari sasaran yang diduga melakukan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

Selanjutnya, setelah dilakukan Investigasi Awal dan mendapatkan informasi yang sudah akurat (A1) maka dilakukan tindakan :

- Operasi Pangea (operasi *cyber crime*)
- Operasi Opson (operasi terhadap produk pangan)
- Operasi di perbatasan/Operasi Khusus (wilayah perbatasan Bali)
- Operasi Gabungan Nasional
- Penindakan/Penyidikan

Setelah operasi lapangan, selanjutnya dilakukan gelar kasus untuk menentukan hasil operasi lapangan yang telah dilaksanakan memenuhi syarat secara formil dan materil maju ke proses Pro-Justitia.

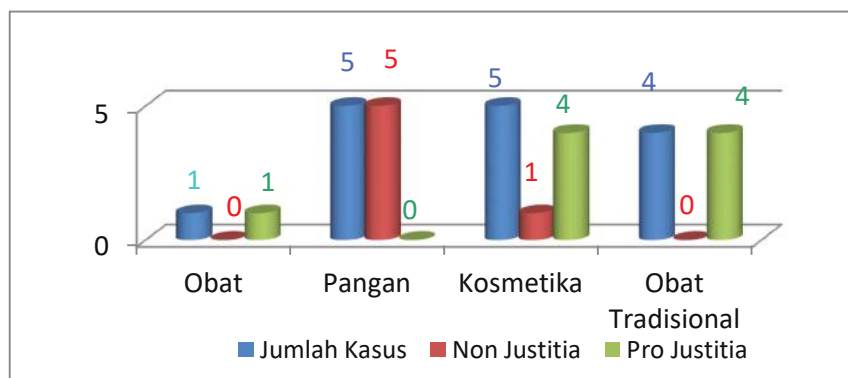


Diagram 3.10 Jumlah kasus dan tindak lanjutnya

Pada tahun 2017 ditemukan 15 kasus dengan nilai barang bukti yang diamankan sebesar Rp 653.858.300,- dengan rincian Pro-Justitia sebesar Rp. 185.859.700,- dan Non-Justitia sebesar Rp. 467.998.600,-. Dari 15 kasus yang ditemukan, hanya 9 kasus yang diperkarakan (Pro-Justitia), hal ini disebabkan karena :

1. Sarana belum pernah dibina/temuan pertama.
2. Hasil gelar kasus (sesuai pedoman pola tindak lanjut).
3. Belum memenuhi syarat formil dan materil.

Barang bukti dari 6 kasus yang tidak diproses secara pro-justitia dilakukan pemusnahan.

Target perkara tahun 2017 sebanyak 11 perkara dengan realisasi 9 perkara (81,82%) yang sudah SPDP. Dari 9 perkara yang diajukan, 1 perkara di bidang Obat, 4 perkara di bidang Kosmetika dan 4 perkara di bidang Obat Tradisional.



Gambar 3.6. Pemusnahan Produk TMS

Capaian pengukuran realisasi kinerja indikator jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan sebesar 81,82% dengan kriteria **Cukup**. Realisasi indikator tersebut dibandingkan dengan akhir RPJM tahun 2019 baru mencapai 57,14%. Dengan Capaian Jumlah Perkara Obat dan Makanan kriteria cukup maka Sasaran kegiatan meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan belum tercapai. Hal ini disebabkan oleh:

- Semakin sadarnya para pelaku usaha untuk menjual produk yang memenuhi syarat dan ketentuan.
- Perubahan modus operandi pelanggaran di bidang Obat dan Makanan semakin bervariasi termasuk penjualan *online* sehingga sulit mendapatkan bukti untuk proses pro-justitia.
- Sulit menemukan tersangka pelaku pelanggaran penjualan *online*.

Upaya yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang optimal :

1. Meningkatkan kompetensi petugas terkait penyidikan obat dan makanan melalui pelatihan teknis salah satunya adalah Pelatihan *Cyber Crime*.
2. Meningkatkan Koordinasi dengan *Criminal Justice System* di daerah antara lain dengan Kepolisian, Kejaksaan, Lintas sektor terkait.
3. Mengubah pola operasi misalnya dengan melakukan operasi pada malam hari.

Dibandingkan dengan BBPOM di Yogyakarta, dimana kondisi dan wilayahnya hampir sama, jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan di BBPOM Denpasar sama dengan BBPOM Yogyakarta sebanyak 9 perkara.

A.2. Pencapaian Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat

1. Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat

Untuk Sasaran strategis kedua ini, terdapat 2 indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat capaiannya yaitu:

- Tingkat kepuasan masyarakat dengan target 81,00%
- Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan dengan target 5 kabupaten/ kota.

Hasil pengukuran capaian Tahun 2017 dan perbandingan indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 2 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5 Capaian dan Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Target Akhir RPJM	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian Akhir RPJM	Kriteria 2017
1.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	81.00%	82.00%	89.48%	84.34%	111.16%	104.12%	102.85%	Memuaskan
		Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	5	7	5	6	125.00%	120.00%	85,71%	Memuaskan

Perbandingan **capaian** indikator Sasaran Strategis 2 tahun 2017 terhadap tahun 2016 dan target akhir RPJM dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

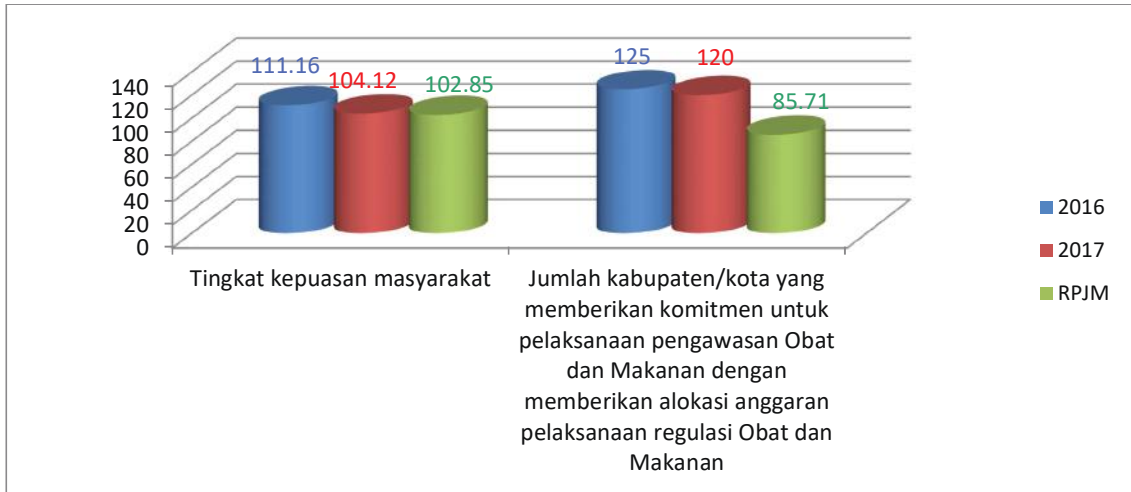


Diagram 3.11 Capaian dan Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

Dari perbandingan tabel dan diagram di atas, 1 capaian indikator sasaran strategis 2 melebihi target RPJM. Telah dilakukan review terhadap target indikator tersebut pada pertengahan tahun 2017.

A.2.1. Indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat



Gambar 3.7 Penyuluhan dan Penyebaran Informasi

Tabel 3.6 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat Baik

Tabel 3.7 Indeks Kepuasan Masyarakat BBPOM di Denpasar Tahun 2017

NO	UNSUR	NILAI UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA2 TERTIMBANG	NILAI KONVERSI IKM
1	Kemudahan prosedur pelayanan	3,386	0,242	84,65
2	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3,346	0,239	83,65
3	Kejelasan petugas yang melayani	3,433	0,245	85,825
4	Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan	3,386	0,242	84,65
5	Tanggungjawab petugas dalam memberi pelayanan	3,461	0,247	86,525
6	Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan	3,472	0,248	86,8
7	Kecepatan pelayanan	3,445	0,246	86,125
8	Keadilan untuk mendapatkan pelayanan	3,437	0,245	85,925
9	Kesopanan dan keramahan petugas	3,508	0,250	87,7
10	Kewajaran biaya untuk mendapat pelayanan	3,378	0,241	84,45
11	Kepastian biaya pelayanan	3,346	0,239	83,65
12	Kepastian pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan	3,386	0,242	84,65
13	Kenyamanan di lingkungan unit pelayanan	3,260	0,233	81,5
14	Keamanan pelayanan	3,008	0,215	75,2
Nilai Total			3,374	84,34 (A)

Realisasi Tingkat Kepuasan Masyarakat dari tahun sebelumnya masih bisa dipertahankan dengan nilai sangat baik (A), dihitung berdasarkan Keputusan MenPAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004. Hal ini disebabkan karena fasilitas yang ada di ULPK BBPOM di Denpasar sudah memenuhi standar minimal layanan publik, menerapkan sistem manajemen mutu (QMS) sebagai pedoman dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan SDM yang mempunyai kompetensi yang baik walaupun jumlahnya yang belum mencukupi. Pelatihan-pelatihan terkait pelayanan publik tetap harus dilakukan untuk peningkatan kompetensi petugas dalam memberikan layanan yang prima kepada masyarakat.

Perhitungan indeks kepuasan masyarakat dilakukan dengan cara mengolah data kuisisioner yang diberikan masyarakat/konsumen yang memanfaatkan layanan informasi konsumen dan konsultasi sertifikasi dengan metoda pengukuran indeks kepuasan pelanggan sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Jumlah data yang digunakan untuk mengukur adalah 254 kuisisioner dilakukan selama tahun 2017. Dibandingkan dengan tahun 2016 jumlah kuisisioner untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat adalah meningkat dari 244 menjadi 254 responden, dengan realisasi tahun 2017 sebesar 84,34% menurun dibandingkan tahun 2016 sebesar 89.48%. Meskipun tingkat kepuasan masyarakat menurun tetapi masih di dalam kriteria amat baik dan capaian RPJM sebesar 102,85%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilakukan BBPOM di Denpasar sudah memenuhi harapan masyarakat. Terpenuhinya target Tingkat Kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan kemandirian pelaku usaha meningkat sehingga Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi Bali lebih dijamin keamanan, mutu dan manfaatnya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya akan meningkatkan daya saing produk lokal. Pada pertengahan tahun 2017 telah dilakukan review Renstra dimana indikator tingkat kepuasan masyarakat targetnya ditingkatkan menjadi 85% pada tahun 2018 dan 86% pada tahun 2019.

Pada tahun 2017 BBPOM di Denpasar mendapat penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Baik”

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepuasan antara lain :

1. Menggunakan data yang lebih luas, lebih variatif dan melibatkan jumlah responden yang lebih banyak sehingga data tingkat kepuasan masyarakat lebih valid.
2. Meningkatkan disiplin petugas dalam memberikan kuisisioner kepada konsumen.
3. Meningkatkan kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan prima
4. Mengadakan pelatihan kemampuan komunikasi dan melayani serta pelatihan kompetensi terkait sertifikasi dan layanan informasi.
5. Membuat *employee of the month* terkait pelayanan
6. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan publik.

Untuk tingkat kepuasan masyarakat, BBPOM Denpasar memperoleh capaian yang lebih kecil dibandingkan dengan BBPOM Yogyakarta yang memiliki capaian sebesar 113.01%.

A.2.2. Indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang Memberikan Komitmen untuk Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan dengan Memberikan Alokasi Anggaran Pelaksanaan Regulasi Obat dan Makanan.

Jumlah kabupaten yang memberikan alokasi anggaran untuk pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan sebanyak 6 kab/kota yaitu : Tabanan, Badung, Gianyar, Buleleng, Karangasem dan Denpasar dengan realisasi capaiannya sebesar 120%. Capaian ini bisa diraih karena kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lintas sektor dan adanya komunikasi terkait program yang bisa dipadukan. Anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota terbatas hanya melaksanakan pengawasan bersama dan mengundang BBPOM sebagai Narasumber. Diharapkan ke depan, komitmen Pemerintah daerah lebih ditingkatkan terutama dalam hal menindaklanjuti hasil pengawasan BBPOM di Denpasar



Gambar 3.8. Gerakan Keamanan Pangan Desa

Pengukuran realisasi terhadap target yang telah ditetapkan terhadap indikator jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan terlihat bahwa realisasi telah mencapai target yang ditetapkan dan capaian indikator kinerjanya yaitu sebesar 120,00% dengan kriteria **memuaskan**. Realisasi kinerja indikator tersebut berdasarkan jumlah Kabupaten/Kota yang telah mengalokasikan anggaran untuk Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerjanya yaitu Kabupaten Klungkung, Tabanan, Gianyar, Bangli dan Buleleng.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, ada 6 Kabupaten yang konsisten mengalokasikan anggarannya untuk kegiatan pengawasan Obat dan Makanan terutama permintaan narasumber dan pengawasan bersama. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJM (7 kabupaten/kota), capaiannya menjadi sebesar 85,71%. Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki komitmen untuk pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pada pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan menunjukkan

bahwa kemitraan dengan pemangku kepentingan sudah berjalan baik, sehingga dapat berpartisipasi dan saling mendukung dalam pengawasan Obat dan Makanan terutama yang menjadi tugas dan fungsi masing – masing institusi sesuai PP 28 tahun 2004, yang berdampak Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi Bali aman, bermutu serta bermanfaat dan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan komitmen tersebut diatas diharapkan pula dapat meningkatkan kemandirian pelaku usaha terutama pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di bidang Pangan, Obat Tradisional dan Kosmetika yang merupakan usaha mayoritas di Provinsi Bali sehingga mampu menghasilkan produk Obat dan Makanan yang memenuhi standar dan mempunyai daya saing.

BBPOM Denpasar memperoleh capaian lebih besar 20% dibandingkan capaian BBPOM Yogyakarta yaitu 100% dengan realisasi 5 kabupaten/kota dari target 5.

Peningkatan komitmen dari stakeholder juga dapat dilihat dari MoU yang terlaksana pada tahun 2017 sebanyak Peningkatan komitmen dari stakeholder juga dapat dilihat dari MoU yang telah terlaksana hingga tahun 2017 sebanyak tujuh (7) MoU antara lain :

1. Perjanjian kerjasama tentang pemeriksaan Sampel Jajanan Anak Sekolah di kabupaten/kota se-Bali dengan Pemerintah Provinsi Bali sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2015 dan 2016.
2. Perjanjian kerjasama tentang penyelenggaraan Praktek Kerja Lapangan di BBPOM di Denpasar dengan Universitas Dhyana Pura pada Tahun 2016.
3. Kesepakatan bersama tentang Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Mutu dan Gizi Pangan serta Penyebaran Informasi tentang Obat, Makanan, Obat Tradisional, Kosmetika, Produk Komplemen, Narkotika, Psikotropika, Bahan Berbahaya dan Zat Adiktif lainnya dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
4. Kesepakatan bersama tentang Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Mutu dan Gizi Pangan serta Penyebaran Informasi tentang Obat, Makanan, Obat Tradisional, Kosmetika, dengan Pemerintah Kabupaten Bangli tahun 2017
5. Perjanjian kerjasama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di BBPOM Denpasar dengan Institut Ilmu Kesehatan Medika Persada Bali tahun 2017

6. Nota kesepahaman tentang Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Darah di UTD PMI Provinsi Bali dalam upaya peningkatan keamanan dan kualitas produk darah sesuai CPOB dengan PMI Provinsi Bali tahun 2017
7. Perjanjian kerjasama tentang Pembinaan Penerapan prinsip-prinsip Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) pada proses produksi darah dan komponen darah di unit transfusi darah PMI Kabupaten Badung tahun 2017.

Untuk tahun 2018 akan dilakukan advokasi yang lebih intensif kepada stakeholder terkait penerapan Inpres No. 3 tentang peningkatan pengawasan obat dan makanan dan pembuatan MoU sebagai komitmen dalam mendukung pengawasan obat dan makanan.

Peningkatan jumlah kabupaten yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan disebabkan karena adanya INPRES No. 3 tahun 2017 tentang peningkatan pengawasan Obat dan Makanan yang melibatkan *stake holder* terkait. Dengan adanya Inpres tersebut rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan yang tidak memenuhi ketentuan sudah dilakukan tindak lanjut oleh *stake holder*.

Dari pencapaian 2 indikator pada sasaran strategis ini, maka dapat dihitung nilai pencapaian sarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator-indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$\begin{aligned}
 \text{NPS2} &= \frac{(2 \times 104,12\%) + (1 \times 120,00\%)}{3} \\
 &= \mathbf{109,41\%}
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tahun 2017 Balai Besar POM di Denpasar telah berhasil meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan telah tercapainya target dari semua indikator pada sasaran strategis "Meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat". Namun demikian, Balai Besar POM di Denpasar harus terus melakukan langkah terobosan dalam rangka pembinaan terhadap pelaku usaha, membangun kemitraan dengan *stake holder* dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Untuk mendukung Sasaran Strategis 2, Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat dilakukan Program/Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dengan Sasaran Kegiatan :

4. Meningkatnya Kerjasama, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

terdapat 2 indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat capaiannya yaitu:

- a) Jumlah layanan publik BBPOM di Denpasar
- b) Jumlah komunitas yang diberdayakan

Realisasi dan capaian indikator kinerja kegiatan yang mendukung sasaran strategis 2 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.8 Capaian dan Perbandingan Indikator Sasaran Kegiatan sasaran strategis 2

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2017	Target Akhir RPJM	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2017 terhadap pRPJM	Kriteria 2017
1.	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BBPOM di Denpasar	1200	5945	1412	1406	122,78	117,17	73,41	Memuaskan
		Jumlah Komunitas yang diberdayakan	23	29	20	25	100,00	108,70	86,21	Memuaskan

Perbandingan **capaian** indikator Sasaran Kegiatan Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi tahun 2017 dengan tahun 2016 dan target Akhir RPJM dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

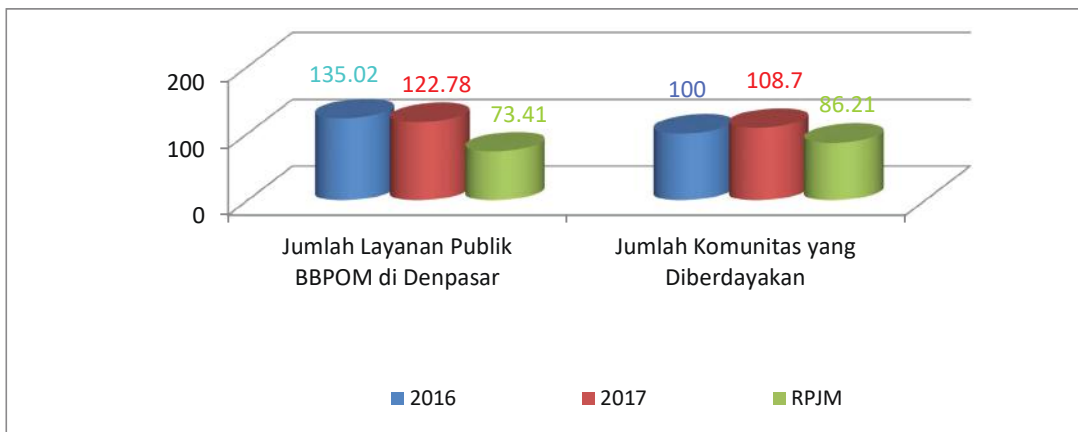


Diagram 3.12 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Strategis 2

Masing-masing Indikator Sasaran Kegiatan dan Analisa Capaian Akuntabilitas dijelaskan sebagai berikut :

A.2.3. Indikator Jumlah Layanan Publik BBPOM di Denpasar

Jumlah Layanan Publik dihitung berdasarkan jumlah layanan di Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK), Surat Keterangan Impor/Surat Keterangan Ekspor (SKI/SKE), Audit Registrasi, Pameran, Penyebaran Informasi secara interaktif dan melalui media elektronik, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) berupa talkshow di televisi dan di radio, Mobil Laboratorium Keliling (Mobling) dan Uji sampel pihak ketiga (lampiran 5.7).



Gambar 3.9. Penyebaran informasi melalui media elektronik

Realisasi dari indikator jumlah layanan publik tahun 2017 adalah 1406 dengan capaian 117,17% kriteria **memuaskan**. Capaian indikator tersebut dibandingkan dengan target RPJM sudah mencapai 73,41%. Capaian ini menunjukkan bahwa kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap BPOM sudah semakin meningkat terutama layanan KIE melalui media sosial, media cetak/elektronik, penyebaran leaflet/brosur, mobil laboratorium keliling. Dengan banyaknya jumlah layanan publik menunjukkan Sasaran kegiatan Meningkatnya Kerja Sama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta Sasaran Strategis Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat tercapai, sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat.

Jumlah layanan publik sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini disebabkan karena beberapa kegiatan layanan bersifat pasif tergantung kebutuhan masyarakat seperti permintaan informasi dan pengaduan di unit layanan pengaduan konsumen (ULPK).

Dibandingkan dengan BBPOM di Yogyakarta, dimana kondisi dan wilayahnya hampir sama dengan BBPOM di Denpasar, jumlah layanan publik BBPOM Yogyakarta yaitu sebesar 1578.

A.2.4. Indikator Jumlah Komunitas yang Diberdayakan

Jumlah komunitas yang diberdayakan dihitung berdasarkan jumlah desa dan pasar yang diberikan intervensi keamanan pangan. Komunitas yang diberdayakan pada tahun 2017 sebanyak 25 dari 23 komunitas yang ditargetkan. Pengukuran realisasi terhadap target indikator jumlah komunitas yang diberdayakan, terlihat bahwa capaian indikator kinerja yaitu sebesar 108,7% dengan kriteria **memuaskan**. Komunitas yang diberdayakan meliputi 2 intervensi di 2 sarana pasar yaitu : Pasar Nyanggelan Denpasar dan Pasar Amlapura Timur Karangasem, pengawalan Pasar Aman di 4 sarana pasar yaitu Pasar Agung, Pasar Sindu, Pasar Intaran dan Pasar Umum Gianyar; Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) mencakup 19 desa. Pengawalan kegiatan melalui Mobil Laboratorium Keliling dilakukan di 16 desa, yaitu 5 desa di Kota Denpasar, 5 desa di Kabupaten Gianyar, 3 desa di Kabupaten Klungkung, 3 desa di Kabupaten Buleleng. Intervensi kegiatan GKPD 2017 dilakukan di 3 desa di Kabupaten Karangasem. Keberhasilan dari program ini adalah karena komitmen dari lintas sektor yang cukup baik.

Capaian indikator tersebut dibandingkan dengan target akhir RPJM tahun 2019 sudah mencapai 86,21%. Dengan realisasi jumlah komunitas yang diberdayakan 108,7% menunjukkan bahwa penyebaran informasi keamanan pangan yang dilakukan di pasar tradisional dan program GKPD berhasil membentuk Kader Keamanan Pangan yang berperan memberikan informasi kepada masyarakat sampai ke pelosok desa dan masyarakat menjadi lebih cerdas dalam memilih dan mengkonsumsi produk pangan yang aman, bermutu dan bermanfaat sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Hal ini berarti bahwa sasaran kegiatan meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi, dan edukasi dan sasaran strategis meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat telah tercapai.

Pemberdayaan komunitas sekolah juga dilakukan untuk mendukung program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Sadar Pangan Aman (GERMAS SAPA) Badan POM pada tahun 2017. Gerakan ini merupakan gerakan nasional yang diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia yang mengedepankan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma hidup sehat. Diawali dengan pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan Sekolah kepada 50 orang pengawas sekolah mewakili SD, SMP dan SMA di kabupaten Badung, Gianyar dan Tabanan, dilanjutkan dengan Pertemuan Lintas sektor terkait dari 3 (tiga) kabupaten tersebut, Bimbingan Teknis Komunikasi, Informasi dan

Edukasi Pangan Jajanan Anak Sekolah (Bimtek KIE PJAS) kepada 500 sekolah, sampling dan pengujian PJAS di 35 sekolah, Bimbingan Teknis dan Audit Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKP-KS) kepada 30 sekolah dan diakhiri dengan pertemuan Monitoring Evaluasi kegiatan Germas yang dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat PBKP-KS kepada 5 sekolah yang telah memenuhi persyaratan PBKP-KS. Fasilitator Keamanan pangan Sekolah yang telah dilatih juga telah melakukan intervensi berupa pembinaan ke 500 sekolah dengan membentuk Tim Keamanan Pangan Sekolah di 500 sekolah sesuai dengan sekolah binaan masing-masing fasilitator.

Dibandingkan dengan BBPOM di Yogyakarta, dimana kondisi dan wilayahnya hampir sama dengan BBPOM di Denpasar Target pemenuhan jumlah komunitas yang diberdayakan adalah 108,70 % BBPOM Denpasar sedangkan untuk BBPOM Yogyakarta adalah sebanyak 116,67 %.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dari komunitas yang diberdayakan antara lain :

- Memberikan bantuan sarana penerapan keamanan pangan di sekolah seperti poster, celemek dan tutup kepala, tempat makan yang bertutup dan lain-lain.
- Memonitor secara berkala penerapan komitmen keamanan pangan di lingkungannya baik sekolah, pasar maupun desa.
- Melakukan pengawasan mendadak dengan Mobil Laboratorium Keliling ke beberapa sekolah, desa dan pasar yang sudah diintervensi.
- Melatih kembali fasilitator/kader untuk menambah pengetahuan dan wawasan
- Membentuk grup komunikasi online untuk mempercepat penyebaran informasi.

A.3. Pencapaian Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM

Untuk sasaran ketiga ini, terdapat 1 indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat capaiannya yaitu: Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar oleh Badan POM RI.

Hasil pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran strategis ketiga terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.9 Capaian dan Perbandingan Indikator Sasaran Strategis 3

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Target Akhir RPJM	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian Akhir RPJM	Kriteria 2017
1.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar oleh BPOM	A (80-90)	A (80-90)	B (72,21)	B (73,14)	90,26%	91,43%	91,43%	Cukup

Realisasi nilai SAKIP dari Badan POM tahun 2017 adalah 73,14 atau BB yang artinya sangat baik. Terdapat peningkatan nilai bila dibandingkan tahun 2016 sebesar 0,93 poin.

Hal-hal yang mendukung naiknya nilai SAKIP antara lain :

- Komitmen pimpinan dan staf BBPOM di Denpasar ditandai penandatanganan komitmen bersama membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM oleh seluruh pegawai
- Perbaikan manajemen dan akuntabilitas kinerja dengan membentuk tim monitoring, evaluasi dan penyusunan program melalui SK Kepala Balai. Tim ini bertanggungjawab atas semua data kinerja dari semua bidang setiap bulannya sehingga dapat dilaporkan tepat waktu. Anggota tim merupakan pegawai yang memahami tentang SAKIP melalui sosialisasi yang diadakan setelah Bimtek SAKIP.
- Menginput Realisasi anggaran dengan e-monev Bappenas, RAPK, RHPK per bulan
- Menginput TEPR dalam aplikasi
- Penggunaan aplikasi e-performance untuk meng *input* data kinerja setiap triwulan, sehingga terlihat zona capaian setiap sasaran strategis kemudian dilakukan evaluasi bersama yang dituangkan dalam evaluasi triwulan.
- Hasil audit internal implementasi Reformasi Birokrasi di BBPOM di Denpasar dengan nilai di atas 90.
- Pelaksanaan penandatanganan komitmen bersama pengendalian Gratifikasi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Balai Besar POM di Denpasar oleh kepala BBPOM di Denpasar dengan ketua asosiasi Gabungan Pengusaha Farmasi Provinsi Bali.

Perbandingan **capaian** indikator Sasaran Strategis 3 tahun 2017 terhadap tahun 2016 dan target Akhir RPJM dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

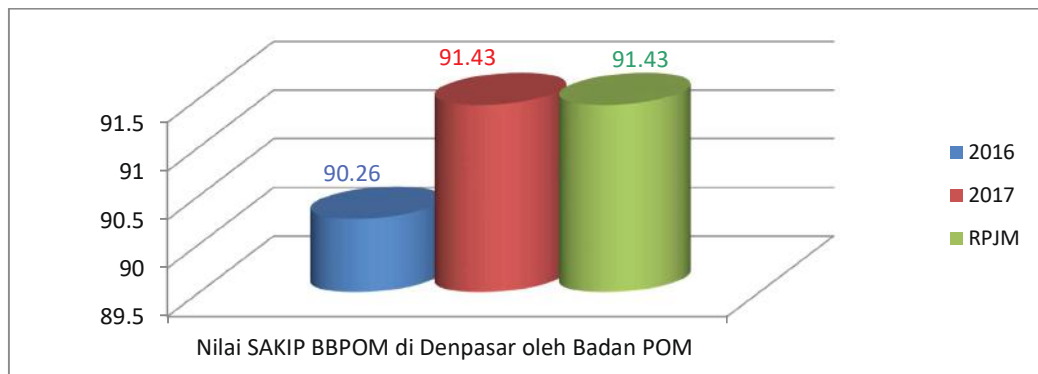


Diagram 3.13 Capaian dan Perbandingan Indikator Sasaran Strategis 3

A.3.1. Indikator Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar oleh BADAN POM

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimaksudkan untuk mengukur akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja dari instansi pemerintah, meliputi perencanaan strategis, pelaksanaan dan monitoring. Pengukuran capaian indikator Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar oleh Badan POM RI yaitu nilai Laporan Kinerja dari Badan POM adalah 73,14 (**BB**) sedangkan targetnya adalah A (80-90) sehingga capaiannya 91,43% dengan kriteria **cukup**. Salah satu penyebab capaian indikator kinerja tersebut tidak tercapai karena pelaporan kinerja/SAKIP yang dibuat belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria yang tertuang dalam Permenpan RB No.53 Tahun 2014 dan Juknis Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Lapkin tahun 2015, tetapi sudah ada peningkatan nilai dibandingkan tahun 2016. Untuk selanjutnya penerapan SAKIP dan pelaporan kinerja akan lebih disesuaikan dengan peraturan tersebut. Upaya lain yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas kinerja dan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001 tahun 2015 serta ISO/IEC 17025 tahun 2017 untuk penyelenggaraan sistem mutu laboratorium pengujian. Integrasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dengan Sistem Manajemen Mutu (QMS) yang sudah dimulai pada tahun 2017 akan lebih diintensifkan konsistensi dan pelaksanaannya, sehingga menunjang implementasi SAKIP. Disamping itu budaya organisasi, implementasi dan Internalisasinya akan lebih ditingkatkan melalui sosialisasi, outbond dan pemilihan pegawai teladan serta pemilihan *employee of the month* sehingga kualitas dan kapasitas kelembagaan BBPOM di Denpasar meningkat.

Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai merupakan hal yang sangat penting dalam penerapan Akuntabilitas Kinerja, perubahan pola pikir menuju birokrasi bersih melayani serta

serta penerapan SPIP yang terintegrasi dengan QMS harus terus diinternalisasi dan ditingkatkan implementasinya agar indikator tersebut tercapai.

Sumber Daya Manusia untuk mendukung terimplentasinya SAKIP perlu terus ditingkatkan kompetensinya dan peningkatan jumlah SDM sesuai Analisa Beban Kerja

Reformasi Birokrasi(RB) dengan 8 area perubahan harus terus di internalisasi dan di implementasikan oleh seluruh jajaran Balai Besar POM di Denpasar demi mewujudkan birokrasi bersih melayani,

Dengan kategori capaian indikator nilai SAKIP BBPOM di Denpasar cukup maka kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Denpasar perlu terus ditingkatkan antara lain dengan meningkatkan kualitas kinerja dan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001 serta ISO/IEC17025 untuk penyelenggaraan sistem mutu laboratorium pengujian. Disamping itu budaya organisasi, implementasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga harus terus ditingkatkan implementasinya sehingga kualitas dan kapasitas kelembagaan BBPOM di Denpasar meningkat untuk menunjang peningkatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 maka capaian nilai SAKIP masih jauh dari 100% . Namun BBPOM di Denpasar terus berupaya untuk bisa mencapai target nilai A pada akhir periode Renstra 2019. Hal-hal yang akan dilakukan untuk memperoleh hasil sesuai target di antaranya :

- Menyusun SKP secara cascading mulai dari eselon3, eselon 4 hingga ke masing-masing personel dan meng input SKP ke dalam aplikasi e-SKP yang dievaluasi kinerjanya setiap triwulan.
- Memanfaatkan sistem pengukuran kinerja berbasis IT yang dapat mengolah data hasil input dari masing-masing personel untuk menampilkan capaian kinerja sasaran strategis BBPOM di Denpasar.
- Memaparkan efisiensi dan efektifitas anggaran di semua sasaran strategis pada saat evaluasi pelaksanaan anggaran setiap bulan
- Sosialisasi dan internalisasi Reformasi Birokrasi dan WBK/WBBM kepada seluruh personel di BBPOM di Denpasar.
- Mempersiapkan dokumen untuk pengajuan audit WBK/WBBM sehingga bisa mendapatkan sertifikat WBK/WBBM
- Sosialisasi dan internalisasi SPIP kepada seluruh ASN BBPOM di Denpasar dan mempersiapkan dokumen untuk penilaian maturitas SPIP sehingga mendapatkan nilai maturitas SPIP level 3.

Karena indikator sasaran strategis 3 hanya satu maka, Pencapaian Sasaran strategis 3 sama dengan capaian indikator Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar oleh Badan POM.

NPS3 = 91,43%

Untuk mendukung Sasaran Strategis 3, dilakukan Program/Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dengan 2 Sasaran Kegiatan antara lain :

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan dengan indikator Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar
2. Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu dengan indikator Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu

Realisasi dan capaian indikator kinerja kegiatan yang mendukung sasaran strategis 3 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.10 Capaian dan Perbandingan Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Strategis 3

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2017	Target Akhir RPJM	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian Akhir RPJM	Kriteria 2017
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	78	88	77.07	81.41	105.58	104.37	92.51	Memuaskan
2.	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	48	9	10	100.00	100.00	60.42	Baik

Perbandingan **capaian** indikator Sasaran Kegiatan yang mendukung sasaran strategis 3 tahun 2017 dengan tahun 2016 dan target Akhir jangka menengah (RPJM 2019) dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

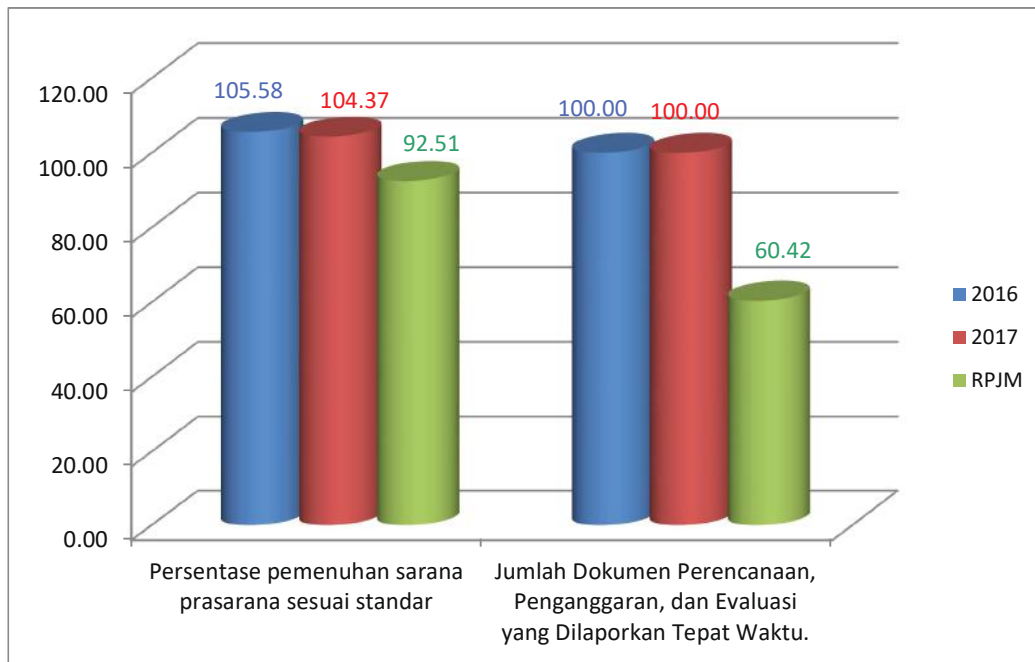


Diagram 3.14 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Kegiatan Sasaran Strategis 3

Masing-masing Indikator Sasaran Kegiatan dan Analisa Capaian Akuntabilitas dijelaskan sebagai berikut :

A.3.2. Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Sesuai Standar

Pengukuran realisasi terhadap target yang telah ditetapkan pada indikator persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar yaitu terlihat bahwa capaian indikator kinerja sebesar 104.37% dengan kriteria **memuaskan**. Realisasi kinerja Indikator tersebut dihitung berdasarkan pemenuhan sarana dan prasarana *meubelair*, alat pengolah data dan alat laboratorium yang sesuai dengan laporan BMN dibandingkan dengan standar yang ditetapkan.

Dibandingkan dengan tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah, jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sedangkan terhadap target RPJM tahun 2019 capaian 2017 baru mencapai sebesar 92,51%.

Dengan lebih terpenuhinya sarana dan prasarana maka diharapkan kegiatan Pengawas Obat dan Makanan dapat lebih optimal sehingga mendukung peningkatan

pencahayaan kesehatan masyarakat. Pengadaan alat laboratorium pada tahun 2017 sangat mendukung pengembangan metode untuk pemenuhan ruang lingkup dan parameter uji kritis yang diwajibkan pada pedoman sampling. Parameter uji yang dapat dipenuhi pada tahun 2017 di antaranya adalah pengujian cemaran logam Pb dan Cd pada sediaan kosmetika dan obat tradisional, uji pewarna dilarang MK3 menggunakan LCMS/MS. Dengan bertambahnya kuantitas alat juga meningkatkan kualitas hasil uji, dimana jaminan mutu hasil pengujian mulai dapat diterapkan seperti kontrol chart dan uji duplo pada penetapan kadar. Pada tahun berikutnya akan dilakukan pengadaan alat laboratorium dan sarana lainnya untuk lebih mengoptimalkan pengawasan terhadap obat dan makanan secara menyeluruh.

Dibandingkan dengan BBPOM di Yogyakarta, dimana kondisi dan wilayahnya hampir sama dengan BBPOM di Denpasar, Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar di BBPOM Denpasar (81,41%) lebih kecil dibandingkan BBPOM Yogyakarta (89,09%) dengan selisih persentase sebesar 7,68%.

A.3.3. Indikator Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu

Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu terlihat bahwa capaian indikator kinerja yaitu sebesar 100,00% dengan kriteria **baik**. Realisasi kinerja Indikator tersebut berdasarkan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dihasilkan meliputi dokumen berikut:

- Perjanjian Kinerja tahun 2017
- RKAKL/DIPA tahun 2018
- Laporan Kinerja tahun 2016
- Laporan triwulanan I Tahun 2017
- Laporan triwulanan II Tahun 2017
- Laporan triwulanan III Tahun 2017
- LAPTAH tahun 2016
- Laporan Keuangan tahun 2016
- Laporan Keuangan Semester 1 tahun 2017
- Review Renstra 2015-2019

Hal ini berarti bahwa sasaran strategis Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu telah tercapai. Dengan tercapainya jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu

100,00% menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaporan yang dibuat untuk mendukung pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Bali optimal. Kinerja indikator tersebut tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena setiap tahun jenis target/dokumen yang dihasilkan berbeda. Ketepatan waktu penyampaian laporan merupakan fokus yang tetap diterapkan untuk tahun berikutnya.

Dibandingkan dengan tahun 2016 ada perbedaan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan, karena pada tahun 2017 ada pembuatan dokumen Renstra, sedangkan tahun 2016 tidak ada. Target jumlah dokumen pada akhir RPJM tahun 2019 adalah 48 dokumen sehingga capaian sampai dengan 2017 baru mencapai 60,42%.

Dibandingkan dengan BBPOM di Yogyakarta, dimana kondisi dan wilayahnya hampir sama dengan BBPOM di Denpasar untuk pemenuhan capaian target jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu BBPOM Denpasar sama dengan BBPOM Yogyakarta yaitu 100 %.

B. REALISASI ANGGARAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Laporan Akuntabilitas Keuangan secara lengkap dan rinci dipertanggungjawabkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) BBPOM di Denpasar tahun 2017.

Anggaran BBPOM di Denpasar pada tahun 2017 pada DIPA awal sebesar Rp. 32.421.201.000 dengan realisasi Rp 31.150.012.568,- (96,08%). Program dan kegiatan untuk mendukung sasaran strategis ditetapkan 15 program kegiatan dan 210 sub kegiatan yang telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Hasil capaian kinerja maupun pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran efisiensi kegiatan dan sub kegiatan tidak terlepas dari komitmen dan dukungan seluruh pegawai di Lingkungan Balai Besar POM di Denpasar yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SPIP dan Reformasi Birokrasi serta Budaya Kerja Organisasi

Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran BBPOM di Denpasar pada tahun 2016 dengan pagu sebesar Rp. 29.894.672.000,- dengan realisasinya adalah Rp

29.236.125.357,- (97,80%) dari data tersebut terlihat bahwa pagu anggaran tahun 2017 lebih besar dari pada tahun 2016 (7,79%) dan jumlah realisasi anggaran meningkat sebesar 6,14%.

Pengelolaan anggaran oleh BBPOM di Denpasar telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Evaluasi realisasi anggaran dilakukan tiap bulan untuk memastikan rencana realisasi anggaran sesuai dengan target. Capaian indikator kinerja kegiatan dievaluasi setiap tiga bulan untuk memonitor capaian dari target pada perjanjian kinerja. Realisasi anggaran dari seluruh program dan kegiatan Balai Besar POM di Denpasar Tahun 2017 untuk mendukung sasaran strategis dan sasaran kegiatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3.10 Realisasi anggaran sasaran kegiatan pada Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat

Sasaran Kegiatan Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi
Anggaran 3.367.593.000
Realisasi 3.191.548.534 (94.77%)

Gambar 3.11 Realisasi anggaran sasaran kegiatan pada Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 3
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM

Sasaran Kegiatan 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Sasaran Kegiatan 2 Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu
Anggaran 9.626.380.000	Anggaran 11.744.999.000
Realisasi 9.509.799.800 (98.79%)	Realisasi 11.525.394.721 (98.13%)

Gambar 3.12 Realisasi anggaran sasaran kegiatan pada Sasaran Strategis 3

Anggaran total
Anggaran 32.421.201.000
Realisasi 31.150.012.568 (96.08%)

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa sasaran strategis yang anggarannya terbesar adalah sasaran strategis 3 hal ini disebabkan karena pengadaan, pemeliharaan sarana prasarana, dan belanja pegawai cukup tinggi, begitupun realisasi anggaran sasaran strategis ke 3 tertinggi. Realisasi anggaran tahun 2017 berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada diagram dibawah ini.

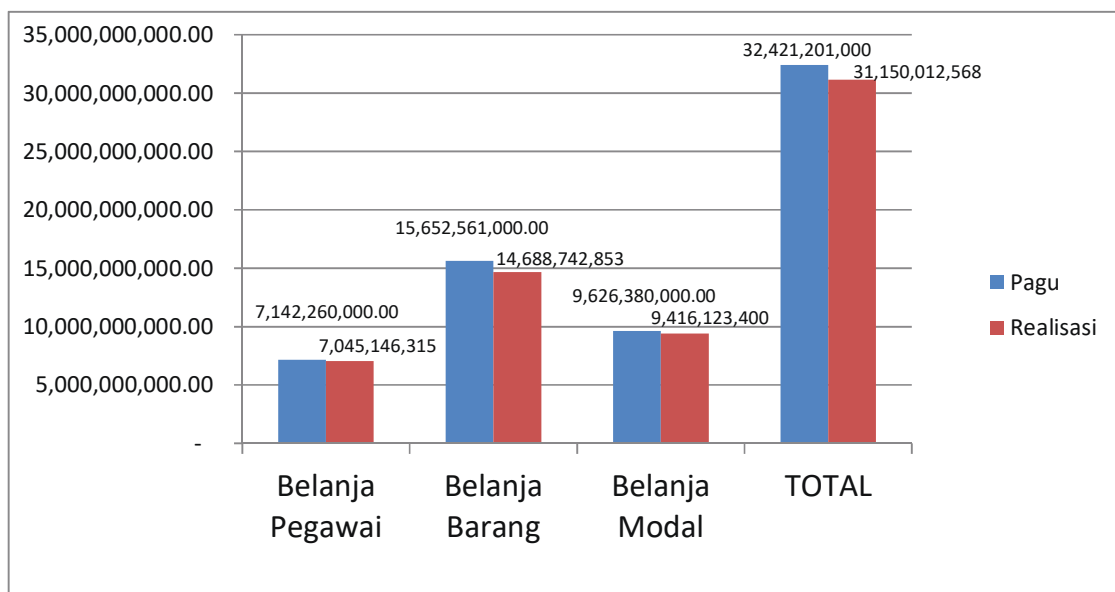


Diagram 3.15 Realisasi Anggaran tahun 2017

Dari gambar diatas terlihat anggaran yang terbesar adalah anggaran belanja barang, diikuti belanja modal dan belanja pegawai. Realisasi yang paling tinggi adalah belanja barang. Perbandingan Realisasi anggaran 2017 terhadap anggaran 2016 berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi Anggaran

NO.	JENIS BELANJA	TAHUN 2017			TAHUN 2016		
		PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	7.142.260.000	7.045.146.315	98.64	7.154.851.000	6.936.000.297	96.94
2	Belanja Barang	15.652.561.000	14.688.742.853	93.84	12.299.156.000	11.892.442.458	96.69
3	Belanja Modal	9.626.380.000	9.416.123.400	97.82	10.440.665.000	10.407.682.602	99.68
TOTAL		32.421.201.000	31.150.012.568	96.08	29.894.672.000	29.236.125.357	97.80

Dibandingkan dengan tahun 2016, terlihat adanya peningkatan Pagu dan realisasi untuk semua jenis belanja di tahun 2017, pagu anggaran tahun 2017 meningkat sebesar 7.79% dari tahun 2016 dan realisasinya juga meningkat sebesar 6,40 %.

Pengelolaan anggaran oleh BBPOM di Denpasar telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan senantiasa berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Hasil capaian kinerja maupun pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran efisiensi kegiatan dan sub kegiatan serta realisasi anggaran tidak terlepas dari komitmen dan dukungan seluruh pegawai di Lingkungan Balai Besar POM di Denpasar yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SPIP dan Reformasi Birokrasi serta budaya kerja organisasi.

C. ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Untuk pengukuran efisiensi difokuskan pada pengukuran indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian

output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\ &= \frac{100\%}{100\%} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
 Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Berdasarkan rumus diatas BBPOM di Denpasar telah mengukur indeks efisiensi dan tingkat efisiensi dari seluruh sub kegiatan pada Anggaran Balai Besar POM di Denpasar. Dari 15 program/kegiatan dan 210 sub kegiatan pada tahun 2017 untuk mendukung Pencapaian sasaran kegiatan dan sasaran strategis, semua kegiatan telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien, dibandingkan dengan tahun 2016. Capaian efisiensi dan tingkat efisiensi yang

meningkat pada tahun 2017 disebabkan karena komitmen seluruh pegawai dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SPIP dan Reformasi Birokrasi serta budaya kerja organisasi.

Secara lengkap hasil pengukuran Kinerja kegiatan dan pengukuran efisiensi kinerja kegiatan serta tingkat efisiensinya dapat dilihat pada Lampiran 3 dan lampiran 4.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah / Laporan Kinerja (LAPKIN) merupakan media pertanggungjawaban atas kinerja Instansi Pemerintah. LAPKIN juga dapat dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan baik internal maupun pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan/atau peningkatan kinerja di masa mendatang.

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja yang dilakukan, secara garis besar diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

- Sasaran 1: Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan memiliki 5 indikator dengan capaian :
 - Persentase Obat yang memenuhi syarat : 105,53% (memuaskan).
 - Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat : 90,48% (Cukup).
 - Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat : 104,89 % (memuaskan).
 - Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat : 115,04 % (Memuaskan).
 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat : 105,90% (memuaskan).

Capaian Sasaran Strategis 1 sebesar 104,37% dengan kriteria **Memuaskan**

- Sasaran 2: Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat memiliki 2 indikator dengan capaian :
 - Tingkat Kepuasan Masyarakat : 104,12% (memuaskan).
 - Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan : 120,00% (memuaskan)

Capaian Sasaran Strategis 2 sebesar 109,41% dengan kriteria **Memuaskan**.

- Sasaran 3: Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Denpasar memiliki 1 indikator dengan capaian :
 - Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar Oleh Badan POM RI : 91,43% (cukup).

Capaian Sasaran Strategis 3 sebesar 91,43% dengan kriteria **Cukup**.

- Capaian Sasaran strategis 3 cukup, karena diukur hanya dengan satu indikator, mungkin perlu ditambah indikator pada saat review Renstra.
- Yang merupakan Indikator Kinerja Utama adalah kelima indikator kinerja pada Sasaran Strategis 1 dan 1 (satu) indikator kinerja tingkat kepuasan masyarakat dari Sasaran Strategis 2 dengan capaian 5 memuaskan dan 1 cukup yaitu Indikator Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat. Hal ini disebabkan karena Obat Tradisional yang beredar di Provinsi Bali sebagian besar merupakan produksi dari luar wilayah Provinsi Bali sehingga sulit melakukan intervensi terhadap produsen Obat Tradisional tersebut.
- Untuk mendukung capaian indikator kinerja BBPOM di Denpasar pada tahun 2017 telah melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - Pengujian Obat sebanyak 700 sampel, dengan hasil jumlah obat yang memenuhi syarat 687 sampel (98,14%).
 - Pemeriksaan sarana distribusi Obat sebanyak 334 (31,96%) sarana dari 1045 sarana distribusi yang ada. Hasil pengawasan yang tidak memenuhi ketentuan selalu ditindaklanjuti dengan memberikan pembinaan tertulis baik langsung ke sarana yang bersangkutan maupun berupa rekomendasi ke instansi berwenang terkait (Dinas Kesehatan) untuk memberikan tindakan
 - Audit sarana distribusi dalam rangka izin PBF, sertifikasi dan resertifikasi CDOB sebanyak 20 sarana.
 - Dalam rangka peningkatan kepatuhan sarana terhadap peraturan dilakukan sosialisasi peraturan dan pedoman tentang Cara Distribusi Obat yang Baik.
 - Pengujian Obat Tradisional sebanyak 527 sampel dengan hasil jumlah Obat Tradisional yang memenuhi syarat 391 (74,19%) sampel.
 - Dari 17 sarana produksi dan 139 sarana distribusi obat tradisional yang ada, telah diawasi sebanyak 16 (94,12%) sarana produksi dan 51 (36,69%) sarana distribusi.
 - Dilakukan juga audit sarana produksi Obat Tradisional sebanyak 4 (empat) sarana dalam rangka pendaftaran produk Obat Tradisional.
 - Dari 15 kasus pelanggaran di bidang Obat, Kosmetika dan Obat Tradisional, sebanyak 9 (sembilan) pelaku usaha diproses *pro-Justitia*.
 - Pembinaan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dilakukan kepada sarana produksi dan KIE kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih cerdas untuk tidak mengkonsumsi Obat Tradisional yang tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki ijin edar.

- Pengujian kosmetik dengan ijin Edar Badan POM yang dilakukan sebanyak 1054 sampel dengan hasil kosmetik yang memenuhi syarat sebanyak 1006 sampel (95,45%).
- Dari 893 sarana produksi dan 3403 sarana distribusi yang ada, telah diawasi sebanyak 218 (24,41%) sarana produksi dan 876 (25,74%) sarana distribusi.
- Pengujian suplemen kesehatan dengan Ijin Edar Badan POM sebanyak 176 sampel dengan hasil suplemen kesehatan yang memenuhi syarat sebanyak 164 (93,18%) sampel.
- Dari 59 sarana distribusi suplemen kesehatan yang ada, telah diawasi sebanyak 9 (15,25%) dengan 7 sarana memenuhi ketentuan (77,78%).
- Pengujian pangan dengan ijin edar Badan POM sebanyak 780 sampel dengan hasil pangan yang memenuhi syarat sebanyak 736 (94,36%).
- Dari 831 sarana produksi pangan yang ada, telah diawasi sebanyak 174 (20,94%) dengan 37 sarana memenuhi ketentuan (21,26%).
- Dari 1307 sarana distribusi yang ada, telah diawasi sebanyak 353 (27,01%) sarana dan 177 sarana memenuhi ketentuan (50,14%).
- Anggaran BBPOM di Denpasar pada tahun 2017 sebesar Rp 32.421.201.000,- dengan realisasi Rp 31.150.012.568,-. Persentase realisasi anggaran adalah 96,08%.
- Dari 210 sub kegiatan yang telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

4.2. SARAN

Terkait dengan capaian kinerja tersebut, Balai Besar POM di Denpasar secara terus menerus berupaya melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Upaya perbaikan yang dilakukan antara lain :

- Meningkatkan penyebaran *public warning* terkait Obat Tradisional kepada pelaku usaha dan masyarakat melalui media sosial.
- Lebih meningkatkan kemandirian pelaku usaha Obat Tradisional untuk menjamin mutu dan keamanan produk Obat Tradisional sehingga mampu bersaing di pasar lokal maupun global dengan pembinaan CPOTB dan penyebaran informasi terkait Obat Tradisional.

- Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha untuk tidak menjual produk Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan yang tidak memenuhi syarat, tidak memiliki ijin edar, mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan merupakan *public warning*.
- Meningkatkan bimbingan/penyuluhan CPKB, CPOTB, CPPB kepada produsen untuk bisa mandiri dalam menjamin mutu dan keamanan produknya sehingga mampu bersaing di pasar lokal maupun global dan meningkatkan pembinaan kepada sarana distribusi untuk tidak menjual produk yang tidak memenuhi syarat ataupun tidak memiliki ijin edar,
- Advokasi dan koordinasi kepada *stake holder* terkait peningkatan pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Inpres No. 3 tahun 2017 dengan MOU dan membentuk tim terpadu.
- Meningkatkan kompetensi petugas terkait penyidikan obat dan makanan melalui pelatihan teknis salah satunya adalah Pelatihan *Cyber Crime*.
- Meningkatkan Koordinasi dengan *Criminal Justice System* di daerah antara lain dengan Kepolisian, Kejaksaan, Kominfo dan Lintas sektor terkait lainnya.
- Memanfaatkan sistem pengukuran kinerja berbasis IT yang dapat mengolah data hasil input dari masing-masing personel untuk menampilkan capaian kinerja sasaran strategis BBPOM di Denpasar
- Memaparkan efisiensi dan efektifitas anggaran di semua sasaran strategis pada saat evaluasi pelaksanaan anggaran setiap bulan
- Membuat MOU dengan Kwarda Provinsi Bali dan Poltekkes Negeri Bali untuk memanfaatkan remaja/mahasiswa Bali sebagai kepanjangan tangan BPOM sebagai media sosialisasi Obat dan Makanan, Meningkatkan peran serta masyarakat sebagai konsumen cerdas. Meningkatkan intensitas dan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan serta pengelolaan anggaran dan kegiatan.
- Melakukan evaluasi secara rutin terhadap target dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Demikian paparan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintahan BBPOM di Denpasar tahun 2017, semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat, *stake holder* dan pihak-pihak yang berkepentingan, terutama Badan POM sebagai hasil evaluasi dari perjanjian kinerja tahun 2017 antara Kepala BBPOM di Denpasar dengan Kepala Badan POM.

LAMPIRAN

Rencana Strategis BBPOM di Denpasar tahun 2015-2019
Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam Miliar rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar											
	SS 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan						3,74	4,11	4,53	4,98	5,48
	1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00					
	1.2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00					
	1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00					
	1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00					
	1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	88,10	88,60	89,10	89,60	90,10					
	SS 2 Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat						0,96	1,06	1,16	1,28	1,41
	2.1 Tingkat Kepuasan Masyarakat	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00					
	2.2 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00					
	SS 3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM						7,37	8,11	8,92	9,81	10,79
	3.1 Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar oleh BPOM	A	A	A	A	A					
Program Pengawasan Obat dan Makanan											
	SP 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan						3,74	4,11	4,53	4,98	5,48
	1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00					
	1.2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00					
	1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00					
	1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00					
	1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	88,10	88,60	89,10	89,60	90,10					
	SP 2 Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat						0,96	1,06	1,16	1,28	1,41
	2.1 Tingkat Kepuasan Masyarakat	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00					
	2.2 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00					
	SP 3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM						7,37	8,11	8,92	9,81	10,79
	3.1 Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar oleh BPOM	A	A	A	A	A					
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Denpasar							12,07	13,28	14,60	16,07	17,67
	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia										
	1 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	1,87	2,06	2,26	2,49	2,74
	2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	25	25	25	25	25	0,21	0,23	0,25	0,28	0,31

Rencana Strategis BBPOM di Denpasar tahun 2015-2019
Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam Miliar rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar											
	4 Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	24	24	25	25	25	0,88	0,97	1,06	1,17	1,29
	5 Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	9	10	11	10	10	0,78	0,86	0,94	1,04	1,14
	6 Jumlah layanan publik BBPOM di Denpasar	1.145	1.150	1.200	1.200	1.250	0,59	0,65	0,71	0,79	0,86
	7 Jumlah Komunitas yang diberdayakan	17	20	23	26	29	0,37	0,41	0,45	0,49	0,54
	8 Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	70	73	78	83	88	6,00	6,60	7,26	7,99	8,78
	9 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10,00	9,00	10,00	9,00	10,00	1,37	1,51	1,66	1,82	2,01

REVIEW INDIKATOR RENSTRA 2015-2019

NO	SASARAN	INDIKATOR	SEMULA												USULAN PERUBAHAN								
			TARGET						REALISASI						CAPAIAN (%)	IDENTIFIKASI MASALAH DAN KENDALA PELAKSANAAN	SOLUSI	INDIKATOR	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	TW1 2017	2015	2016	2017	2018					2019	2015	2016	2017	2018
4	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	362	100,00	100,00	10,34	100,00	100,00	100,00			Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	100,00	100,00	100,00	100,00	82,86	19,02	100,00	82,86	19,02	Perubahan Teknik Sampling dengan metode Acak	Indikator Untuk IFK dihilangkan										
6	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	25,00	25,00	25,00	25,00	30,00	8,94	100,00	100,00	35,76	100,00	100,00	100,00			Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	25,00	25,00	25,00	25,00	30,00	
7	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	24	24	24	24	27	24,48	112,50	102,00	25,29	102,00	100,00	100,00			Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	24	24	24	24	25	
8	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	9	10	8	10	10	0	100,00	100,00	0	100,00	100,00	100,00			Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	9	10	8	10	12	
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah layanan Publik BBPOM di Denpasar yang diberdayakan	1.145	1.150	1.200	1.250	1.546	1.412	135,02	122,78	33,75	122,78	100,00	100,00			Jumlah layanan Publik BBPOM di Denpasar	1.145	1.150	1.200	1.450	1.500	
10	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	17	20	23	26	29	20,00	100,00	100,00	13,04	100,00	100,00	100,00			Jumlah Komunitas yang diberdayakan	17	20	23	29	31	
		Persentase Pemenuhan Prasarana sesuai standar	70,00	73,00	78,00	83,00	88,00	77,05	108,63	102,81	101,33	102,81	100,00	100,00			Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana sesuai standar	70,00	73,00	78,00	83,00	88,00	
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	9	10	9	10	9	100,00	100,00	40	100,00	100,00	100,00			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	9	10	9	10	

Matrik Kamus Indikator Review Renstra BBPOM di Denpasar 2015-2019

INDIKATOR	KONSEP DAN DEFINISI	SASARAN	SATUAN	SUMBER DATA (BASELINE 2014)	MEKANISME PENGUMPULAN DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA (REALISASI)	METODE PERHITUNGAN	TERCANTUM PADA RENSTRA KL (YA/TIDAK)
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN								
1 Persentase obat yang memenuhi syarat	<p>a. Obat yang mendapatkan NIE dari Badan POM.</p> <p>b. Yang dimaksud dengan obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika (tidak termasuk OT)</p> <p>c. Obat Memenuhi Syarat (MS) ditetapkan melalui uji laboratorium.</p> <p>d. Kategori obat yang disampling sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.</p> <p>e. Jumlah produk obat TMS dihitung berdasarkan satuan betas</p>	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	%	<p>SBD 2012 terkoreksi dengan survei produk beredar</p> <p>Untuk pengumpulan data baseline:</p> <p>- Survei Lanjutan Baseline Data (SBD)</p> <p>- Survei produk beredar</p>	<p>Untuk pengumpulan data capaian:</p> <p>- Laporan Hasil Uji (LHU) Balai</p> <p>- Survei produk beredar tahun berjalan apabila dilakukan dengan parameter uji kritis tidak dihitung sebagai data</p> <p>- Untuk parameter yang tidak mampu diuji harus diuji rujuk</p> <p>- sampel lain-lain harus berdasarkan kajian risiko</p> <p>Obat: 20% sampel. Dari 20% tersebut maks. 2% untuk sampel obat lain-lain</p>	<p>Setiap triwulan dan akhir tahun anggaran</p> <p>Untuk survei produk beredar dilakukan setiap 2 tahun</p> <p>Selain itu sebagai verifikasi juga dilakukan survei lanjutan SBD tahun 2017</p>	$\text{Persentase Obat MS} = \frac{\text{Produk Obat yang MS pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah seluruh sampel Obat yang diuji pada tahun berjalan}} \times 100\%$	Ya. Indikator Sasaran Program pada Matriks Renstra BPOM.
2 Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	<p>a. Obat Tradisional yang mendapatkan NIE dari Badan POM.</p> <p>b. Obat Tradisional (OT) yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.</p> <p>c. Kategori Obat Tradisional yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.</p>	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	%	<p>Laporan Kinerja Dit. Inset OT Kos PK 2014</p>	<p>Untuk pengumpulan data capaian:</p> <p>- Laporan Hasil Uji (LHU) Balai</p> <p>- Sampel yang tidak diuji dengan parameter uji kritis tidak dihitung sebagai data</p> <p>- Untuk parameter yang tidak mampu diuji harus diuji rujuk</p>	<p>Setiap triwulan dan akhir tahun anggaran.</p> <p>Selain itu sebagai verifikasi juga dilakukan survei lanjutan SBD tahun 2017</p>	$\text{Persentase OT MS} = \frac{\text{Jumlah OT yang MS pada tahun berjalan}}{\text{Total OT yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan}} \times 100\%$	Ya. Indikator Sasaran Program pada Matriks Renstra BPOM.

Matrik Kamus Indikator Review Renstra BPOM di Denpasar 2015-2019

INDIKATOR	KONSEP DAN DEFINISI	SASARAN	SATUAN	SUMBER DATA (BASELINE 2014)	MEKANISME PENGUMPULAN DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA (REALISASI)	METODE PERHITUNGAN	TERCANTUM PADA RENSTRA KL (YA/TIDAK)
3 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	<p>a. Kosmetik yang mendapatkan notifikasi dari BPOM</p> <p>b. Kosmetik yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.</p> <p>c. Kategori kosmetik yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.</p>	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	%	Laporan Kinerja Dit. Inersa OT Kos PK 2014	<p>Untuk pengumpulan data capaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Uji (LHU) Balai - Sampel yang tidak diuji dengan parameter uji kritis tidak dihitung sebagai data - Untuk parameter yang tidak mampu diuji harus diuji rujuk 	<p>Setiap triwulan dan akhir tahun anggaran.</p> <p>Selain itu sebagai verifikasi juga dilakukan survei lanjutan SBD tahun 2017</p>	$\frac{\text{Persentase Kosmetik yang MS pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah seluruh sampel makanan yang diuji pada tahun berjalan}} \times 100\%$	Ya. Indikator Sasaran Program pada Matriks Renstra BPOM.
4 Persentase Suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	<p>a. Suplemen Kesehatan (SK) yang mendapatkan NIE dari BPOM.</p> <p>b. Suplemen Kesehatan (SK) yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.</p> <p>c. Kategori suplemen kesehatan yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.</p>	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	%	Laporan Kinerja Dit. Inersa OT Kos PK 2014	<p>Untuk pengumpulan data capaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Uji (LHU) Balai - Sampel yang tidak diuji dengan parameter uji kritis tidak dihitung sebagai data - Untuk parameter yang tidak mampu diuji harus diuji rujuk 	<p>Setiap triwulan dan akhir tahun anggaran.</p> <p>Selain itu sebagai verifikasi juga dilakukan survei lanjutan SBD tahun 2017</p>	$\frac{\text{Persentase SK MS yang MS pada tahun berjalan}}{\text{Total SK yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan}} \times 100\%$	Ya. Indikator Sasaran Program pada Matriks Renstra BPOM.
5 Persentase makanan yang memenuhi syarat	<p>a. Makanan adalah pangan olahan yang mendapatkan NIE dari Badan POM.</p> <p>b. Makanan MS ditetapkan melalui uji laboratorium.</p> <p>c. Kategori pangan yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.</p>	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	%	Laporan Kinerja Dit. Inersa Pangan 2014	<p>Untuk pengumpulan data capaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Uji (LHU) Balai - Sampel yang tidak diuji dengan parameter uji kritis tidak dihitung sebagai data - Untuk parameter yang tidak mampu diuji harus diuji rujuk 	<p>Setiap triwulan dan akhir tahun anggaran.</p> <p>Selain itu sebagai verifikasi juga dilakukan survei lanjutan SBD tahun 2017</p>	$\frac{\text{Persentase Makanan MS yang MS pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah seluruh sampel makanan yang diuji pada tahun berjalan}} \times 100\%$	Ya. Indikator Sasaran Program pada Matriks Renstra BPOM.

Matrik Kamus Indikator Review Renstra BPOM di Denpasar 2015-2019

INDIKATOR	KONSEP DAN DEFINISI	SASARAN	SATUAN	SUMBER DATA (BASELINE 2014)	MEKANISME PENGUMPULAN DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA (REALISASI)	METODE PERHITUNGAN	TERCANTUM PADA RENSTRA KL (YA/TIDAK)
6 Tingkat Kepuasan Masyarakat	<p>a. Tingkat Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.</p> <p>b. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektoral BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 16 tahun 2014)</p> <p>c. Target dinyatakan dalam angka</p>	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	%	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat 2014	Survei lapangan	satu kali setahun	Hasil Survei lapangan	Ya. Indikator Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan pada Matriks Rancangan Renstra Balai
7 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan adanya tim terpadu.	<p>a. Provinsi adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur</p> <p>b. Kabupaten/ Kota adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi yang dipimpin oleh Bupati/ Walikota.</p> <p>c. Komitmen untuk pelaksanaan Obat dan Makanan adalah perjanjian (keterikatan) Kota/ Kabupaten untuk melakukan pelaksanaan pengawasan obat, kosmetik, obat tradisional, pangan dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, baik yang dilakukan secara mandiri dan atau terpadu melalui pengawasan/ pemeriksaan, advokasi/ penyuluhan, pembentukan tim terpadu, pertemuan dan kegiatan lainnya yang dapat memperkuat pengawasan.</p>	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	jumlah	N/A	MOU dan Data Tim Terpadu dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan.	Setiap tahun	Dihitung dari jumlah Kabupaten/Kota yang mempunyai MOU dan/atau Tim Terpadu dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan.	Ya. Indikator Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan pada Matriks Renstra BPOM.

REVIEW INDIKATOR RENSTRA 2015-2019

NO	SASARAN	INDIKATOR	SEMULA												USULAN PERUBAHAN								
			TARGET						REALISASI						CAPAIAN (%)	IDENTIFIKASI MASALAH DAN KENDALA PELAKSANAAN	SOLUSI	INDIKATOR	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	TW1 2017	2015	2016	2017	2018					2019	2015	2016	2017	2018
4	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	362	100,00	100,00	10,34	100,00	100,00	100,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500				
5	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	100,00	100,00	100,00	100,00	82,86	19,02	100,00	82,86	19,02	Perubahan Teknik Sampling dengan metode Acak	Indikator Untuk IFK dihilangkan										
6	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	25,00	25,00	25,00	25,00	30,00	8,94	100,00	100,00	35,76	100,00	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	30,00				
7	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	24	24	24	24	27	24,48	112,50	102,00	25,29	102,00	102,00	100,00	24	24	24	24	25				
8	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	9	10	10	10	9	10	100,00	100,00	0	100,00	100,00	100,00	9	10	8	12	12				
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah layanan Publik BBPOM di Denpasar yang diberdayakan	1.145	1.150	1.200	1.250	1.546	1.412	135,02	122,78	33,75	122,78	100,00	100,00	1.145	1.150	1.200	1.450	1.500				
10	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	17	20	23	26	29	20,00	100,00	13,04	100,00	100,00	100,00	100,00	17	20	23	29	31				
		Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana sesuai standar	70,00	73,00	78,00	83,00	88,00	77,05	108,63	102,81	101,33	102,81	102,81	102,81	70,00	73,00	78,00	83,00	88,00				
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	9	10	9	10	9	100,00	100,00	40	100,00	100,00	100,00	10	9	10	9	10				

Matrik Kamus Indikator Review Renstra BBPOM di Denpasar 2015-2019

INDIKATOR	KONSEP DAN DEFINISI	SASARAN	SATUAN	SUMBER DATA (BASELINE 2014)	MEKANISME PENGUMPULAN DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA (REALISASI)	METODE PERHITUNGAN	TERCANTUM PADA RENSTRA KL (YA/TIDAK)
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN								
1 Persentase obat yang memenuhi syarat	<p>a. Obat yang mendapatkan NIE dari Badan POM.</p> <p>b. Yang dimaksud dengan obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika (tidak termasuk OT)</p> <p>c. Obat Memenuhi Syarat (MS) ditetapkan melalui uji laboratorium.</p> <p>d. Kategori obat yang disampling sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.</p> <p>e. Jumlah produk obat TMS dihitung berdasarkan satuan betas</p>	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	%	<p>SBD 2012 terkoreksi dengan survei produk beredar</p> <p>Untuk pengumpulan data baseline:</p> <p>- Survei Lanjutan Baseline Data (SBD)</p> <p>- Survei produk beredar</p>	<p>Untuk pengumpulan data capaian:</p> <p>- Laporan Hasil Uji (LHU) Balai</p> <p>- Survei produk beredar tahun berjalan apabila dilakukan dengan parameter uji kritis tidak dihitung sebagai data</p> <p>- Untuk parameter yang tidak mampu diuji harus diuji rujuk</p> <p>- sampel lain-lain harus berdasarkan kajian risiko</p> <p>Obat: 20% sampel. Dari 20% tersebut maks. 2% untuk sampel obat lain-lain</p>	<p>Setiap triwulan dan akhir tahun anggaran</p> <p>Untuk survei produk beredar dilakukan setiap 2 tahun</p> <p>Selain itu sebagai verifikasi juga dilakukan survei lanjutan SBD tahun 2017</p>	$\text{Persentase Obat MS} = \frac{\text{Produk Obat yang MS pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah seluruh sampel Obat yang diuji pada tahun berjalan}} \times 100\%$	Ya. Indikator Sasaran Program pada Matriks Renstra BPOM.
2 Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	<p>a. Obat Tradisional yang mendapatkan NIE dari Badan POM.</p> <p>b. Obat Tradisional (OT) yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.</p> <p>c. Kategori Obat Tradisional yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.</p>	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	%	<p>Laporan Kinerja Dit. Inset OT Kos PK 2014</p>	<p>Untuk pengumpulan data capaian:</p> <p>- Laporan Hasil Uji (LHU) Balai</p> <p>- Sampel yang tidak diuji dengan parameter uji kritis tidak dihitung sebagai data</p> <p>- Untuk parameter yang tidak mampu diuji harus diuji rujuk</p>	<p>Setiap triwulan dan akhir tahun anggaran.</p> <p>Selain itu sebagai verifikasi juga dilakukan survei lanjutan SBD tahun 2017</p>	$\text{Persentase OT MS} = \frac{\text{Jumlah OT yang MS pada tahun berjalan}}{\text{Total OT yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan}} \times 100\%$	Ya. Indikator Sasaran Program pada Matriks Renstra BPOM.

Matrik Kamus Indikator Review Renstra BPOM di Denpasar 2015-2019

INDIKATOR	KONSEP DAN DEFINISI	SASARAN	SATUAN	SUMBER DATA (BASELINE 2014)	MEKANISME PENGUMPULAN DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA (REALISASI)	METODE PERHITUNGAN	TERCANTUM PADA RENSTRA KL (YAITIDAK)
3 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	<p>a. Kosmetik yang mendapatkan notifikasi dari BPOM</p> <p>b. Kosmetik yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.</p> <p>c. Kategori kosmetik yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.</p>	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	%	Laporan Kinerja Dit. Inersa OT Kos PK 2014	<p>Untuk pengumpulan data capaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Uji (LHU) Balai - Sampel yang tidak diuji dengan parameter uji kritis tidak dihitung sebagai data - Untuk parameter yang tidak mampu diuji harus diuji rujuk 	<p>Setiap triwulan dan akhir tahun anggaran.</p> <p>Selain itu sebagai verifikasi juga dilakukan survei lanjutan SBD tahun 2017</p>	$\frac{\text{Persentase Kosmetik yang MS pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah seluruh sampel makanan yang diuji pada tahun berjalan}} \times 100\%$	Ya. Indikator Sasaran Program pada Matriks Renstra BPOM.
4 Persentase Suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	<p>a. Suplemen Kesehatan (SK) yang mendapatkan NIE dari BPOM.</p> <p>b. Suplemen Kesehatan (SK) yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.</p> <p>c. Kategori suplemen kesehatan yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.</p>	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	%	Laporan Kinerja Dit. Inersa OT Kos PK 2014	<p>Untuk pengumpulan data capaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Uji (LHU) Balai - Sampel yang tidak diuji dengan parameter uji kritis tidak dihitung sebagai data - Untuk parameter yang tidak mampu diuji harus diuji rujuk 	<p>Setiap triwulan dan akhir tahun anggaran.</p> <p>Selain itu sebagai verifikasi juga dilakukan survei lanjutan SBD tahun 2017</p>	$\frac{\text{Persentase SK MS yang MS pada tahun berjalan}}{\text{Total SK yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan}} \times 100\%$	Ya. Indikator Sasaran Program pada Matriks Renstra BPOM.
5 Persentase makanan yang memenuhi syarat	<p>a. Makanan adalah pangan olahan yang mendapatkan NIE dari Badan POM.</p> <p>b. Makanan MS ditetapkan melalui uji laboratorium.</p> <p>c. Kategori pangan yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.</p>	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	%	Laporan Kinerja Dit. Inersa Pangan 2014	<p>Untuk pengumpulan data capaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Uji (LHU) Balai - Sampel yang tidak diuji dengan parameter uji kritis tidak dihitung sebagai data - Untuk parameter yang tidak mampu diuji harus diuji rujuk 	<p>Setiap triwulan dan akhir tahun anggaran.</p> <p>Selain itu sebagai verifikasi juga dilakukan survei lanjutan SBD tahun 2017</p>	$\frac{\text{Persentase Makanan MS yang MS pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah seluruh sampel makanan yang diuji pada tahun berjalan}} \times 100\%$	Ya. Indikator Sasaran Program pada Matriks Renstra BPOM.

Matrik Kamus Indikator Review Renstra BPOM di Denpasar 2015-2019

INDIKATOR	KONSEP DAN DEFINISI	SASARAN	SATUAN	SUMBER DATA (BASELINE 2014)	MEKANISME PENGUMPULAN DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA (REALISASI)	METODE PERHITUNGAN	TERCANTUM PADA RENSTRA KL (YA/TIDAK)
6 Tingkat Kepuasan Masyarakat	<p>a. Tingkat Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.</p> <p>b. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektoral BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 16 tahun 2014)</p> <p>c. Target dinyatakan dalam angka</p>	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	%	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat 2014	Survei lapangan	satu kali setahun	Hasil Survei lapangan	Ya. Indikator Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan pada Matriks Rancangan Renstra Balai
7 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan adanya tim terpadu.	<p>a. Provinsi adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur</p> <p>b. Kabupaten/ Kota adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi yang dipimpin oleh Bupati/ Walikota.</p> <p>c. Komitmen untuk pelaksanaan Obat dan Makanan adalah perjanjian (keterikatan) Kota/ Kabupaten untuk melakukan pelaksanaan pengawasan obat, kosmetik, obat tradisional, pangan dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, baik yang dilakukan secara mandiri dan atau terpadu melalui pengawasan/ pemeriksaan, advokasi/ penyuluhan, pembentukan tim terpadu, pertemuan dan kegiatan lainnya yang dapat memperkuat pengawasan.</p>	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	jumlah	N/A	MOU dan Data Tim Terpadu dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan.	Setiap tahun	Dihitung dari jumlah Kabupaten/Kota yang mempunyai MOU dan/atau Tim Terpadu dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan.	Ya. Indikator Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan pada Matriks Renstra BPOM.

Matrik Kamus Indikator Review Renstra BPOM di Denpasar 2015-2019

INDIKATOR	KONSEP DAN DEFINISI	SASARAN	SATUAN	SUMBER DATA (BASELINE 2014)	MEKANISME PENGUMPULAN DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA (REALISASI)	METODE PERHITUNGAN	TERCANTUM PADA RENSTRA KL (YA/TIDAK)	
8	<p>Sarana adalah sarana produksi dan distribusi</p> <p>a. Sarana adalah sarana produksi dan distribusi</p> <p>b. Rekomendasi adalah surat pernyataan pemenuhan persyaratan</p> <p>c. Persyaratan adalah hal-hal yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan CPOB, CPKB, CPOTB, CDOB, CPPOB dan CDMB</p>	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	%		Rekapitulasi data hasil kegiatan audit		Dihitung dengan cara prosentase dari rekomendasi yang terbit dibandingkan dengan permohonan audit		
9	<p>Nilai SAKIP diukur berdasarkan hasil penilaian SAKIP yang dilakukan oleh APIP Badan POM</p>	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah	Laporan Hasil Evaluasi APIP Badan POM	Laporan Kinerja Balai	Setiap tahun	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Balai yang dilakukan oleh APIP Badan POM	Ya. Indikator Sasaran Kegiatan pada Matriks Renstra Balai.	
Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM									
1	<p>Parameter kritis adalah parameter uji yang bersifat sebagai penentu terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji</p> <p>Parameter kritis ditetapkan dalam pedoman sampling Obat dan Makanan (juga menjelaskan "penentu" terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji)</p>	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	jumlah	Laporan Hasil Uji (LHU) Balai	Laporan Hasil Uji (LHU) Balai	Setiap triwulan dan akhir tahun.	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Ya. Indikator Sasaran Kegiatan pada Matriks Renstra BPOM.	

Matrik Kamus Indikator Review Renstra BPOM di Denpasar 2015-2019

INDIKATOR	KONSEP DAN DEFINISI	SASARAN	SATUAN	SUMBER DATA (BASELINE 2014)	MEKANISME PENGUMPULAN DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA (REALISASI)	METODE PERHITUNGAN	TERCANTUM PADA RENSTRA KL (YA/TIDAK)
3 Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	<p>a. Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana industri Farmasi, Industri Rokok, Industri Obat Tradisional (IOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Kosmetika, Industri Pangan olahan MD, dan Industri Rumah Tangga Pangan.</p> <p>b. Sarana produksi yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Pedoman Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan.</p> <p>c. Cakupan pengawasan sarana produksi pertahun dihitung dari jumlah sarana produksi yang diperiksa dibandingkan dengan jumlah sarana produksi yang ada di wilayah tersebut</p>	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	%	Laporan SIPT	<p>a. Database jumlah sarana Industri Farmasi dari Ditwas Produksi PT dan PKRT.</p> <p>b. Database jumlah Industri Obat Tradisional (IOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Kosmetika, dari Dit Penilaian OT, SM, dan Kos.</p> <p>c. Database jumlah sarana produksi Rokok dari Dit. Was NAPZA</p> <p>d. Database jumlah Industri pangan Olahan dari Dit. Insert Pangan.</p> <p>e. Database IRTP tiap balai diperoleh dari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BTPSP) atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.</p> <p>f. Pengumpulan data kinerja diperoleh dari Laporan berkala Balai melalui SIPT.</p>	trivulanan dan setiap akhir tahun	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	Ya. Indikator Sasaran Kegiatan pada Matriks Renstra BPOM.
						$\frac{\text{Jumlah Sarana Produksi yang ada di periksa}}{\text{Jumlah sarana produksi yang ada di wilayah}} \times 100\%$		

Matrik Kamus Indikator Review Renstra BPOM di Denpasar 2015-2019

INDIKATOR	KONSEP DAN DEFINISI	SASARAN	SATUAN	SUMBER DATA (BASELINE 2014)	MEKANISME PENGUMPULAN DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA (REALISASI)	METODE PERHITUNGAN	TERCANTUM PADA RENSTRA KL (YA/TIDAK)
	<p>d. Untuk penetapan target sarana produksi pangan MD dan IRTP yang diperiksa mengikuti ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - untuk balai yang memiliki sarana produksi MD <51, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 100%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksi IRTP - untuk balai yang memiliki sarana produksi MD 51-100, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 90%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksi IRTP - untuk balai yang memiliki sarana produksi MD 101-150, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 80%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksi IRTP - untuk balai yang memiliki sarana produksi MD >150, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 70%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksi IRTP 							

Matrik Kamus Indikator Review Renstra BPOM di Denpasar 2015-2019

INDIKATOR	KONSEP DAN DEFINISI	SASARAN	SATUAN	SUMBER DATA (BASELINE 2014)	MEKANISME PENGUMPULAN DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA (REALISASI)	METODE PERHITUNGAN	TERCANTUM PADA RENSTRA KL (YAITIDAK)
4 Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	<p>a. Sarana Distribusi Obat dan Makanan terdiri atas: Jumlah sarana distribusi Obat (PBF dan Instalasi Farmasi Pemerintah) dan sarana Pelayanan Kesehatan (Apotek, Toko Obat Berizin, Klinik, Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Puskesmas), klinik kecantikan, spa, salon, pengobat tradisional, toko jamu, depot jamu, stokis MLM, Toko Modern (Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket), Toko Grosir, Toko Tradisional (Toko P & D dan Kios), Importir (termasuk importir terdaftar bahan berbahaya), distributor dan pengecer yang memiliki SIUP-B2, baik perusahaan induk maupun perusahaan cabang.</p> <p>b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Pedoman Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan serta Pedoman Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya.</p> <p>c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin.</p>	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	%	Laporan SIPT	<p>a. Pengumpulan database sarana distribusi tiap balai diperoleh dari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) atau Dinas Terkait.</p> <p>b. Pengumpulan data kinerja diperoleh dari Laporan berkala Balai melalui SIPT.</p>	<p>trivulanan dan setiap akhir tahun</p> <p><i>Jumlah Saran Distribusi yang di periksa</i> <i>jumlah sarana Distribusi yang ada di wilayah</i> X100%</p>	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	Ya. Indikator Sasaran Kegiatan pada Matriks Renstra BPOM.

Matrik Kamus Indikator Review Renstra BPOM di Denpasar 2015-2019

INDIKATOR	KONSEP DAN DEFINISI	SASARAN	SATUAN	SUMBER DATA (BASELINE 2014)	MEKANISME PENGUMPULAN DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA (REALISASI)	METODE PERHITUNGAN	TERCANTUM PADA RENSTRA KL (YAITIDAK)
5 Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	<p>a. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus.</p> <p>b. Jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS</p>	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	jumlah	LAPTAH Balai dan PUSDIK 2014	Jumlah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang telah diterbitkan	setiap tahun	Diukur berdasarkan jumlah perkara yang ditangani dan telah diterbitkan SPDP	Ya. Indikator Sasaran Kegiatan pada Matriks Renstra BPOM.

Matrik Kamus Indikator Review Renstra BPOM di Denpasar 2015-2019

INDIKATOR	KONSEP DAN DEFINISI	SASARAN	SATUAN	SUMBER DATA (BASELINE 2014)	MEKANISME PENGUMPULAN DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA (REALISASI)	METODE PERHITUNGAN	TERCANTUM PADA RENSTRA KL (YA/TIDAK)
6 Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	<p>a. Standar yang dimaksud adalah standar sarana prasarana kerja dan standar alat laboratorium (sesuai GLP)</p> <p>b. Pemenuhan sarana dan prasarana kerja dihitung dari sarana dan prasarana kerja yang dimiliki sesuai laporan BMN dalam keadaan baik dan rusak ringan dibandingkan dengan standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Standar Sarana dan Prasarana kerja meliputi standar Luas bangunan, Meubelair, dan Alat Pengolah Data (APD)</p> <p>d. Untuk meubelair dihitung dari inventarisasi pemenuhan kursi dan meja</p> <p>e. Pemenuhan standar alat laboratorium dihitung dari jumlah dan jenis alat laboratorium utama sesuai Keputusan Kepala BPOM No.04.1.71.07.14.4437 Tahun 2014 tentang Standar Minimal Peralatan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM yang telah ditetapkan untuk masing-masing balai.</p>	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	%	Laporan BMN Akhir Tahun dan LAPTAH PPOMN	<p>a. Untuk pemenuhan sarana prasarana kerja dari Laporan BMN per SATKER dari hasil Rekonsiliasi dengan KPNL</p> <p>b. Untuk pemenuhan alat laboratorium dari Laporan BB/BPOM</p>	Setiap tahun	<p>a. Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja (X1)</p> $\frac{\text{Sarana dan Prasarana yang dimiliki}}{\text{Standar yang ditetapkan}} \times 100\%$ <p>b. Persentase pemenuhan alat laboratorium (X2)</p> $\frac{\text{Alat Laboratorium yang dimiliki}}{\text{Standar yang ditetapkan}} \times 100\%$ <p>c. Persentase pemenuhan sarana prasarana balai</p> $\frac{(X1 + X2)}{100\%}$	Ya. Indikator Sasaran Kegiatan pada Matriks Renstra BPOM.

Matrik Kamus Indikator Review Renstra BBPOM di Denpasar 2015-2019

INDIKATOR	KONSEP DAN DEFINISI	SASARAN	SATUAN	SUMBER DATA (BASELINE 2014)	MEKANISME PENGUMPULAN DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA (REALISASI)	METODE PERHITUNGAN	TERCANTUM PADA RENSTRA KL (YA/TIDAK)
7 Jumlah layanan publik BB/BPOM	<p>a. Layanan publik terdiri dari Layanan informasi, Layanan Sertifikasi, dan layanan pengujian pihak ketiga</p> <p>Layanan Informasi diukur berdasarkan jenis dan frekuensi layanan informasi dan tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM baik penyuluhan langsung atau melalui media cetak/media elektronik/media sosial</p> <p>c. Jenis layanan Informasi antara lain: Talkshow, Pameran, Penyuluhan, Bimtek, Iklan layanan masyarakat, layanan informasi, tindak lanjut pengaduan, BBPOM sebagai Narasumber</p> <p>d. Untuk Talkshow, Pameran, Penyuluhan, Bimtek, Iklan layanan masyarakat, layanan informasi targetnya frekuensi Untuk tindak lanjut pengaduan targetnya jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti</p> <p>e. Layanan Sertifikasi dihitung dari rekomendasi/surat hasil audit yang dikeluarkan atas permintaan pelaku usaha industri pangan MD; audit sertifikasi dalam rangka rekomendasi halal, pemenuhan pendirian PBF, IKOT, UMO, Kosmetik; SKI/SKE yang diterbitkan</p> <p>f. Layanan pengujian sampel pihak ketiga dihitung dari Laporan Hasil Uji sampel pihak ketiga</p>	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah	N/A	<p>a. Untuk Layanan Informasi dan pengaduan dari Laporan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) balai</p> <p>b. Untuk layanan sertifikasi dari Laporan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) balai</p>	Triwulan dan setiap akhir tahun	<p>Jumlah layanan publik BBPOM</p> <p>Contoh Penghitungan Kinerja:</p> <p>*Pameran : 1 kali event, dihitung 1 kali kegiatan/layanan</p> <p>*Talk Show : 1 kali event, dihitung 1 kali kegiatan/layanan</p> <p>*Layanan Konsumen : 1 konsumen, dihitung 1 kegiatan/layanan</p> <p>Dalam hal Layanan pengujian sampel pihak ketiga harus memperhitungkan jumlah layanan pihak ke-3 yang masuk dan juga memperhitungkan anggaran penggunaan Reagensia dan Media Mikrobiologi</p> <p>(Catatan : ISO 17025 Penerimaan dan Penyerahan hasil Uji sampel Pihak ke-3 dilakukan oleh Tata Usaha (Petugas PNBPP))</p>	Ya. Indikator Sasaran Kegiatan pada Matriks Renstra BPOM.

Matrik Kamus Indikator Review Renstra BPOM di Denpasar 2015-2019

INDIKATOR	KONSEP DAN DEFINISI	SASARAN	SATUAN	SUMBER DATA (BASELINE 2014)	MEKANISME PENGUMPULAN DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA (REALISASI)	METODE PERHITUNGAN	TERCANTUM PADA RENSTRA KL (YA/TIDAK)
8 Jumlah Komunitas yang diberdayakan	<p>a. Komunitas adalah gabungan dari kelompok orang di desa/sekolah/kelurahan/pasar yang diberdayakan Program Pengawasan Obat dan Makanan.</p> <p>b. Satu desa/sekolah/kelurahan/pasar dihitung sebagai satu komunitas</p> <p>Jenis pemberdayaan diatur dalam Pedoman/Juknis terkait. Ct: Untuk komunitas pasar: - Target komunitas pasar (Kumulatif) : 2016 (108); 2017 (139) ; 2018 (170); 2019 (201) - Baseline 2013 (62); 2014 (77); 2015 (77) - Target komunitas desa kumulatif</p>	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah	- Untuk komunitas pasar dari Laporan Kinerja Dit. Was P dan BB 2014 dan Lap. Kin Dit. SPKP Tahun 2014	- Untuk komunitas pasar dari laporan pelaksanaan program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya setiap balai dan Laporan kinerja Dit. Was Produk dan BB - Untuk komunitas desa aman dari Laporan Kinerja Balai dan Dit. SPKP - Untuk Komunitas lainnya dari Laporan Kinerja Balai	Triwulan dan setiap akhir tahun	Dihitung dari jumlah kumulatif komunitas yang diberdayakan. **Kegiatan Sampling P JAS Rapid Test menggunakan Mobling di luar Target Desa GKPD *KIE di Sekolah yang masuk dalam target Desa GKPD maka komunitas masuk dalam kegiatan Gerakan Keamanan Pangan Desa *Contoh Penghitungan Komunitas : a. Tahun 2014 : 3 Pasar, tahun 2015 : 2 Pasar b. Tahun 2014 : 12 Desa, tahun 2015 : 3 Desa Baseline : 15 Komunitas Tahun 2016 : 20 Komunitas Untuk Tahun berikutnya adalah sesuai Target yang ditetapkan kumulatif dengan adanya Pengawalan	Ya. Indikator Sasaran Kegiatan pada Matriks Renstra BPOM.

Matrik Kamus Indikator Review Renstra BPOM di Denpasar 2015-2019

INDIKATOR	KONSEP DAN DEFINISI	SASARAN	SATUAN	SUMBER DATA (BASELINE 2014)	MEKANISME PENGUMPULAN DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA (REALISASI)	METODE PERHITUNGAN	TERCANTUM PADA RENSTRA KL (YA/TIDAK)
9 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	<p>Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dihasilkan dan harus dilaporkan Balai, meliputi dokumen berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Renstra/review renstra,*) - Perjanjian Kinerja tahun berjalan (n), - RKAKL/DJPA tahun n+1 - Laporan Kinerja tahun n-1, - Laporan triwulanan I - Laporan triwulanan II - Laporan triwulanan III - Laptah tahun n-1, - Laporan keuangan tahun n-1, - Laporan Keuangan Semester 1 tahun n, <p>Ket: *) hanya menjadi target pada tahun 2015, 2017, dan 2019 Renstra: 2015 Review Renstra: 2017 dan 2019</p>	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah	Laporan Kinerja Balai 2014	Laporan Kinerja	triwulanan dan setiap akhir tahun	diukur berdasarkan jumlah dokumen yang dihasilkan dan dilaporkan Balai	Ya. Indikator Sasaran Kegiatan pada Matriks Renstra BPOM.

RENCANA KINERJA TAHUN 2017
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,00%
		2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	82,00%
		3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91,00%
		4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81,00%
		5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,10%
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat.	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	81,00%
		2. Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	5
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar Oleh Badan POM RI	A (80-90)
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3500
		2. Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	100,00%
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	25
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standard	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	25
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	10
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1. Jumlah layanan publik BB/BPOM	1200
		2. Jumlah komunitas yang diberdayakan	23
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai BPOM			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	78,00%
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10

Kegiatan
 Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Denpasar

Anggaran
 Rp. 33.040.159.000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. Endang Widowati, Apt
Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P
Jabatan : Kepala Badan POM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Badan POM

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P
NIP. 19631109 199003 2 001

Denpasar, 6 Januari 2017
Pihak Pertama

Dra. Endang Widowati, Apt
NIP. 19570905 198903 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,00
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	82,00
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91,00
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,10
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	81,00
		Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	5
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	Nilai SAKIP BB/POM dari Badan POM	A
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3.490
		Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	25
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	25
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	11
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/BPOM	1200
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	23
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan			
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	78
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10

Kegiatan

1. Pengawasan Obat dan Makanan

Anggaran :

Rp 33.040.159.000

Denpasar, 6 Januari 2017
Kepala BBPOM di Denpasar


 Kepala Badan POM
 Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P
 NIP. 19631109 199003 2 001


 Dra. Endang Widowati, Apt
 NIP. 19570905 198903 2 001

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR
TAHUN 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	TARGET (kumulatif)					REALISASI (kumulatif)				
				B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12		
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00						
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00						
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00						
		Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00						
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,10	89,10	89,10	89,10	89,10						
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00						
		Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	5	1	2	4	5						
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	Nilai SAKIP BB/POM dari Badan POM	A	A	A	A	A						

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	TARGET (kumulatif)					REALISASI (kumulatif)		
				B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12
Mengutamakan sistem pengawasan Obat dan Makanan											
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	3490 100	593 30	1606 60	2658 90	3490 100				
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	25	6	14	19	25				
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	25	6	12	18	25				
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	11	2	5	8	11				
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat											
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/BPOM Jumlah komunitas yang diberdayakan	1200 23	300 0	600 5	900 18	1200 23				
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan											
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	78	-	-	-	78				
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	4	5	8	10				



Kepala Badan POM
 Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P
 NIP. 19631109-199003 2 001



Denpasar, 6 Januari 2017
 Kepala BBPOM di Denpasar
 Dra. Endang Widowati, Apt
 NIP. 19570905-198903 2 001

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR**

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,00%	98,14%	105,53%
		2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	82,00%	74,19%	90,48%
		3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91,00%	95,45%	104,89%
		4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81,00%	93,18%	115,04%
		5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,10%	94,36%	105,90%
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	81,00%	84,34%	104,12%
		2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	5	6	120,00%
3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP dari BPOM	A (80 - 90)	BB (73,14)	91,43%
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan					
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3.490	3.500	100,29%
		2. Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	100,00%	100,00%	100,00%
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan	25,00%	24,86%	99,44%
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	25,00%	25,74%	102,96%
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	11	9	81,82%
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat					
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1. Jumlah layanan Publik BBPOM di Denpasar	1.200	1.406	117,17%
		2. Jumlah Komunitas yang diberdayakan	23	25	108,70%
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai BPOM					
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana sesuai standar	78,00%	81,41%	104,37%
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	10	100,00%

**PENGUKURAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
BALAI BESAR POM DI DENPASAR
TAHUN 2017**

SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%	
MENINGKATNYA KUALITAS SAMPLING DAN PENGUJIAN TERHADAP PRODUK OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR	1.01	PENYUSUNAN PERENCANAAN SAMPLING (OBAT KB)	<u>Input</u> : Dana	915,000	915,000	100.00
			<u>Output</u> : Jumlah peserta yang mengikuti penyusunan perencanaan sampling	15	15	100.00
	1.02	PENGADAAN SAMPEL	<u>Input</u> : Dana	10,013,000	4,972,200	49.66
			<u>Output</u> : Jumlah Sampel yang diadakan	42	42	100.00
	1.03	PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL OBAT KB	<u>Input</u> : Dana	6,678,000	6,646,000	99.52
			<u>Output</u> : Jumlah Sampel yang diuji	42	42	100.00
	1.04	EVALUASI PENGUJIAN	<u>Input</u> : Dana	915,000	915,000	100.00
			<u>Output</u> : Jumlah Dokumen Rapat Evaluasi	1	1	100.00
	1.05	PENYUSUNAN PERENCANAAN SAMPLING (OBAT)	<u>Input</u> : Dana	1,220,000	1,220,000	100.00
			<u>Output</u> : Jumlah peserta yang mengikuti penyusunan perencanaan sampling	20	20	100.00
	1.06	PENGADAAN SAMPEL	<u>Input</u> : Dana	515,197,000	450,902,692	87.52
			<u>Output</u> : Jumlah Sampel yang diadakan	2,415	2,415	100.00
	1.07	PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL OBAT, OT, KOSMETIKA DAN SUPLEMEN KESEHATAN	<u>Input</u> : Dana	622,631,000	615,885,574	98.92
			<u>Output</u> : Jumlah sampel yang diuji	2,457	2,457	100.00
	1.08	EVALUASI PENGUJIAN	<u>Input</u> : Dana	1,220,000	1,220,000	100.00
			<u>Output</u> : Jumlah Dokumen Rapat Evaluasi	1	1	100.00
	1.09	PENYUSUNAN PERENCANAAN SAMPLING (MAKANAN)	<u>Input</u> : Dana	1,220,000	1,220,000	100.00
			<u>Output</u> : Jumlah peserta yang mengikuti penyusunan perencanaan sampling	20	20	100.00
1.10	PENGADAAN SAMPEL	<u>Input</u> : Dana	249,413,000	176,475,066	70.76	
		<u>Output</u> : Jumlah Sampel yang diadakan	1,043	1,043	100.00	
1.11	PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL PANGAN DAN KEMASAN PANGAN	<u>Input</u> : Dana	432,787,000	429,121,160	99.15	
		<u>Output</u> : Jumlah sampel yang diuji	1,043	1,043	100.00	

SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%	
	1.12	EVALUASI PENGUJIAN	Input : Dana	1,220,000	1,220,000	100.00
			Output : Jumlah Dokumen Rapat Evaluasi	1	1	100.00
	1.13	PENINGKATAN SISTEM MUTU LABORATORIUM	Input : Dana	19,188,000	19,176,900	99.94
			Output : Jumlah kegiatan peningkatan sistem mutu laboratorium	4	4	100.00
	1.14	KALIBRASI ALAT LABORATORIUM	Input : Dana	70,918,000	70,895,950	99.97
			Output : Jumlah kegiatan kalibrasi yang dilakukan	1	1	100.00
	1.15	VERIFIKASI VOLUMETRIK INTERNAL DAN CEK ANTARA TIMBANGAN	Input : Dana	3,480,000	3,480,000	100.00
			Output : Jumlah kegiatan verifikasi yang dilakukan	1	1	100.00
	1.16	VERIFIKASI METODE ANALISA	Input : Dana	190,367,000	188,039,800	98.78
			Output : Jumlah kegiatan verifikasi metode analisa yang dilakukan	62	62	100.00
	1.17	AUDIT INTERNAL SISTEM MUTU OLEH KJM DI DENPASAR	Input : Dana	7,584,000	7,584,000	100.00
			Output : Terlaksananya audit internal sistem mutu	1	1	100.00
	1.18	REASESMEN 31 BB/BPOM DAN SOSIALISASI PEDOMAN GLP	Input : Dana	9,840,000	9,840,000	100.00
			Output : Terlaksananya reasesmen 31 BB/BPOM dan sosialisasi pedoman GLP	1	1	100.00
	1.19	PEMERIKSAAN RUTIN ALAT LABORATORIUM	Input : Dana	106,435,000	106,298,984	99.87
			Output : Paket pemeliharaan rutin alat laboratorium	1	1	100.00
	1.20	PENYELENGGARAAN LABORATORIUM	Input : Dana	220,972,000	220,924,024	99.98
			Output : Terselenggaranya kegiatan laboratorium	1	1	100.00
	1.21	PENGADAAN INSTRUMEN DAN GRAFIT TUBE	Input : Dana	162,250,000	158,384,999	97.62
			Output : Jumlah paket Pengadaan Instrumen dan Grafit Tube	1	1	100.00
1.22	PENGADAAN ALAT GELAS	Input : Dana	93,016,000	92,990,000	99.97	
		Output : Jumlah paket alat gelas yang diadakan	1	1	100.00	

SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%	
	1.23	PENGADAAN SUKU CADANG	<u>Input :</u> Dana	741,504,000	741,503,438	100.00
			<u>Output :</u> Jumlah paket suku cadang yang diadakan	1	1	100.00
	1.24	PENGADAAN BUFFER STOCK	<u>Input :</u> Dana	115,800,000	115,043,610	99.35
			<u>Output :</u> Jumlah paket buffer stock yang diadakan	1	1	100.00
	1.25	PENGEMBANGAN BAKU PEMBANDING NASIONAL TH. 2017	<u>Input :</u> Dana	13,802,000	13,800,000	99.99
			<u>Output :</u> Jumlah kegiatan pengembangan baku pembanding Nasional th. 2017	1	1	100.00
	1.26	PEMBAHASAN HASIL UJI KOLABORASI BAKU PEMBANDING DI JAKARTA	<u>Input :</u> Dana	6,284,000	5,226,500	83.17
			<u>Output :</u> Jumlah peserta yang mengikuti pembahasan baku pembanding	1	1	100.00
	1.27	SEMINAR ILMIAH DAN FORUM DISEMINASI HASIL RISET	<u>Input :</u> Dana	9,360,000	9,351,200	99.91
			<u>Output :</u> Jumlah peserta seminar ilmiah dan forum diseminasi hasil riset	1	1	100.00
	1.28	KAJI ULANG MANAJEMEN DAN TEKNIS LABORATORIUM	<u>Input :</u> Dana	4,920,000	4,920,000	100.00
			<u>Output :</u> Kegiatan kaji ulang dan teknis yang dilakukan	1	1	100.00
	1.29	KAJI ULANG DOKUMEN SISTEM MUTU	<u>Input :</u> Dana	8,340,000	8,340,000	100.00
			<u>Output :</u> Jumlah peserta kaji ulang dokumen sistem mutu	45	45	100.00
	1.30	EVALUASI TEKNIS PENGUJIAN MELALUI UJI PROFISIENSI/UJI BANDING DAN UJI PETIK DI BBPOM/BPOM	<u>Input :</u> Dana	112,600,000	112,388,000	99.81
			<u>Output :</u> Jumlah kegiatan evaluasi teknis pengujian melalui uji profisiensi/uji banding dan uji petik di BBPOM/BPOM	10	10	100.00
	1.31	PENGEMBANGAN METODE ANALISIS	<u>Input :</u> Dana	63,800,000	57,119,000	89.53
			<u>Output :</u> Jumlah kegiatan pengembangan metode analisis	5	5	100.00
1.32	FORUM DISKUSI PENINGKATAN TEKNIS PENGUJIAN LABORATORIUM BADAN POM DI JAKARTA	<u>Input :</u> Dana	27,445,000	25,644,849	93.44	
		<u>Output :</u> Jumlah peserta forum diskusi teknis pengujian laboratorium	5	5	100.00	

SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%	
	1.33	PENGADAAN MAKANAN MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH PNS	<u>Input :</u> Dana	188,100,000	188,100,000	100.00
			<u>Output :</u> Jumlah pegawai yang ditingkatkan daya tahan tubuhnya	55	55	100.00
	1.34	PERTEMUAN TEKNIS KAN	<u>Input :</u> Dana	4,972,000	4,971,700	99.99
			<u>Output :</u> Jumlah peserta pertemuan teknis KAN	1	1	100.00
	1.35	REAKREDITASI LABORATORIUM	<u>Input :</u> Dana	50,116,000	50,052,200	99.87
			<u>Output :</u> Jumlah peserta yang mengikuti reakreditasi laboratorium	45	45	100.00
	1.36	TINDAKAN PERBAIKAN HASIL REAKREDITASI	<u>Input :</u> Dana	37,486,000	32,961,300	87.93
			<u>Output :</u> Jumlah dokumen tindakan hasil perbaikan reakreditasi	1	1	100.00
	1.37	PEMERIKSAAN KESEHATAN RISIKO PEKERJAAN	<u>Input :</u> Dana	144,000,000	143,149,900	99.41
			<u>Output :</u> Jumlah peserta yang mengikuti pemeriksaan kesehatan risiko pekerjaan	71	71	100.00
	1.38	PENGAMANAN MAKANAN TAMU NEGARA	<u>Input :</u> Dana	132,165,000	124,063,000	93.87
			<u>Output :</u> Kegiatan pemantauan pengamanan makanan tamu negara yang dilakukan	1	1	100.00
	1.39	KEGIATAN QMS ISO 9001	<u>Input :</u> Dana	32,400,000	30,000,000	92.59
			<u>Output :</u> Jumlah kegiatan QMS ISO 9001	54	50	92.59
	1.40	PELATIHAN ANALISIS DI PPOM	<u>Input :</u> Dana	57,366,000	53,643,296	93.51
			<u>Output :</u> Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan analisis di PPOM	6	6	100.00
	1.41	BIMBINGAN TEKNIS JAMINAN MUTU HASIL PENGUJIAN	<u>Input :</u> Dana	38,706,000	38,703,600	99.99
			<u>Output :</u> Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis jaminan mutu hasil pengujian	45	45	100.00
	1.42	MAGANG DALAM RANGKA PENINGKATAN KOMPETENSI PENGUJI DI LAB	<u>Input :</u> Dana	159,973,000	129,417,899	80.90
			<u>Output :</u> Jumlah peserta magang dalam rangka peningkatan kompetensi penguji di laboratorium	15	14	93.33
1.43	PELATIHAN SISTEM MUTU	<u>Input :</u> Dana	336,232,000	253,707,800	75.46	
		<u>Output :</u> Jumlah peserta pelatihan sistem mutu	30	28	93.33	

SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%	
	1.44	PELATIHAN INTERNAL PENGUJIAN TERANOKOKO	<u>Input</u> : Dana	147,466,000	143,275,450	97.16
			<u>Output</u> : Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan internal pengujian Teranokoko	42	42	100.00
	1.45	PELATIHAN INTERNAL PENGUJIAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA	<u>Input</u> : Dana	40,264,000	39,275,723	97.55
			<u>Output</u> : Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan internal pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya	15	15	100.00
	1.46	PELATIHAN INTERNAL PENGUJIAN MIKROBIOLOGI	<u>Input</u> : Dana	40,408,000	40,406,200	100.00
			<u>Output</u> : Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan internal pengujian Mikrobiologi	10	10	100.00
	1.47	PENINGKATAN KOMPETENSI SDM DALAM RANGKA RANGKA RB	<u>Input</u> : Dana	61,950,000	61,920,000	99.95
			<u>Output</u> : Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi SDM dalam rangka RB	1	1	100.00
	1.48	IN HOUSE TRAINING/DISEMINASI HASIL PELATIHAN/PERTEMUAN	<u>Input</u> : Dana	49,200,000	47,880,000	97.32
			<u>Output</u> : Jumlah kegiatan in house training/diseminasi hasil pelatihan/pertemuan	82	83	101.22
	1.49	KOORDINASI ANTAR BALAI DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA ADMINISTRASI PENGUJIAN	<u>Input</u> : Dana	44,414,000	39,460,100	88.85
			<u>Output</u> : Jumlah peserta koordinasi antar balai dalam rangka peningkatan kinerja administrasi pengujian	1	1	100.00
1.50	KOORDINASI DALAM RANGKA ADMINISTRASI	<u>Input</u> : Dana	6,814,000	5,699,900	83.65	
		<u>Output</u> : Jumlah peserta koordinasi dalam rangka administrasi	1	1	100.00	
MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PRODUKSI YANG MEMENUHI STANDAR	2.01	PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA) DI PROVINSI BALI	<u>Input</u> : Dana	16,400,000	16,028,000	97.73
			<u>Output</u> : Jumlah sarana yang diperiksa	64	67	104.69
	2.02	PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BALAI (DILUAR KOTA) DI PROVINSI BALI	<u>Input</u> : Dana	127,084,000	126,011,800	99.16
			<u>Output</u> : Jumlah sarana yang diperiksa	142	151	106.34
	2.03	DISEMINASI HASIL PELATIHAN	<u>Input</u> : Dana	9,000,000	9,000,000	100.00
			<u>Output</u> : jumlah kegiatan	6	6	100.00
	2.04	BIMBINGAN TEKNIS PENGAWASAN PEREDARAN OT DAN SM DI JAKARTA	<u>Input</u> : Dana	6,284,000	5,667,600	90.19
			<u>Output</u> : jumlah peserta	1	1	100.00

SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%	
	2.05	BIMBINGAN TEKNIS CPOTB TOPIK KHUSUS DI JAKARTA	Input : Dana	2,280,000	1,810,000	79.39
			Output : jumlah peserta	2	2	100.00
	2.06	JOINT INSPECTION DI SEMARANG	Input : Dana	6,360,000	5,904,472	92.84
			Output : jumlah peserta	1	1	100.00
MENINGKATNYA KUALITAS SARANA DISTRIBUSI YANG	3.01	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA) DI PROP. BALI	Input : Dana	46,732,000	46,303,900	99.08
			Output : Jumlah sarana yang diperiksa	228	235	103.07
	3.02	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BALAI (DI LUAR KOTA) DI PROV. BALI	Input : Dana	405,028,000	403,729,000	99.68
			Output : Jumlah sarana yang diperiksa	627	641	102.23
	3.03	PENGAWASAN PENANDAAN OBAT DAN MAKANAN	Input : Dana	38,914,000	31,609,842	81.23
			Output : jumlah penandaan yang diawasi	2,845	3,378	118.73
	3.04	PENGAWASAN PERIKLAMAN OBAT DAN MAKANAN	Input : Dana	33,673,000	33,424,800	99.26
			Output : jumlah iklan yang diawasi	1,697	1,697	100.00
	3.05	PENGAWASAN DALAM RANGKA INTENSIFIKASI / AKSI PENERTIBAN KOSMETIKA ILEGAL DAN TMS	Input : Dana	97,380,000	93,785,000	96.31
			Output : jumlah laporan intensifikasi	20	20	100.00
	3.06	PENGAWASAN DALAM RANGKA TINDAK LANJUT PENGADUAN KONSUMEN	Input : Dana	36,920,000	28,466,000	77.10
			Output : kegiatan tindak lanjut pengaduan konsumen	1	1	100.00
	3.07	KOORDINASI PENGAWASAN LINTAS SEKTOR	Input : Dana	15,181,000	13,573,000	89.41
Output : jumlah laporan kegiatan			34	32	94.12	
3.08	SOSIALISASI PERATURAN DIBIDANG DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN	Input : Dana	31,710,000	31,563,500	99.54	
		Output : jumlah peserta	70	70	100.00	
3.09	RAPAT KONSULTASI NASIONAL PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN SUPLEMEN MAKANAN	Input : Dana	7,364,000	7,177,600	97.47	
		Output : jumlah peserta	1	1	100.00	
3.10	EVALUASI EFEKTIVITAS UPAYA/AKSI PENERTIBAN KOSMETIKA ILEGAL DAN TMS DI JAKARTA	Input : Dana	2,280,000	2,085,000	91.45	
		Output : jumlah peserta	1	1	100.00	
3.11	KONSULTASI PENGAWASAN	Input : Dana	39,770,000	36,375,000	91.46	
		Output : jumlah peserta	5	5	100.00	
3.12	BIMBINGAN TEKNIS INSPEKTUR SENIOR (TANGERANG)	Input : Dana	4,352,000	3,144,000	72.24	
		Output : jumlah peserta	2	2	100.00	
3.13	COACHING CLINIC	Input : Dana	4,980,000	4,975,000	99.90	
		Output : jumlah peserta	30	30	100.00	

SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
MENINGKATNYA HASIL TINDAK LANJUT PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN OBAT DAN MAKANAN	4.01 PENGUMPULAN BAHAN KETERANGAN, VERIFIKASI INFORMASI DAN RENCANA INVESTIGASI AWAL (DK)	Input : Dana	1,830,000	1,830,000	100.00
		Output : Jumlah Laporan	6	6	100.00
		4.02 PELAKSANAAN INVESTIGASI AWAL (DK)	Input : Dana	50,760,000	48,220,000
	4.03 EVALUASI INVESTIGASI AWAL, GELAR KASUS DAN PELAPORAN HASIL INVESTIGASI (DK)	Output : Jumlah Laporan	48	48	100.00
		Input : Dana	2,196,000	2,196,000	100.00
	4.04 RAPAT PEMBAHASAN RENCANA PENYIDIKAN, SKENARIO PENINDAKAN DAN OLAH TKP (DK)	Output : Jumlah Laporan	6	6	100.00
		Input : Dana	2,196,000	2,196,000	100.00
	4.05 PENINDAKAN (DK)	Output : Jumlah Laporan	6	6	100.00
		Input : Dana	10,137,000	9,775,000	96.43
		Output : Jumlah Laporan	9	9	100.00
	4.06 OPERASI KHUSUS (DK)	Input : Dana	4,620,000	2,250,000	48.70
		Output : Jumlah Laporan	3	3	100.00
		4.07 PEMBERKASAN (DK)	Input : Dana	36,570,000	19,056,900
	4.08 PENGUMPULAN BAHAN KETERANGAN, VERIFIKASI INFORMASI DAN RENCANA INVESTIGASI AWAL (LK)	Output : Jumlah Perkara	3	4	133.33
		Input : Dana	2,440,000	2,440,000	100.00
	4.09 PELAKSANAAN INVESTIGASI AWAL (LK)	Output : Jumlah Laporan	8	8	100.00
		Input : Dana	298,400,000	244,903,350	82.07
		Output : Jumlah Laporan	40	40	100.00
	4.10 EVALUASI INVESTIGASI AWAL, GELAR KASUS DAN PELAPORAN HASIL INVESTIGASI (LK)	Input : Dana	2,928,000	2,562,000	87.50
		Output : Jumlah Laporan	8	7	87.50
4.11 RAPAT PEMBAHASAN RENCANA PENYIDIKAN, SKENARIO PENINDAKAN DAN OLAH TKP (LK)		Input : Dana	2,928,000	1,830,000	62.50
4.12 PENINDAKAN (LK)	Output : Jumlah Laporan	8	5	62.50	
	Input : Dana	163,374,000	123,769,500	75.76	
	Output : Jumlah Laporan	16	15	93.75	
4.13 OPERASI KHUSUS (LK)	Input : Dana	38,720,000	15,100,000	39.00	
	Output : Jumlah Laporan	4	2	50.00	
	4.14 KONSULTASI DAN PENAMBAHAN WAWASAN PENYIDIKAN DI YOGYAKARTA	Input : Dana	39,258,000	30,252,000	77.06
4.15 PEMBERKASAN (LK)	Output : Jumlah OT	6	6	100.00	
	Input : Dana	212,160,000	49,289,000	23.23	
	Output : Jumlah Perkara	8	5	62.50	
4.16 PERTEMUAN PERKUATAN PEMANTAPAN OPERASI PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN (PALEMBANG)	Input : Dana	7,186,000	5,268,045	73.31	
	Output : Jumlah OT	1	1	100.00	

SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
4.17	PERTEMUAN PENINGKATAN KINERJA, PROFESIONALISME DAN KOORDINASI PPNS BADAN POM (YOGYAKARTA)	Input : Dana	10,898,000	9,573,999	87.85
		Output : Jumlah OT	2	2	100.00
4.18	PERTEMUAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA OBAT DAN MAKANAN	Input : Dana	38,122,000	-	-
		Output : Jumlah Laporan	4	-	-
4.19	PEMUSNAHAN OMKABA TMK	Input : Dana	10,638,000	10,615,000	99.78
		Output : Jumlah Laporan	1	1	100.00
4.20	PERJALANAN DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM	Input : Dana	20,260,000	12,702,000	62.69
		Output : Jumlah Laporan	56	38	67.86
4.21	ADVOKASI PENEGAKAN HUKUM	Input : Dana	43,956,000	42,248,000	96.11
		Output : Jumlah Laporan	14	14	100.00
4.22	OPERASI INTENSIF PEMBERANTASAN OBAT DAN MAKANAN ILEGAL	Input : Dana	128,320,000	106,226,000	82.78
		Output : Kegiatan Operasi Intensif Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal	1	1	100.00
4.23	KONSULTASI DAN PENAMBAHAN WAWASAN PENYIDIKAN	Input : Dana	23,862,000	15,939,900	66.80
		Output : Jumlah OT	3	3	100.00
4.24	PENAMBAHAN WAWASAN PENYIDIKAN (BANJARMASIN)	Input : Dana	58,568,000	56,264,771	96.07
		Output : Jumlah OT	8	8	100.00
4.25	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN PPNS BADAN POM	Input : Dana	6,284,000	5,235,500	83.31
		Output : Jumlah OT	1	1	100.00
4.26	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INTELIJEN	Input : Dana	6,284,000	5,931,770	94.39
		Output : Jumlah OT	1	1	100.00
4.27	PENINGKATAN KOMPETENSI INVESTIGASI AWAL DAN PENYIDIKAN BBPOM	Input : Dana	13,500,000	12,707,000	94.13
		Output : Jumlah OT	20	20	100.00
4.28	IN HOUSE TRAINING PENYIDIKAN	Input : Dana	26,984,000	15,556,450	57.65
		Output : Jumlah OT	30	30	100.00
4.29	PENINGKATAN KOMPETENSI SDM DALAM RANGKA RB	Input : Dana	23,050,000	20,640,000	89.54
		Output : Jumlah OT	5	5	100.00
4.30	TRAINING PETUGAS PENGAWAS LINTAS SEKTOR	Input : Dana	55,678,000	54,784,800	98.40
		Output : Jumlah OT	20	20	100.00
4.31	PELATIHAN TEKNIK INSPEKSI CPOTB DI UNIT TRANSFUSI DARAH (UTP) DI JAKARTA	Input : Dana	5,064,000	4,921,000	97.18
		Output : Jumlah OT	1	1	100.00

SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%		
	5.01	AUDIT DALAM RANGKA PRASERTIFIKASI/SERTIFIKASI/REGISTRASI DAN HALAL	Input : Dana	83,020,000	71,057,200	85.59	
			Output : Jumlah Sarana yang diaudit	79	71	89.87	
	5.02	AUDIT SURVEILAN PENERIMA PIAGAM BINTANG KEAMANAN PANGAN (PBKP)	Input : Dana	27,542,000	27,516,800	99.91	
			Output : Jumlah Sarana yang diaudit	21	21	100.00	
	5.03	AUDIT SKI/SKI	Input : Dana	18,990,000	18,989,200	100.00	
			Output : Jumlah Sarana yang diaudit	16	16	100.00	
	MENINGKATNYA HASIL TINDAK LANJUT PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN OBAT DAN MAKANAN	5.04	ADVOKASI/KOORDINASI BBPOM KE LINTAS SEKTOR/STAKE HOLDER	Input : Dana	74,374,000	71,223,800	95.76
				Output : Kegiatan Advokasi yang dilakukan	1	1	100.00
		5.05	EVALUASI BIDANG SERLIK	Input : Dana	4,200,000	3,300,000	78.57
Output : Jumlah Rapat Bidang Serlik				7	6	85.71	
5.06		AUDIT CALON DAN SURVEILAN PENERIMA PIAGAM BINTANG KEAMANAN PANGAN KANTIN SEKOLAH (PBKP-KS)	Input : Dana	19,136,000	18,839,600	98.45	
			Output : Jumlah Sarana yang diaudit	29	29	100.00	
5.07		OPERASIONAL SENTRA INFORMASI KERACUNAN (SIKER) DAN SURVEILAN KLB KERACUNAN	Input : Dana	44,634,000	44,634,000	100.00	
			Output : Jumlah RS yang melaporkan Kasus Keracunan dari 9 Kab/kota	18	18	100.00	
5.08		PAMERAN PEMBANGUNAN 17 AGUSTUS BBPOM DI DENPASAR	Input : Dana	109,150,000	108,308,400	99.23	
			Output : Jumlah kegiatan	1	1	100.00	
5.09		PENYEBARAN INFORMASI PRODUK OBAT DAN MAKANAN	Input : Dana	226,096,000	222,816,000	98.55	
			Output : Jumlah Kegiatan	18	18	100.00	
5.10		KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN KOMUNITAS	Input : Dana	218,632,000	217,139,900	99.32	
			Output : Jumlah Kegiatan	14	17	121.43	
5.11		PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS SERLIK	Input : Dana	220,404,000	180,034,751	81.68	
			Output : Jumlah Petugas yang mengikuti kegiatan Kompetensi	22	22	100.00	
5.12	PELATIHAN MANAJEMEN/KEHUMASAN	Input : Dana	18,026,000	17,880,000	99.19		
		Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Kehumasan	30	30	100.00		
5.13	IN HOUSE TRAINING/DISEMINASI HASIL PELATIHAN/PERTEMUAN	Input : Dana	6,600,000	5,160,000	78.18		
		Output : Jumlah Kegiatan	6	5	83.33		
5.14	PENINGKATAN KOMPETENSI SDM DALAM RANGKA RB	Input : Dana	23,050,000	20,640,000	89.54		
		Output : Jumlah Peserta Peningkatan Kompetensi	5	5	100.00		
5.15	OPERASIONAL MOBIL LABORATORIUM KELILING	Input : Dana	544,402,000	523,037,149	96.08		
		Output : Jumlah Operasional Kegiatan	60	60	100.00		
5.16	PEMBERDAYAAN KOMUNITAS MASYARAKAT	Input : Dana	18,006,000	-	-		
		Output : Jumlah Kegiatan	-	-	-		

SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
	5.17 FORUM KOMITMEN GNPOPA	Input : Dana	15,710,000	15,710,000	100.00
		Output : Jumlah kegiatan	1	1	100.00
		5.18 RE-ORIENTASI KEAMANAN PANGAN	Input : Dana	59,220,000	59,205,000
	Output : Jumlah Kegiatan		1	1	100.00
	5.19 PERTEMUAN ADVOKASI KELEMBAGAAN DESA		Input : Dana	14,626,000	14,626,000
		Output : Jumlah Peserta	30	30	100.00
		5.20 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN USAHA PANGAN DESA DIBIDANG KEAMANAN PANGAN	Input : Dana	184,100,000	183,321,134
	Output : Jumlah Kegiatan		1	1	100.00
	5.21 BIMTEK KADER KEAMANAN PANGAN DESA		Input : Dana	62,098,000	60,877,000
		Output : Jumlah Peserta yang di Bimtek	50	50	100.00
		5.22 GAP ASSESMENT KEAMANAN PANGAN DESA	Input : Dana	20,069,000	20,069,000
	Output : Jumlah Desa yang dilakukan Gap Assesmen		3	3	100.00
	5.23 BIMTEK KOMUNITAS KEAMANAN PANGAN DESA		Input : Dana	142,377,000	142,304,000
		Output : Jumlah Peserta Bimtek Komunitas	300	300	100.00
		5.24 FASILITASI KEAMANAN PANGAN DESA	Input : Dana	20,069,000	20,069,000
	Output : Jumlah Desa yang dilakukan Fasilitasi		3	3	100.00
	5.25 OPERASIONAL KIE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		Input : Dana	295,338,000	279,841,100
		Output : Jumlah Operasional Kegiatan	52	52	100.00
		5.26 PERTEMUAN LINTAS SEKTOR PJAS KANTIN SEHAT	Input : Dana	151,185,000	142,960,800
	Output : Jumlah peserta		535	528	98.69
5.27 BIMTEK KIE PJAS KANTIN SEHAT	Input : Dana		323,450,000	308,396,750	95.35
	Output : Jumlah Kegiatan	3	3	100.00	
	5.28 SAMPLING DAN PENGUJIAN PRODUK PJAS KANTIN SEHAT	Input : Dana	238,100,000	212,731,750	89.35
Output : Jumlah Sekolah yang disampling		35	35	100.00	
5.29 BIMTEK PBKP-KS KANTIN SEHAT		Input : Dana	39,675,000	39,321,000	99.11
	Output : Jumlah kegiatan	1	1	100.00	
	5.30 PELATIHAN FASILITATOR KEAMANAN PANGAN SEKOLAH	Input : Dana	4,800,000	4,800,000	100.00
Output : Jumlah Fasilitator yang dilatih		50	50	100.00	
5.31 GERMAS SAPA		Input : Dana	78,032,000	75,000,000	96.11
	Output : Jumlah kegiatan Gebyar Germas Sapa	1	1	100.00	
	5.32 MONITORING DAN EVALUASI BALAI	Input : Dana	7,746,000	7,136,000	92.12
Output : Jumlah Desa yang di Monev		3	3	100.00	

SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%	
	5.33 PERTEMUAN MONEV GKPD	Input : Dana	14,038,000	13,913,000	99.11	
		Output : Jumlah Kegiatan Pertemuan	1	1	100.00	
	5.34 PERTEMUAN MONEV GERMAS PJAS	Input : Dana	40,698,000	40,690,200	99.98	
		Output : Jumlah Kegiatan Pertemuan	1	1	100.00	
	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA YANG TERKAIT PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	6.01 PENGADAAN ALAT LABORATORIUM	Input : Dana	8,767,391,000	8,715,536,400	99.41
			Output : Jumlah Alat Laboratorium yang diadakan	34	34	100.00
6.02 PERKUATAN MOBIL LAB KELILING		Input : Dana	40,000,000	33,750,000	84.38	
		Output : Jumlah Alat Perkuatan Mobil Lab Keliling yang diadakan	1	1	100.00	
6.03 PENGADAAN ALAT LABORATORIUM (OPTIMALISASI)		Input : Dana	147,000,000	142,550,000	96.97	
		Output : Jumlah Alat Laboratorium yang diadakan	1	1	100.00	
6.04 PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI		Input : Dana	150,000,000	145,765,000	97.18	
		Output : Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi yang diadakan	19	19	100.00	
6.05 PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN		Input : Dana	95,500,000	94,900,000	99.37	
		Output : Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran yang diadakan	12	12	100.00	
6.06 PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN		Input : Dana	4,500,000	4,300,000	95.56	
		Output : Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran yang diadakan	1	1	100.00	
6.07 PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI (OPTIMALISASI)		Input : Dana	224,750,000	181,922,000	80.94	
		Output : Jumlah APD yang diadakan	16	16	100.00	
6.08 PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN (OPTIMALISASI)		Input : Dana	99,859,000	97,400,000	97.54	
	Output : Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran yang diadakan	31	31	100.00		
6.09 PENGADAAN PAKAIAN KERJA	Input : Dana	55,580,000	55,380,000	99.64		
	Output : Jumlah Pakaian Kerja yang diadakan	127	127	100.00		
6.10 ADMINISTRASI PENGADAAN	Input : Dana	20,412,000	18,727,200	91.75		
	Output : Jumlah Administrasi Pengadaan yang diadakan	26	26	100.00		
6.11 PELATIHAN PENGADAAN	Input : Dana	21,388,000	19,569,200	91.50		
	Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Pengadaan	2	2	100.00		
PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, KEUANGAN DAN EVALUASI YANG DILAPORKAN TEPAT WAKTU	7.01 RAPAT KERJA NASIONAL DI SURABAYA	Input : Dana	21,495,000	21,158,400	98.43	
		Output : Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan Rakernas di Surabaya	6	6	100.00	
	7.02 PERTEMUAN EVALUASI NASIONAL DI GORONTALO	Input : Dana	24,232,000	24,019,200	99.12	
		Output : Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan Evaluasi Nasional di Gorontalo	4	4	100.00	

SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
7.03	SOSIALISASI DAN BIMTEK SAKIP	Input : Dana	1,910,000	1,910,000	100.00
		Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi dan Bimtek SAKIP	2	2	100.00
7.04	FGD SAKIP DI YOGYAKARTA	Input : Dana	7,260,000	7,106,400	97.88
		Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti FGD SAKIP di Yogyakarta	2	2	100.00
7.05	SOSIALISASI MANAJEMEN PERUBAHAN OLEH ESELON I PEMBINA	Input : Dana	7,560,000	7,320,000	96.83
		Output : Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Sosialisasi Manajemen Perubahan oleh Eselon I Pembina	126	122	96.83
7.06	PENILAIAN RISIKO	Input : Dana	900,000	900,000	100.00
		Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Rapat Penilaian Resiko	15	15	100.00
7.07	FGD BATAM	Input : Dana	6,150,000	6,133,400	99.73
		Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan FGD Batam	1	1	100.00
7.08	FGD MANADO	Input : Dana	7,526,000	5,067,500	67.33
		Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan FGD Manado	1	1	100.00
7.09	PENYUSUNAN PROGRAM RKAKL DAN DIPA	Input : Dana	19,400,000	18,199,400	93.81
		Output : Dokumen RKAKL dan DIPA BBPOM di Denpasar	2	2	100.00
7.10	PENYUSUNAN LAPKIN	Input : Dana	11,200,000	11,200,000	100.00
		Output : Dokumen Penyusunan LAPKIN BBPOM di Denpasar	1	1	100.00
7.11	PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN	Input : Dana	13,200,000	13,200,000	100.00
		Output : Dokumen Penyusunan Laporan Tahunan BBPOM di Denpasar	1	1	100.00
7.12	PENYUSUNAN LAPORAN BMN DAN SAKPA	Input : Dana	1,200,000	1,200,000	100.00
		Output : Dokumen Laporan BMN dan SAKPA BBPOM di Denpasar	2	2	100.00
7.13	PENYELENGGARAAN PENILAIAN JABATAN FUNGSIONAL	Input : Dana	26,200,000	21,480,000	81.98
		Output : Dokumen hasil penilaian Pejabat Fungsional	2	2	100.00
7.14	PENYELENGGARAAN DISIPLIN PEGAWAI	Input : Dana	1,560,000	1,140,000	73.08
		Output : Dokumen Hasil penilaian Disiplin Pegawai	1	1	100.00
7.15	PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN	Input : Dana	7,480,000	7,480,000	100.00
		Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Rapat Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	30	30	100.00
7.16	KAJIAN PELAKSANAAN RENSTRA	Input : Dana	900,000	900,000	100.00
		Output : Dokumen Renstra	1	1	100.00

SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
7.17	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI	Input : Dana	18,769,000	18,280,000	97.39
		Output : Jumlah Peserta mengikuti Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi	3	3	100.00
7.18	PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Input : Dana	1,800,000	1,800,000	100.00
		Output : Jumlah Peserta mengikuti Pengelolaan Adminstrasi Kepegawaian	12	12	100.00
7.19	PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (SAK)	Input : Dana	24,000,000	24,000,000	100.00
		Output : Laporan Pengelolaan SAK	1	1	100.00
7.20	ADMINISTRASI KEGIATAN	Input : Dana	677,635,000	665,715,465	98.24
		Output : Laporan Administrasi Kegiatan	1	1	100.00
7.21	PENINGKATAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI	Input : Dana	39,960,000	37,030,000	92.67
		Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti Peningkatan Jasmani dan Rohani Pegawai	126	126	100.00
7.22	PEMBAHASAN OPTIMALISASI, EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA TATA USAHA	Input : Dana	8,280,000	8,160,000	98.55
		Output : Jumlah pembahasan Optimalisasi, evaluasi dan pelaporan kinerja Tata Usaha	6	6	100.00
7.23	KONSULTASI NASIONAL PENGELOLAAN KINERJA	Input : Dana	9,775,000	9,771,826	99.97
		Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti Konsultasi Nasional Pengelolaan Kinerja	2	2	100.00
7.24	PENYELESAIAN ADMINISTRASI KEGIATAN	Input : Dana	7,440,000	6,383,000	85.79
		Output : Jumlah Peserta mengikuti penyelesaian administrasi Kegiatan	2	2	100.00
7.25	PENGELOLAAN BMN	Input : Dana	14,700,000	14,700,000	100.00
		Output : Laporan pengelolaan BMN	1	1	100.00
7.26	PEMUTAKHIRAN DATA BMN DI JAWA BARAT	Input : Dana	15,584,000	15,571,989	99.92
		Output : Jumlah Peserta yang mengikuti pemutahiran Data BMN di Jawa barat	2	2	100.00
7.27	PENYUSUNAN RENCANA KERJA BMN	Input : Dana	10,805,000	10,745,000	99.44
		Output : Jumlah peserta yang mengikuti Penyusunan Rencana Kerja BMN	2	2	100.00
7.28	BIMTEK PENILAIAN BMN DI JAKARTA	Input : Dana	20,670,000	18,030,600	87.23
		Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Penilaian BMN di Jakarta	3	3	100.00
7.29	PEMUSNAHAN RETAIN SAMPEL	Input : Dana	4,700,000	4,700,000	100.00
		Output : Jumlah peserta yang mengikuti Pemusnahan Retain Sampel	10	10	100.00

SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
	7.30 SOSIALISASI PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DI JAKARTA	<u>Input</u> : Dana	10,978,000	9,830,400	89.55
		<u>Output</u> : Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi pedoman tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan di jakarta	2	2	100.00
	7.31 PENGELOLAAN ARSIP	<u>Input</u> : Dana	116,150,000	115,733,000	99.64
		<u>Output</u> : Dokumen Arsip	1	1	100.00
	7.32 HONOR OPERASIONAL SATKER	<u>Input</u> : Dana	3,840,000	3,840,000	100.00
		<u>Output</u> : Jumlah Paket Honor Operasional Satker	2	2	100.00
	7.33 PELATIHAN TI DI YOGYAKARTA	<u>Input</u> : Dana	26,715,000	21,948,600	82.16
		<u>Output</u> : Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan TI di Yogyakarta	2	2	100.00
	7.34 BIMTEK PROTOKOLER & KEHUMASAN DI BATAM	<u>Input</u> : Dana	50,918,000	48,542,000	95.33
		<u>Output</u> : Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek Protokoler dan Kehumasan Di Batam	5	5	100.00
	7.35 PENINGKATAN KOMPETENSI SDM DALAM RANGKA RB	<u>Input</u> : Dana	452,474,000	448,174,400	99.05
		<u>Output</u> : Jumlah Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM dalam rangka RB	1	1	100.00
	7.36 PENINGKATAN KOMPETENSI/KOORDINASI DALAM PENGURUSAN KEPANGKATAN/ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN/BMN/KEUANGAN	<u>Input</u> : Dana	63,455,000	54,039,345	85.16
		<u>Output</u> : Jumlah Pegawai yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi / Koordinasi dalam pengurusan kepangkatan/ Administrasi Kepegawaian/ BMN/ Keuangan	8	8	100.00
	7.37 IN HOUSE TRAINING DAN DISEMINASI HASIL KEGIATAN	<u>Input</u> : Dana	14,400,000	14,400,000	100.00
<u>Output</u> : Jumlah Peserta yang Mengikuti In house training dan diseminasi hasil kegiatan		10	10	100.00	
7.38 PELATIHAN BAHASA INGGRIS BAGI PETUGAS PELAYANAN	<u>Input</u> : Dana	15,400,000	15,400,000	100.00	
	<u>Output</u> : Jumlah petugas yang mengikuti pelatihan	20	20	100.00	
7.39 BENCHMARK KEUANGAN KE BALAI POM DI GORONTALO	<u>Input</u> : Dana	16,810,000	16,793,800	99.90	
	<u>Output</u> : Jumlah peserta yang mengikuti Benchmark keuangan ke Balai POM di Gorontalo	2	2	100.00	
7.40 PELATIHAN MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN MODERN DI YOGYAKARTA	<u>Input</u> : Dana	30,300,000	29,935,800	98.80	
	<u>Output</u> : Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Manajemen Administrasi Perkantoran Modern di Yogyakarta	3	3	100.00	

SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
7.41	BIMTEK BIDANG KEUANGAN DI BANDUNG	Input : Dana	17,160,000	16,832,800	98.09
		Output : Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Bidang Keuangan di Bandung	2	2	100.00
7.42	BIMTEK BIDANG KEARSIPAN DI BANDUNG	Input : Dana	17,160,000	16,832,800	98.09
		Output : Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Bidang Kearsipan di Bandung	2	2	100.00
7.43	BIMTEK BIDANG KEPEGAWAIAN DI BANDUNG	Input : Dana	8,580,000	8,473,900	98.76
		Output : Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Bidang Kepegawaian di Bandung	1	1	100.00
7.44	BIMTEK PROTOKOLER & KEHUMASAN DI BATAM	Input : Dana	10,026,000	9,708,400	96.83
		Output : Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Protokoler & Kehumasan di Batam	1	1	100.00
7.45	WORKSHOP SDM	Input : Dana	29,930,000	22,252,900	74.35
		Output : Jumlah peserta yang mengikuti Workshop SDM	4	4	100.00
7.46	BENCHMARK KEUANGAN KE BBPOM DKI JAKARTA	Input : Dana	35,040,000	34,275,600	97.82
		Output : Jumlah peserta yang mengikuti Benchmark Keuangan ke BBPOM DKI Jakarta	6	6	100.00
7.47	BENCHMARK KEUANGAN KE BBPOM MANADO	Input : Dana	29,060,000	26,356,800	90.70
		Output : Jumlah peserta yang mengikuti Benchmark Keuangan Ke BBPOM Medan	4	4	100.00
7.48	BENCHMARK KEUANGAN KE BBPOM MEDAN	Input : Dana	31,280,000	28,785,400	92.02
		Output : Jumlah peserta yang mengikuti Benchmark Keuangan Ke BBPOM Medan	4	4	100.00
7.49	REVITALISASI PERAN PERENCANA DAN KAPASITAS INSTANSI PERENCANAAN DI BANDUNG	Input : Dana	5,210,000	5,114,900	98.17
		Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Revitalisasi Peran Perencana dan Kapasitas Instansi Perencana di Bandung	1	1	100.00
7.50	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN	Input : Dana	7,012,260,000	6,915,153,315	98.62
		Output : Jumlah Bulan pembayaran Gaji	12	12	100.00
7.51	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN (LEMBUR)	Input : Dana	130,000,000	129,993,000	99.99
		Output : Jumlah bulan lembur yang dilaksanakan	12	12	100.00
7.52	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN	Input : Dana	954,669,000	933,425,320	97.77
		Output : Jumlah orang yang menerima honor	26	26	100.00
7.53	SEWA JARINGAN TELEKOMUNIKASI	Input : Dana	69,000,000	68,640,000	99.48
		Output : Paket Sewa jaringan telekomunikasi	1	1	100.00

SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
7.54	KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	Input : Dana	127,160,000	127,148,950	99.99
		Output : Terpenuhinya keperluan perkantoran pegawai	102	102	100.00
7.55	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4	Input : Dana	126,000,000	125,499,229	99.60
		Output : Jumlah mobil yang dilakukan pemeliharaannya	9	9	100.00
7.56	PERAWATAN KENDARAAN RODA 2	Input : Dana	6,000,000	5,651,500	94.19
		Output : Jumlah Motor yang dilakukan pemeliharaannya	6	6	100.00
7.57	LANGGANAN LISTRIK	Input : Dana	703,000,000	685,487,702	97.51
		Output : Paket langganan listrik	1	1	100.00
7.58	LANGGANAN TELEPON	Input : Dana	25,600,000	24,339,470	95.08
		Output : Paket langganan telepon	1	1	100.00
7.59	LANGGANAN AIR	Input : Dana	17,000,000	16,483,210	96.96
		Output : Paket pembayaran langganan air	1	1	100.00
7.60	PERAWATAN GEDUNG KANTOR	Input : Dana	240,785,000	240,772,500	99.99
		Output : Paket perawatan gedung kantor	1	1	100.00
7.61	PEMELIHARAAN IPAL	Input : Dana	55,000,000	55,000,000	100.00
		Output : Paket pemeliharaan IPAL	1	1	100.00
7.62	PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM	Input : Dana	75,000,000	61,116,000	81.49
		Output : Paket pemeliharaan alat laboratorium	1	1	100.00
7.63	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN PRASARANA OPERASI	Input : Dana	58,000,000	57,893,500	99.82
		Output : Paket pemeliharaan peralatan dan prasarana operasi	1	1	100.00
7.64	PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Input : Dana	58,348,000	58,218,000	99.78
		Output : Paket pemeliharaan peralatan kantor	1	1	100.00
7.65	SEWA RUMAH DINAS	Input : Dana	90,000,000	90,000,000	100.00
		Output : Paket sewa rumah dinas	1	1	100.00

**PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN
BALAI BESAR POM DI DENPASAR
TAHUN 2017**

SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
MENINGKATNYA KUALITAS SAMPLING DAN PENGUJIAN TERHADAP PRODUK OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR	1.1	PENYUSUNAN PERENCANAAN SAMPLING (OBAT KB)	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	1.2	PENGADAAN SAMPEL	49.66	100.00	2.01	1.00	Efisien	1.01
	1.3	PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL OBAT KB	99.52	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
	1.4	EVALUASI PENGUJIAN	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	1.5	PENYUSUNAN PERENCANAAN SAMPLING (OBAT)	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	1.6	PENGADAAN SAMPEL	87.52	100.00	1.14	1.00	Efisien	0.14
	1.7	PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL OBAT, OT, KOSMETIKA DAN SUPLEMEN KESEHATAN	98.92	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
	1.8	EVALUASI PENGUJIAN	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	1.9	PENYUSUNAN PERENCANAAN SAMPLING (MAKANAN)	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	1.10	PENGADAAN SAMPEL	70.76	100.00	1.41	1.00	Efisien	0.41
	1.11	PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL PANGAN DAN KEMASAN PANGAN	99.15	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
	1.12	EVALUASI PENGUJIAN	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	1.13	PENINGKATAN SISTEM MUTU LABORATORIUM	99.94	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
	1.14	KALIBRASI ALAT LABORATORIUM	99.97	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.0003
	1.15	VERIFIKASI VOLUMETRIK INTERNAL DAN CEK ANTARA TIMBANGAN	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	1.16	VERIFIKASI METODE ANALISA	98.78	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.0124
	1.17	AUDIT INTERNAL SISTEM MUTU OLEH KJM DI DENPASAR	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	1.18	REASESMEN 31 BB/BPOM DAN SOSIALISASI PEDOMAN GLP	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	1.19	PEMERIKSAAN RUTIN ALAT LABORATORIUM	99.87	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.0013
	1.20	PENYELENGGARAAN LABORATORIUM	99.98	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.0002
	1.21	PENGADAAN INSTRUMEN DAN GRAFIT TUBE	97.62	100.00	1.02	1.00	Efisien	0.0244
	1.22	PENGADAAN ALAT GLAS	99.97	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.0003
	1.23	PENGADAAN SUKU CADANG	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	1.24	PENGADAAN BUFFER STOCK	99.35	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.0065
	1.25	PENGEMBANGAN BAKU PEMBANDING NASIONAL TH. 2017	99.99	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.0001
	1.26	PEMBAHASAN HASIL UJI KOLABORASI BAKU PEMBANDING DI JAKARTA	83.17	100.00	1.20	1.00	Efisien	0.2024

SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
	1.27 SEMINAR ILMIAH DAN FORUM DISEMINASI HASIL RISET	99.91	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.0009
	1.28 KAJI ULANG MANAJEMEN DAN TEKNIS LABORATORIUM	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	1.29 KAJI ULANG DOKUMEN SISTEM MUTU	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	1.30 EVALUASI TEKNIS PENGUJIAN MELALUI UJI PROFISIENSI/UJI BANDING DAN UJI PETIK DI BBPOM/BPOM	99.81	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.0019
	1.31 PENGEMBANGAN METODE ANALISIS	89.53	100.00	1.12	1.00	Efisien	0.1169
	1.32 FORUM DISKUSI PENINGKATAN TEKNIS PENGUJIAN LABORATORIUM BADAN POM DI JAKARTA	93.44	100.00	1.07	1.00	Efisien	0.0702
	1.33 PENGADAAN MAKANAN MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	1.34 PERTEMUAN TEKNIS KAN	99.99	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
	1.35 REAKREDITASI LABORATORIUM	99.87	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
	1.36 TINDAKAN PERBAIKAN HASIL REAKREDITASI	87.93	100.00	1.14	1.00	Efisien	0.14
	1.37 PEMERIKSAAN PEKERJAAN RISIKO PEKERJAAN	99.41	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
	1.38 PENGAMANAN MAKANAN TAMU NEGARA	93.87	100.00	1.07	1.00	Efisien	0.07
	1.39 KEGIATAN QMS ISO 9001	92.59	92.59	1.00	1.00	Efisien	-
	1.40 PELATIHAN ANALISIS DI PPOM	93.51	100.00	1.07	1.00	Efisien	0.07
	1.41 BIMBINGAN TEKNIS JAMINAN MUTU HASIL PENGUJIAN	99.99	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.0001
	1.42 MAGANG DALAM RANGKA PENINGKATAN KOMPETENSI PENGUJI DI LAB	80.90	93.33	1.15	1.00	Efisien	0.15
	1.43 PELATIHAN SISTEM MUTU	75.46	93.33	1.24	1.00	Efisien	0.24
	1.44 PELATIHAN INTERNAL PENGUJIAN TERANOKOKO	97.16	100.00	1.03	1.00	Efisien	0.03
	1.45 PELATIHAN INTERNAL PENGUJIAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA	97.55	100.00	1.03	1.00	Efisien	0.03
	1.46 PELATIHAN INTERNAL PENGUJIAN MIKROBIOLOGI	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	1.47 PENINGKATAN KOMPETENSI SDM DALAM RANGKA RB	99.95	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
	1.48 IN HOUSE TRAINING/DISEMINASI HASIL PELATIHAN/PERTEMUAN	97.32	101.22	1.04	1.00	Efisien	0.04
	1.49 KOORDINASI ANTAR BALAI DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA ADMINISTRASI PENGUJIAN	88.85	100.00	1.13	1.00	Efisien	0.13
	1.50 KOORDINASI DALAM RANGKA ADMINISTRASI	83.65	100.00	1.20	1.00	Efisien	0.20

SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE	
		INPUT	OUTPUT					
MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PRODUKSI YANG MEMENUHI STANDAR	2.1	PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA) DI PROVINSI BALI	97.73	104.69	1.07	1.00	Efisien	0.07
	2.2	PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BALAI (DI LUAR KOTA) DI PROVINSI BALI	99.16	106.34	1.07	1.00	Efisien	0.07
	2.3	DISEMINASI HASIL PELATIHAN	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	2.4	BIMBINGAN TEKNIS PENGAWASAN PEREDARAN OT DAN SM DI JAKARTA	90.19	100.00	1.11	1.00	Efisien	0.1088
	2.5	BIMBINGAN TEKNIS CPOTB TOPIK KHUSUS DI JAKARTA	79.39	100.00	1.26	1.00	Efisien	0.26
	2.6	JOINT INSPECTION DI SEMARANG	92.84	100.00	1.08	1.00	Efisien	0.08
MENINGKATNYA KUALITAS SARANA DISTRIBUSI YANG MEMENUHI STANDAR	3.1	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BALAI (DI DALAM KOTA) DI PROVINSI BALI	99.08	103.07	1.04	1.00	Efisien	0.04
	3.2	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BALAI (DI LUAR KOTA) DI PROVINSI BALI	99.68	102.23	1.03	1.00	Efisien	0.03
	3.3	PENGAWASAN PENANDAAN OBAT DAN MAKANAN	81.23	118.73	1.46	1.00	Efisien	0.46
	3.4	PENGAWASAN PERIKLANAN OBAT DAN MAKANAN	99.26	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
	3.5	PENGAWASAN DALAM RANGKA INTENSIFIKASI/AKSI PENERTIBAN KOSMETIKA ILEGAL	96.31	100.00	1.04	1.00	Efisien	0.04
	3.6	PENGAWASAN DALAM RANGKA TINDAK LANJUT PENGADUAN KONSUMEN	77.10	100.00	1.30	1.00	Efisien	0.30
	3.7	KOORDINASI PENGAWASAN LINTAS SEKTOR	89.41	94.12	1.05	1.00	Efisien	0.05
	3.8	SOSIALISASI PERATURAN DI BIDANG DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN	99.54	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
	3.9	RAPAT KONSULTASI NASIONAL PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN SUPLEMEN MAKANAN	97.47	100.00	1.03	1.00	Efisien	0.03
	3.10	EVALUASI EFEKTIVITAS UPAYA /AKSI PENERTIBAN KOSMETIKA ILEGAL DAN TMS DI JAKARTA	91.45	100.00	1.09	1.00	Efisien	0.09
	3.11	KONSULTASI PENGAWASAN	91.46	100.00	1.09	1.00	Efisien	0.09
	3.12	BIMBINGAN TEKNIS INSPEKTUR SENIOR (TANGERANG)	71.55	100.00	1.40	1.00	Efisien	0.40
3.13	COACHING CLINIC	99.90	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00	
JUMLAH PERKARA DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN	4.1	PENGUMPULAN BAHAN KETERANGAN, VERIFIKASI INFORMASI DAN RENCANA INVESTIGASI AWAL (DK)	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-

SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
	4.2 PELAKSANAAN INVESTIGASI AWAL (DK)	95.00	100.00	1.05	1.00	Efisien	0.05
	4.3 EVALUASI INVESTIGASI AWAL, GELAR KASUS DAN PELAPORAN HASIL INVESTIGASI (DK)	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	4.4 RAPAT PEMBAHASAN RENCANA PENYIDIKAN, SKENARIO PENINDAKAN DAN OLAH TKP (DK)	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	4.5 PENINDAKAN (DK)	96.43	100.00	1.04	1.00	Efisien	0.04
	4.6 OPERASI KHUSUS (DK)	48.70	100.00	2.05	1.00	Efisien	1.05
	4.7 PEMBERKASAN (DK)	52.11	133.33	2.56	1.00	Efisien	1.56
	4.8 PENGUMPULAN BAHAN KETERANGAN, VERIFIKASI INFORMASI DAN RENCANA INVESTIGASI AWAL (LK)	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	4.9 PELAKSANAAN INVESTIGASI AWAL (LK)	82.07	100.00	1.22	1.00	Efisien	0.22
	4.10 EVALUASI INVESTIGASI AWAL, GELAR KASUS DAN PELAPORAN HASIL INVESTIGASI (LK)	87.50	87.50	1.00	1.00	Efisien	-
	4.11 PEMBAHASAN RENCANA PENYIDIKAN, SKENARIO PENINDAKAN DAN OLAH TKP (LK)	62.50	62.50	1.00	1.00	Efisien	-
	4.12 PENINDAKAN (LK)	75.76	93.75	1.24	1.00	Efisien	0.24
	4.13 OPERASI KHUSUS (LK)	39.00	50.00	1.28	1.00	Efisien	0.28
	4.14 KONSULTASI DAN PENAMBAHAN WAWASAN PENYIDIKAN DI YOGYAKARTA	77.06	100.00	1.30	1.00	Efisien	0.30
	4.15 PEMBERKASAN (LK)	23.23	62.50	2.69	1.00	Efisien	1.69
	4.16 PERTEMUAN PERKUATAN PEMANTAPAN OPERASI PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN (PALEMBANG)	73.31	100.00	1.36	1.00	Efisien	0.36
	4.17 PERTEMUAN PENINGKATAN KINERJA, PROFESIONALISME DAN KOORDINASI PPNS BADAN POM (YOGYAKARTA)	87.85	100.00	1.14	1.00	Efisien	0.14
	4.18 PERTEMUAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR PENEGKAN HUKUM TINDAK PIDANA OBAT DAN MAKANAN						
	4.19 PEMUSNAHAN OMKABA TMK	99.78	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
	4.20 PERJALANAN DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM	62.69	67.86	1.08	1.00	Efisien	0.08
	4.21 ADVOKASI PENEGAKAN HUKUM	96.11	100.00	1.04	1.00	Efisien	0.04
	4.22 OPERASI INTENSIF PEMBERANTASAN OBAT DAN MAKANAN ILEGAL	82.78	100.00	1.21	1.00	Efisien	0.21
	4.23 KONSULTASI DAN PENAMBAHAN WAWASAN PENYIDIKAN	66.80	100.00	1.50	1.00	Efisien	0.50
	4.24 PENAMBAHAN WAWASAN PENYIDIKAN (BANJARMASIN)	96.07	100.00	1.04	1.00	Efisien	0.04
	4.25 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN PPNS BPOM	83.31	100.00	1.20	1.00	Efisien	0.20

SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
	4.26	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INTELLIJEN	94.39	100.00	1.06	1.00	Efisien	0.06
	4.27	PENINGKATAN KOMPETENSI INVESTIGASI AWAL DAN PENYIDIKAN BBPOM	94.13	100.00	1.06	1.00	Efisien	0.06
	4.28	IN HOUSE TRAINING PENYIDIKAN	57.65	100.00	1.73	1.00	Efisien	0.73
	4.29	PENINGKATAN KOMPETENSI DALAM RANGKA RB	89.54	100.00	1.12	1.00	Efisien	0.12
	4.30	TRAINING PETUGAS PENGAWAS LINTAS SEKTOR	98.40	100.00	1.02	1.00	Efisien	0.02
	4.31	PELATIHAN TEKNIK INSPEKSI CPOTB DI UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD) DI JAKARTA	97.18	100.00	1.03	1.00	Efisien	0.03
MENINGKATNYA KERJASAMA, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI	5.1	AUDIT DALAM RANGKA PRASERTIFIKASI/SERTIFIKASI/REGISTRASI DAN HALAL	85.59	89.87	1.05	1.00	Efisien	0.05
	5.2	AUDIT SURVEILAN PENERIMA PIAGAM BINTANG KEAMANAN PANGAN (PBKP)	99.91	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
	5.3	AUDIT SKI/SKE	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	5.4	ADVOKASI /KOORDINASI BBPOM KE INSTANSI PEMERINTAH LAINNYA/STAKE HOLDER	95.76	100.00	1.04	1.00	Efisien	0.04
	5.5	EVALUASI BIDANG SERLIK	78.57	85.71	1.09	1.00	Efisien	0.09
	5.6	AUDIT CALON DAN SURVEILAN PENERIMA PIAGAM BINTANG KEAMANAN KANTIN SEKOLAH (PBKP-KS)	98.45	100.00	1.02	1.00	Efisien	0.02
	5.7	OPERASIONAL SENTRA INFORMASI KERACUNAN	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	5.8	PAMERAN PEMBANGUNAN 17 AGUSTUS BBPOM DI DENPASAR	99.23	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
	5.9	PENYEBARAN INFORMASI PRODUK OBAT DAN MAKANAN	98.55	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
	5.10	KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN KOMUNITAS	99.32	121.43	1.22	1.00	Efisien	0.22
	5.11	PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS SERLIK	81.68	100.00	1.22	1.00	Efisien	0.22
	5.12	PELATIHAN MANAJEMEN/KEHUMASAN	99.19	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
	5.13	IN HOUSE TRAINING/DISEMINASI HASIL PELATIHAN/PERTEMUAN	78.18	83.33	1.07	1.00	Efisien	0.07
	5.14	PENINGKATAN KOMPETENSI SDM DALAM RANGKA RB	89.54	100.00	1.12	1.00	Efisien	0.12
	5.15	OPERASIONAL MOBIL LABORATORIUM KELILING	96.08	100.00	1.04	1.00	Efisien	0.04
	5.16	PEMBERDAYAAN KOMUNITAS MASYARAKAT						
	5.17	FORUM KOMITMEN GNPOPA	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-

SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
	5.18	RE-ORIENTASI KEAMANAN PANGAN	99.97	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
	5.19	PERTEMUAN ADVOKASI KELEMBAGAAN DESA	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	5.20	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN USAHA PANGAN DESA DI BIDANG KEAMANAN PANGAN-BALAI	99.58	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
	5.21	BIMTEK KADER KEAMANAN PANGAN DESA	98.03	100.00	1.02	1.00	Efisien	0.02
	5.22	GAP ASSESMENT KEAMANAN PANGAN DESA	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	5.23	BIMTEK KOMUNITAS KEAMANAN PANGAN DESA	99.95	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
	5.24	FASILITASI KEAMANAN PANGAN DESA	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	5.25	OPERASIONAL KIE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	94.75	100.00	1.06	1.00	Efisien	0.06
	5.26	PERTEMUAN LINTAS SEKTOR PJAS KANTIN SEHAT	94.56	98.69	1.04	1.00	Efisien	0.04
	5.27	BIMTEK KIE PJAS KANTIN SEHAT	95.35	100.00	1.05	1.00	Efisien	0.05
	5.28	SAMPLING DAN PENGUJIAN PRODUK PJAS KANTIN SEHAT	89.35	100.00	1.12	1.00	Efisien	0.12
	5.29	BIMTEK PBKP-KS KANTIN SEHAT	99.11	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
	5.30	PELATIHAN FASILITATOR KEAMANAN PANGAN SEKOLAH	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	5.31	GERMAS SAPA	96.11	100.00	1.04	1.00	Efisien	0.04
	5.32	MONITORING DAN EVALUASI BALAI	92.12	100.00	1.09	1.00	Efisien	0.09
	5.33	PERTEMUAN MONEV GKPD	99.11	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
	5.34	PERTEMUAN MONEV GERMAS PJAS	99.98	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA YANG TERKAIT PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	6.1	PENGADAAN ALAT LABORATORIUM	99.41	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
	6.2	PERKUATAN MOBIL LAB KELILIBNG	84.38	100.00	1.19	1.00	Efisien	0.19
	6.3	PENGADAAN ALAT LABORATORIUM (OPTIMALISASI)	96.97	100.00	1.03	1.00	Efisien	0.03
	6.4	PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI	97.18	100.00	1.03	1.00	Efisien	0.03
	6.5	PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN	99.37	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
	6.6	PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN	95.56	100.00	1.05	1.00	Efisien	0.05
	6.7	PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI (OPTIMALISASI)	80.94	100.00	1.24	1.00	Efisien	0.24
	6.8	PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN (OPTIMALISASI)	97.54	100.00	1.03	1.00	Efisien	0.03

SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
	6.9	PENGADAAN PAKAIAN KERJA	99.64	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
	6.10	ADMINISTRASI PENGADAAN	91.75	100.00	1.09	1.00	Efisien	0.09
	6.11	PELATIHAN PENGADAAN	91.50	100.00	1.09	1.00	Efisien	0.09
PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, KEUANGAN DAN EVALUASI YANG DILAPORKAN TEPAT WAKTU	7.1	RAPAT KERJA NASIONAL DI SURABAYA	98.43	100.00	1.02	1.00	Efisien	0.02
	7.2	PERTEMUAN EVALUASI NASIONAL DI GORONTALO	99.12	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
	7.3	SOSIALISASI DAN BIMTEK SAKIP	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	7.4	FGD SAKIP DI YOGYAKARTA	97.88	100.00	1.02	1.00	Efisien	0.02
	7.5	SOSIALISASI MANAJEMEN PERUBAHAN OLEH ESELON I PEMBINA	96.83	96.83	1.00	1.00	Efisien	-
	7.6	PENILAIAN RISIKO	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	7.7	FGD BATAM	99.73	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
	7.8	FGD MANADO	67.33	100.00	1.49	1.00	Efisien	0.49
	7.9	PENYUSUNAN PROGRAM RKAKL DAN DIPA	93.81	100.00	1.07	1.00	Efisien	0.07
	7.10	PENYUSUNAN LAPKIN	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	7.11	PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	7.12	PENYUSUNAN LAPORAN BMN DAN SAKPA	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	7.13	PENYELENGGARAAN PENILAIAN JABATAN FUNGSIONAL	81.98	100.00	1.22	1.00	Efisien	0.22
	7.14	PENYELENGGARAAN DISIPLIN PEGAWAI	73.08	100.00	1.37	1.00	Efisien	0.37
	7.15	PEMBINAAN ADMINSTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	7.16	KAJIAN PELAKSANAAN RENSTRA	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	7.17	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI	97.39	100.00	1.03	1.00	Efisien	0.03
	7.18	PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	7.19	PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (SAK)	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	7.20	ADMINISTRASI KEGIATAN	98.24	100.00	1.02	1.00	Efisien	0.02
	7.21	PENINGKATAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI	92.67	100.00	1.08	1.00	Efisien	0.08
	7.22	PEMBAHASAN OPTIMALISASI,EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA TATA USAHA	98.55	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
	7.23	KONSULTASI NASIONAL PENGELOLAAN KINERJA	99.97	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
	7.24	PENYELESAIAN ADMINISTRASI KEGIATAN	85.79	100.00	1.17	1.00	Efisien	0.17
	7.25	PENGELOLAAN BMN	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	7.26	PEMUTAKHIRAN DATA BMN DI JAWA BARAT	99.92	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00

SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
	7.27	PENYUSUNAN RENCANA KERJA BMN	99.44	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
	7.28	BIMTEK PENILAIAN BMN DI JAKARTA	87.23	100.00	1.15	1.00	Efisien	0.15
	7.29	PEMUSNAHAN RETAIL SAMPEL	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	7.30	SOSIALISASI PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DI JAKARTA	89.55	100.00	1.12	1.00	Efisien	0.12
	7.31	PENGELOLAAN ARSIP	99.64	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
	7.32	HONOR OPERASIONAL SATKER	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	7.33	PELATIHAN TI DI YOGYAKARTA	82.16	100.00	1.22	1.00	Efisien	0.22
	7.34	BIMTEK PROTOKOLER & KEHUMASAN DI BATAM	95.33	100.00	1.05	1.00	Efisien	0.05
	7.35	PENINGKATAN KOMPETENSI DALAM RANGKA RB	99.05	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
	7.36	PENINGKATAN KOMPETENSI/KOORDINASI DALAM PENGURUSAN KEPANGKATAN/ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN/BMN/KEUANGAN	85.16	100.00	1.17	1.00	Efisien	0.17
	7.37	IN HOUSE TRAINING DAN DISEMINASI HASIL KEGIATAN	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	7.38	PELATIHAN BAHASA INGGRIS BAGI PETUGAS PELAYANAN	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	7.39	BENCHMARK KEUANGAN KE BALAI POM DI GORONTALO	99.90	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
	7.4	PELATIHAN MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN MODERN DI YOGYAKARTA	98.80	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
	7.41	BIMTEK BIDANG KEUANGAN DI BANDUNG	98.09	100.00	1.02	1.00	Efisien	0.02
	7.42	BIMTEK BIDANG KEARSIPAN DI BANDUNG	98.09	100.00	1.02	1.00	Efisien	0.02
	7.43	BIMTEK BIDANG KEPEGAWAIAN DI BANDUNG	98.76	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
	7.44	BIMTEK PROTOKOLER & KEHUMASAN DI BATAM	96.83	100.00	1.03	1.00	Efisien	0.03
	7.45	WORKSHOP SDM	74.35	100.00	1.34	1.00	Efisien	0.34
	7.46	BENCHMARK KEUANGAN KE BBPOM DKI JAKARTA	97.82	100.00	1.02	1.00	Efisien	0.02
	7.47	BENCHMARK KEUANGAN KE BBPOM MANADO	90.70	100.00	1.10	1.00	Efisien	0.10
	7.48	BENCHMARK KEUANGAN KE BBPOM MEDAN	92.02	100.00	1.09	1.00	Efisien	0.09
	7.49	REVITALISASI PERAN PERENCANA DAN KAPASITAS INSTANSI PERENCANAAN DI BANDUNG	98.17	100.00	1.02	1.00	Efisien	0.02
	7.50	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN	98.62	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
	7.51	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN (LEMBUR)	99.99	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
	7.52	OPERSIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN	97.77	100.00	1.02	1.00	Efisien	0.02

SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
	7.53	SEWA JARINGAN TELEKOMUNIKASI	99.48	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
	7.54	KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	99.99	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
	7.55	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4	99.60	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
	7.56	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2	94.19	100.00	1.06	1.00	Efisien	0.06
	7.57	LANGGANAN LISTRIK	97.51	100.00	1.03	1.00	Efisien	0.03
	7.58	LANGGANAN TELPON	95.08	100.00	1.05	1.00	Efisien	0.05
	7.59	LANGGANAN AIR	96.96	100.00	1.03	1.00	Efisien	0.03
	7.60	PERAWATAN GEDUNG KANTOR	99.99	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
	7.61	PEMELIHARAAN IPAL	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	7.62	PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM	81.49	100.00	1.23	1.00	Efisien	0.23
	7.63	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN PPRASARANA DAN OPERASI	99.82	100	1.00	1.00	Efisien	0.00
	7.64	PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	99.78	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
	7.65	SEWA RUMAH DINAS	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-

**PERSENTASE OBAT DAN MAKANAN
MEMENUHI SYARAT (Sesuai DO)
BBPOM DI DENPASAR
TAHUN 2017**

NO	KOMODITI (Ijin Edar BPOM)	JUMLAH SAMPEL	TMS				% TMS	% MS
			KIMIA	MIKRO	KIMIA MIKRO	TOTAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Obat	700	11	2	0	13	1,86	98,14
2	Obat Tradisional	527	7	128	1	136	25,81	74,19
3	Kosmetik	1054	28	20	0	48	4,55	95,45
4	Suplemen Kesehatan	176	10	2	0	12	6,82	93,18
5	Makanan	780	41	3	0	44	5,64	94,36

DATA AUDIT SERTIFIKASI TAHUN 2017

NO	KOMODITI	JUMLAH SARANA		KETERANGAN
		PRODUKSI	DISTRIBUSI	
1	OBAT	1	20	Audit sarana produksi (UTD/produk darah) dan audit sarana distribusi dalam rangka izin PBF, Sertifikasi CDOB dan Resertifikasi CDOB
2	PANGAN	27	9	Audit sarana produksi dalam rangka pendaftaran produk Makanan Dalam Negeri (MD)
				Audit sarana distribusi dalam rangka pendaftaran produk Makanan Luar Negeri (ML)
3	OBAT TRADISIONAL	4	0	Audit sarana produksi dalam rangka pendaftaran produk Obat Tradisional (TR) dan penambahan bentuk sediaan
4	KOSMETIKA	10	0	Audit sarana produksi dalam rangka izin produksi dan penambahan bentuk sediaan
5	SUPLEMEN KESEHATAN	0	0	Audit sarana distribusi dalam rangka pendaftaran produk Suplemen Impor (SI)
TOTAL		42	29	
		71		

**JUMLAH SAMPEL YANG DIUJI DENGAN PARAMATER KRITIS
BBPOM DI DENPASAR
TAHUN 2017**

NO	KOMODITI	JUMLAH SAMPEL
(1)	(2)	(3)
1	Obat KB	42
2	Pangan	1043
3	Obat	658
4	Obat Tradisional	527
5	Kosmetik	1054
6	Suplemen Kesehatan	176
TOTAL		3500

**HASIL SAMPLING OBAT E-KATALOG (IFK)
BERDASARKAN METODE ACAK/RANDOM
BBPOM DI DENPASAR
TAHUN 2017**

No	Nama Kabupaten	Jumlah Sampel	Tempat Sampling
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kabupaten Tabanan	43	- PKM Kediri I
			- UPTD Puskesmas Penebel I
			- UPTD Puskesmas Tabanan II
			- PKM Kerambitan I
			- PKM Marga I
			- RSUD Tabanan I
			- Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabanan
2	Kabupaten Bangli	41	- PKM Susut II
			- PKM Bangli
			- PKM Tembuku I
			- PKM Susut I
			- RSUD Bangli
			- RSJ Provinsi Bali
3	Kabupaten Jembrana	61	- PKM Mendoyo II
			- PKM II Negara
			- PKM II Pekutatan
			- PKM Jembrana I
			- PKM II Jembrana
			- PKM I Pekutatan
			- RSUD Negara
			- Instalasi Farmasi Kabupaten Negara
4	IFK Kabupaten Buleleng	42	- PKM Buleleng II
			- PKM Sukasada I
			- PKM Buleleng I
			- PKM Sukasada II
			- RSUD Buleleng
5	IFK Kota Denpasar	82	- PKM Denpasar Barat I
			- PKM II Denpasar Selatan
			- PKM III Denpasar Selatan
			- PKM Denpasar Timur I
			- RSUP Sanglah
			- UPT Pengawasan Farmasi dan Makanan di Kota Denpasar

**HASIL SAMPLING OBAT E-KATALOG (IFK)
BERDASARKAN METODE ACAK/RANDOM
BBPOM DI DENPASAR
TAHUN 2017**

No	Nama Kabupaten	Jumlah Sampel	Tempat Sampling
(1)	(2)	(3)	(4)
			- Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Bali
			- Gudang Obat Provinsi Bali
			- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Kota Denpasar
6	IFK Kabupaten Klungkung	0	
7	IFK Kabupaten Karangasem	0	
8	IFK Kabupaten Badung	43	- PKM Mengwi III
			- PKM Kuta Utara
			- PKM Kuta I
			- PKM Mengwi I
			- RSUD Kabupaten Badung
			- Dinas Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung
9	IFK Kabupaten Gianyar	52	- PKM Sukawati I
			- PKM Sukawati II
			- PKM Gianyar II
			- PKM Blahbatuh I
			- PKM Ubud I
			- RSUD Sanjiwani (IFRS)
			- UPT IFK Kabupaten Gianyar
	TOTAL	364	

**PEMENUHAN TARGET SAMPLING
PRODUK OBAT DI SEKTOR PUBLIK (IFK)
BBPOM DI DENPASAR
TAHUN 2017**

No	Nama Kabupaten	Jumlah Sampel	Jenis Sarana
(1)	(2)	(3)	(4)
1	IFK Kabupaten Tabanan		
2	IFK Kabupaten Bangli		
3	IFK Kabupaten Jembrana	20	
4	IFK Kabupaten Buleleng		
5	IFK Kota Denpasar	22	
6	IFK Kabupaten Klungkung		
7	IFK Kabupaten Karangasem		
8	IFK Kabupaten Badung		
9	IFK Kabupaten Gianyar	10	
10	IFK Provinsi Bali	14	
	TOTAL	66	0

**CAKUPAN HASIL PENGAWASAN SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI
BBPOM DI DENPASAR
TAHUN 2017**

SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN

NO	JENIS SARANA	JUMLAH		%	HASIL PENGAWASAN	
		SARANA DI PROVINSI BALI	SARANA YANG DIPERIKSA		MEMENUHI KETENTUAN	%
1	Obat Tradisional	17	16	94,12	4	25,00
2	Kosmetik	29	28	96,55	2	7,14
3	Pangan	831	174	20,94	37	21,26
TOTAL		877	218	24,86	43	19,72

SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN

NO	JENIS SARANA	JUMLAH		%	HASIL PENGAWASAN	
		SARANA DI PROVINSI BALI	SARANA YANG DIPERIKSA		MEMENUHI KETENTUAN	%
1	Terapetik dan NAPZA	1045	334	31,96	27	8,08
2	Bahan Berbahaya	73	10	13,70	2	20,00
3	Obat Tradisional	139	51	36,69	26	50,98
4	Produk Komplemen	59	9	15,25	7	77,78
5	Kosmetik	780	119	15,26	59	49,58
6	Pangan	1307	353	27,01	177	50,14
TOTAL		3403	876	25,74	298	34,02

**Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar
BBPOM di Denpasar
Tahun 2017**

No	Nama Sarana dan Prasaranan	% Realisasi
1	Alat laboratorium	85.17
2	Mebelair	77.65
		81.41

JUMLAH LAYANAN PUBLIK BBPOM DI DENPASAR
BBPOM DI DENPASAR
TAHUN 2017

NO	LAYANAN PUBLIK	TARGET	REALISASI
1	LAYANAN INFORMASI	1012	1026
2	SKI/SKE	75	177
3	AUDIT SERTIFIKASI	70	71
4	PAMERAN	1	1
5	PENYEBARAN INFORMASI	18	18
6	KIE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	14	17
7	UJI LAB PIHAK III	10	96
	JUMLAH	1200	1406

Komunitas yang Diberdayakan BBPOM di Denpasar Tahun 2017

No	KOMUNITAS
1	Desa Sanur Kauh, Denpasar
2	Desa Peguyangan Kangin, Denpasar
3	Kelurahan Penatih, Denpasar
4	Desa Pemecutan Kaja, Denpasar
5	Kelurahan Sumerta, Denpasar
6	Kelurahan Gianyar, Gianyar
7	Desa Sukawati, Gianyar
8	Desa Batubulan, Gianyar
9	Desa Blahbatuh, Gianyar
10	Desa Melinggih, Gianyar
11	Desa Takmung, Klungkung
12	Desa Kusamba, Klungkung
13	Desa Kamasan, Klungkung
14	Kelurahan Banyuning, Buleleng
15	Desa Pamaron, Buleleng
16	Desa Penglatan, Buleleng
17	Desa Sidemen, Karangasem
18	Desa Lokasari, Karangasem
19	Desa Kerthabuana, Karangasem
20	Pasar Agung, Denpasar
21	Pasar Sindu, Denpasar
22	Pasar Intaran, Denpasar
23	Pasar Umum Gianyar, Gianyar
24	Pasar Nyanggelan, Denpasar
25	Pasar Amlapura Timur, Karangasem

**HASIL PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA
DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN BBPOM DI DENPASAR
TAHUN 2017**

No	JENIS PRODUK	JUMLAH KASUS	TINDAK LANJUT			
			NON JUSTITIA	%	PRO JUSTITIA	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	OBAT	1	0	0.00	1	100.00
2	PANGAN	5	5	100.00	0	0.00
3	KOSMETIKA	5	1	20.00	4	80.00
4	OBAT TRADISIONAL	4	0	0.00	4	100.00
5	SUPLEMEN	0	0	0.00	0	0.00
TOTAL		15	6	40.00	9	60.00
Nilai Barang Bukti		Rp653,858,300	Rp467,998,600	71.57	Rp185,859,700	28.42

**EVALUASI KINERJA TRIWULAN
BBPOM DI DENPASAR
TAHUN 2017**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	93,00	100,00	93,00	98,84	93,00	98,01	93,00	98,14
		Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	82,00	67,14	82,00	79,80	82,00	75,91	82,00	74,19
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91,00	95,15	91,00	95,15	91,00	95,15	91,00	95,45
		Persentase Suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	81,00	96,30	81,00	96,43	81,00	94,07	81,00	93,18
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,10	100,00	89,10	95,27	89,10	94,96	89,10	89,10
	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	81,00	89,62	81,00	82,82	81,00	82,82	81,00	84,34
		Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	1,00	0,00	2,00	1,00	2,00	1,00	5,00	6,00
	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP Balai POM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	73,14

**TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN ANGGARAN TRIWULAN
BBPOM DI DENPASAR
TAHUN 2017**

ANGGARAN (Rp)	TARGET (Rp) (KUMULATIF)				REALISASI (Rp) (KUMULATIF)			
	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
32,421,201,000	3,421,175,567	6,382,225,550	19,215,390,066	32,421,201,000	3,576,238,949	8,576,460,927	19,025,392,062	31,150,012,568
	CAPAIAN TRIWULAN				104.53%	134.38%	99.01%	96.08%

Keterangan:

1. Realisasi anggaran dihitung berdasarkan SP2D yang diterbitkan sampai dengan triwulan bersangkutan
2. Justifikasi diisi apabila realisasi anggaran tidak mencapai target triwulan yang ditetapkan
3. Rencana Tindak Lanjut (RTL) diisi dengan upaya untuk percepatan realisasi anggaran

